



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1880, 2016

BPKP. Pengembangan Ekspor Nasional. Pedoman
Evaluasi.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI ATAS PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menghasilkan rekomendasi strategis dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi atas program pengembangan ekspor nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL.

Pasal 1

Pedoman Evaluasi atas Pengembangan Ekspor Nasional dimaksudkan sebagai landasan bagi unit kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi atas program pengembangan ekspor nasional.

Pasal 2

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai Pedoman Evaluasi Kegiatan Pengembangan Ekspor Nasional sejak 1 September 2016.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI ATAS PROGRAM
PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

PEDOMAN EVALUASI ATAS PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi dunia ke kawasan asia dan pasifik telah memunculkan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 6% pada tahun 2019 (Bappenas, 2016). Salah satu pendorong terbesar dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, penggerak konsumsi nasional, dan sumber pembiayaan pengeluaran pemerintah adalah dengan memacu kontribusi dari sektor investasi dan perdagangan.

Dalam konteks percepatan kontribusi dari sektor perdagangan, pemerintah telah menetapkan suatu Program Pengembangan Ekspor Nasional yang sejalan dan berkorelasi positif dengan agenda prioritas Presiden, Nawacita butir ke-6 dan 7, yaitu:

butir ke-6: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional.

butir ke-7: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.

Implementasi Program Pengembangan Ekspor Nasional secara umum mengisyaratkan suatu kepentingan strategis, dimana Pemerintah mengharapkan adanya peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian nasional melalui ekspansi pasar ekspor, peningkatan kualitas produk ekspor, serta peningkatan daya saing dan citra produk ekspor Indonesia di pasar global. Dalam area kebijakan nasional, esensi ekspansi pasar dan daya saing yang berkelanjutan (*sustainable competitiveness*) menjadi isu penting pada Program Pengembangan Ekspor Nasional dan merupakan derivasi agenda pembangunan nasional yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam substansi umumnya, agenda tersebut secara tegas mengarah pada upaya peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui pengembangan kapasitas perdagangan nasional sebagai faktor pendukung kemajuan ekonomi.

Untuk mendorong pengembangan dan mencapai sasaran perdagangan luar negeri melalui Program Pengembangan Ekspor Nasional, pemerintah telah menetapkan strategi pembangunan spesifik sebagai berikut:

1. Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing di pasar global termasuk yang melalui titik lintas batas di daerah perbatasan agar dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dan mengurangi tingkat kerentanan ekspor Indonesia terhadap gejolak harga komoditas dunia.
2. Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional melalui peningkatan kualitas produk ekspor, peningkatan pencitraan, penetapan harga produk yang lebih bersaing, serta pengembangan layanan berstandar internasional.
3. Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur yang mendorong proses alih teknologi, meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha lokal, serta meningkatkan daya saing produk nasional.
4. Mengembangkan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif, terutama guna mempercepat proses perizinan dan memperlancar aktivitas ekspor dan impor melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan skema pembiayaan ekspor, serta skema harmonisasi regulasi terkait ekspor dan impor.
5. Mengembangkan keragaman aktivitas dan mekanisme promosi ekspor yang lebih efektif untuk meningkatkan citra produk Indonesia di pasar global.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas *safe guard* dan pengamanan perdagangan lainnya untuk melindungi produk dan pasar dalam negeri dari praktik-praktik perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*).
7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Free Trade Arrangements* (FTA) yang sudah dilakukan, termasuk pemanfaatan fasilitas *safe guard* untuk memberikan manfaat sebesar-sebesarannya bagi kepentingan dan daya saing produk nasional.

Dilihat dari substansinya, Program Pengembangan Ekspor Nasional merupakan program lintas sektoral bidang perdagangan dengan *leading sector* oleh Kementerian Perdagangan. Sebagai suatu program lintas sektoral, Program Pengembangan Ekspor Nasional melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah yang secara hubungan koordinasi memiliki rentang kewenangan dan keterkaitan fungsi dan peran dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan pengawasan intern atas program lintas sektoral untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengawasan lintas sektoral ini diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan lintas sektoral seperti adanya disharmonisasi kebijakan dan ketidakselarasan program, koordinasi antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang cenderung lemah dan belum optimal, serta hambatan pengelolaan keuangan, penatausahaan, dan pelaporan program/kegiatan. Selain itu, sesuai dengan peran BPKP yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.192 Tahun 2014, BPKP melaksanakan pengawasan intern atas program pembangunan nasional; dan salah satu perwujudan dari pengawasan intern atas program pembangunan nasional tersebut adalah dengan melakukan evaluasi terhadap implementasi dan pencapaian target Program Pengembangan Ekspor Nasional.

B. Peraturan Terkait Pengembangan Ekspor Nasional

Beberapa peraturan perundangan terkait pengembangan ekspor nasional, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan pedoman evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, antara lain adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 tentang Jenis Perijinan Ekspor dan Impor, Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*), dan Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka *Indonesian National Single Window*.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019.
13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.
14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 142/M-IND/PER/10/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis Industri Kecil dan Menengah.
15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019.
16. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019.
18. Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia

Nomor P-06/PER/Dep.4/I/2014 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Promosi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan pedoman evaluasi ini adalah untuk memberikan acuan dan/atau panduan langkah kerja bagi Tim Evaluasi BPKP, baik di tingkat Kedeputusan Teknis maupun Perwakilan BPKP guna menyamakan pola evaluasi dan menjamin standar kualitas dalam pelaksanaan Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional.

Pedoman evaluasi ini hanya memuat hal-hal pokok, sehingga diharapkan Tim Evaluasi dapat mengembangkan langkah-langkah atau prosedur lain yang diperlukan sesuai kondisi khusus di masing-masing daerah guna tercapainya hasil evaluasi yang berkualitas, efektif dan efisien

D. Sistematika Pedoman

Pedoman Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, peraturan terkait, tujuan dan sistematika pedoman evaluasi.

BAB II GAMBARAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

Bab ini menguraikan peran ekspor dalam konteks perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan menengah, peran pembinaan terhadap ekspor nasional, keterkaitan kebijakan industri dan program pengembangan ekspor nasional, pemangku kepentingan dalam program pengembangan ekspor nasional, proses bisnis program pengembangan ekspor nasional, dan urgensi evaluasi atas program pengembangan ekspor nasional.

BAB III METODOLOGI EVALUASI ATAS PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

Bab ini menguraikan dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup pengawasan, keluaran/output yang diharapkan, desain kerangka evaluasi, organisasi pelaksanaan evaluasi, serta tahapan pelaksanaan evaluasi, rencana dan jadwal evaluasi, serta anggaran biaya evaluasi.

BAB IV DESAIN PROGRAM KERJA DAN PELAPORAN EVALUASI ATAS
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

Bab ini menguraikan secara rinci desain program kerja evaluasi untuk masing-masing *Tentative Evaluation Objectives* (TEO) yang menjadi fokus evaluasi, dan desain pelaporan evaluasi.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB II
GAMBARAN UMUM
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

A. Ekspor dalam Konteks Perekonomian di Indonesia

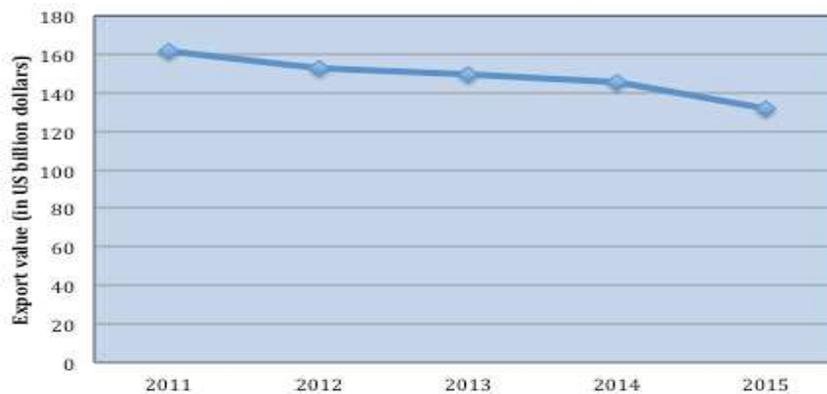
Ekspor, dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dimaksudkan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Dikaitkan dengan definisi perdagangan yang lebih luas, ekspor merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Ekspor barang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing di pasar global, termasuk yang melalui titik lintas batas di daerah perbatasan menjadi variabel krusial dalam sektor perdagangan. Selama ini sebagian besar ekspor terbesar Indonesia adalah *commodity-based* atau ekspor bahan komoditas mentah yang sangat terpengaruh oleh pergerakan harga komoditas yang fluktuatif. Hal ini memunculkan tantangan untuk meningkatkan ekspor atas produk bernilai tambah. Pada umumnya, ekspor yang bernilai tambah dan berdaya saing berpotensi mengurangi tingkat kerentanan ekspor Indonesia terhadap gejolak harga komoditas dunia dan pada akhirnya dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang sangat besar terhadap perekonomian nasional (Bappenas, 2016).

Dalam konteks perekonomian Indonesia, ekspor memiliki 3 (tiga) peran strategis. Yang pertama, kinerja ekspor menjadi salah satu variabel penting penyumbang surplus atau defisit neraca perdagangan nasional (*balance of trade*). Nilai moneter yang cukup besar dari kegiatan ekspor juga merupakan salah satu faktor penyeimbang neraca pembayaran (*balance of payments*) Indonesia. Dalam profil ekspor impor Kementerian Perdagangan (2016), selama kurun waktu 2011-2015, kinerja perdagangan dan ekspor nasional relatif tidak maksimal karena faktor-faktor seperti dampak krisis dan pelemahan keuangan global, respon pasar Cina dan Jepang sebagai salah satu pasar utama ekspor non-migas Indonesia yang cenderung stagnan dan melambat, turunnya harga komoditas, serta iklim investasi dan penanaman modal di dalam negeri yang menurun.

Pada periode 2011-2015, secara total pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) menurun rata-rata 0,3% per tahun, dan transaksi neraca pembayaran untuk pertumbuhan ekspor non-migas juga turun rata-rata 8% per tahun. Grafik berikut menggambarkan penurunan nilai ekspor non-migas Indonesia selama periode 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan 2015 yang disajikan dalam *US million Dollars*. Sementara untuk data perkembangan ekspor non-migas per provinsi disajikan dalam lampiran 8.

Gambar 2.1.
Kinerja Ekspor Non-Migas Indonesia 2011 - 2015



Sumber: *Profil Ekspor-Impor Indonesia, Kementerian Perdagangan, 2016.*

Peran strategis ekspor yang kedua, terutama ekspor non-migas, adalah dalam penciptaan *nation branding*. Pencitraan suatu bangsa merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah untuk membangun dan menjaga persepsi suatu negara secara holistik. Pembentukan citra suatu negara baik secara internal maupun eksternal, berbasis pada nilai dan persepsi positif yang dimiliki, sehingga mendapatkan posisi diantara negara-negara lain di dunia. Persepsi sebuah negara oleh negara lain dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bisnis, perdagangan, pariwisata, bahkan terhadap hubungan diplomasi dan budaya. Konsep *nation branding* memperkuat daya saing nasional, yaitu persepsi citra yang diakumulasikan dari aspek kontribusi Indonesia terhadap inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh negara asal (*country of origin*) terhadap keinginan masyarakat global untuk membeli suatu produk, dan derajat kreativitas suatu negara. Pada tahun 2015, skor dimensi ekspor *Nation Branding Index* (NBI) Indonesia adalah sebesar 46,67 dan berada pada peringkat 39, turun dari peringkat 38 dengan skor 46,50 di tahun 2014 (Anholt-GFK, 2015).

Peran strategis ekspor yang ketiga dalam konteks perekonomian Indonesia adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks pasar ekspor non-migas, kontribusi nilai ekspor Indonesia yang cukup besar berasal dari produk UMKM sebagai populasi pelaku usaha terbesar di Indonesia. Data tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah usaha UMKM di Indonesia mencapai 57,89 juta unit dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 114,14 juta dan kontribusi pada sektor ekspor non-migas sebesar 182,112 triliun.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2016), meskipun kontribusi keseluruhan dari ekspor produk UMKM dari total nilai ekspor nasional masih berkisar 16%, namun sektor UMKM berorientasi ekspor memiliki potensi pengembangan yang cukup besar dalam tataran perekonomian domestik. Sektor UMKM dianggap mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup masif dan merata di seluruh daerah, membangun kewirausahaan baru, dan berperan sebagai pusat inkubasi inovasi dan industri kreatif. Selain itu, penggunaan logistik dan atau sumber daya lokal sebagai bahan baku utama produksi, menjadikan sektor UMKM tidak terlalu rentan dan kurang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan keuangan global yang cenderung dinamis.

Namun, dalam Rencana Strategis Kementerian UMKM 2015-2019 disebutkan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan “*missing middle*” yaitu perekonomian dianggap kekurangan jumlah usaha kecil dan menengah yang sebenarnya dibutuhkan untuk menopang industrialisasi dan ekspor nasional serta partisipasi dalam jaringan produksi dan pemasaran global (Sidabutar, 2014). Data perkembangan usaha UMKM untuk tahun 2012-2013 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) 2012-2013

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	Perkembangan (%)
1.	Jumlah Unit Usaha	unit	56.534.592	57.895.721	2.41
	- Usaha Mikro		55.856.176	57.189.393	2.39
	- Usaha Kecil		629.418	654.222	3.94
	- Usaha Menengah		48.997	52.106	6.35
2.	Jumlah Tenaga Kerja	orang	107.657.509	114.144.082	6.03
	- Usaha Mikro		99.859.517	104.624.466	4.77
	- Usaha Kecil		4.535.970	5.570.231	22.80
	- Usaha Menengah		3.262.023	3.949.385	21.07

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	Perkembangan (%)
3.	Total Ekspor nonmigas	Rp	166.626,5	182.112,7	9.29
	- Usaha Mikro	Milyar	15.235,2	15.989,5	4.95
	- Usaha Kecil		32.508,8	32.051,8	(1.41)
	- Usaha Menengah		118.882,4	134.071,4	12.78

Sumber: Data UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM 2016

Potensi pengembangan UMKM ke depan akan semakin besar dengan adanya transformasi perekonomian yang semula bergantung pada sumber daya alam (*resource-based economy*) dan kemudian bergerak ke perekonomian yang berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge-based economy*). Transformasi ini membuka peluang yang besar untuk peningkatan kegiatan pemberdayaan UMKM melalui pengembangan dan peningkatan daya saing UMKM agar mampu menjadi bagian pelaku usaha yang memperkuat basis ekonomi dalam negeri.

Dari tinjauan atas tiga peran strategis ekspor dalam konteks perekonomian di Indonesia tersebut, kemudian teridentifikasi *gap* yang menunjukkan bahwa *trend* kontribusi ekspor nasional, terutama ekspor non-migas, terhadap perekonomian cenderung belum maksimal. Defisit neraca perdagangan non-migas, daya saing dan citra produk yang relatif masih rendah, dan potensi pemberdayaan dan kontribusi UMKM berorientasi ekspor yang belum tergali optimal mengimplikasikan produk non-migas berkontribusi rendah terhadap total ekspor nasional dan ada indikasi bahwa produk ekspor non-migas Indonesia masih kalah bersaing di pasar regional dan internasional.

B. Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah definisi dari setiap kluster usaha dibagi berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pada praktiknya, penggunaan istilah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan sering tergantikan dengan istilah Industri Kecil dan Menengah (IKM), meskipun secara normatif kedua istilah sebenarnya memiliki makna yang tidak berbeda. Secara umum, UKM akan lebih banyak digunakan dalam konteks perdagangan sementara IKM akan lebih banyak digunakan dalam konteks industri. Penggunaan istilah IKM biasanya karena melibatkan proses produksi dan menghasilkan nilai tambah sedangkan UKM lebih banyak dalam proses penjualan/pemasaran. Jumlah pelaku IKM akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pelaku UKM sehingga pelaku IKM adalah bagian dari pelaku UKM.

Selain itu, jika definisi UKM menggunakan kriteria jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan, maka IKM menggunakan kriteria total investasi berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian sebagai berikut:

1. Industri Kecil yaitu industri dengan nilai investasi paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Industri Menengah yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Dari segi legalitas usaha, UKM dan IKM juga akan memiliki perbedaan dalam hal kelengkapan perizinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri (TDI), pasal 8 menyatakan bahwa:

1. Industri kecil dengan nilai investasi perusahaan sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.
2. Industri kecil dengan nilai investasi perusahaan diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
3. Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 36 menyatakan bahwa bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan dalam bentuk:

1. Surat Izin Usaha untuk usaha kecil non-perseorangan dan usaha menengah.
2. Tanda Bukti Pendaftaran diberlakukan untuk usaha kecil perseorangan.
3. Tanda Bukti Pendataan diberlakukan untuk usaha mikro.

Selain itu, legalitas perizinan khususnya untuk usaha mikro dan kecil juga dipertegas dalam Peraturan Presiden No.98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dimana Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dinyatakan sebagai tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil satu lembar.

C. Peran Pembinaan Pemerintah Terhadap Ekspor Nasional

Pasal 74 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar bagi barang dan jasa produksi dalam negeri. Cakupan program pembinaan tersebut termasuk pemberian insentif, fasilitas, informasi, peluang pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan ekspor.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi pembinaan program pengembangan ekspor nasional tersebut, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan, sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program pengembangan ekspor nasional, telah menetapkan strategi dan arah kebijakan utama program pengembangan ekspor nasional dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2015-2019 yang terdiri dari:

1. Peningkatan pertumbuhan barang ekspor non-migas yang bernilai tambah
Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia melalui peningkatan kontribusi ekspor jasa serta peningkatan kontribusi ekspor produk-produk manufaktur. Program dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan ekspor antara lain program promosi dagang di berbagai negara, kegiatan pengembangan produk untuk peningkatan daya saing, penyediaan informasi pasar dan informasi produk, penyediaan pelayanan hubungan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ekspor.
2. Peningkatan diversifikasi pasar dan produk ekspor
Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beberapa jenis produk tertentu dan kelompok negara-negara tujuan ekspor tertentu. Upaya yang ditempuh antara lain melalui kegiatan pengembangan desain, dukungan penciptaan kemasan dan merk, serta penyediaan informasi pasar tujuan ekspor.
3. Peningkatan promosi citra produk ekspor Indonesia
Pencitraan bangsa merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah untuk membangun dan menjaga persepsi suatu negara secara holistik. Pembentukan citra suatu negara, baik internal maupun eksternal, berbasis pada nilai dan persepsi positif yang dimiliki sehingga mendapatkan posisi di antara negara-negara lain di dunia. Persepsi sebuah negara oleh negara-negara lain dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bisnis, perdagangan, pariwisata, bahkan juga terhadap hubungan diplomasi, budaya, dan hubungan antar negara lainnya.
4. Optimalisasi kelembagaan ekspor
Upaya meningkatkan peran penyediaan informasi dan akses pasar bagi para pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan ekspor sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku ekspor melalui berbagai kegiatan antara lain penyediaan informasi pasar tujuan ekspor yang dapat diakses oleh

pelaku usaha, pendirian lembaga promosi di luar negeri, serta penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan ekspor.

D. Keterkaitan Kebijakan Industri dan Program Pengembangan Ekspor Nasional

Industri, menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian diterjemahkan sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Dalam kaitannya dengan program lintas sektoral seperti Program Pengembangan Ekspor Nasional, peran industri dan kebijakan perindustrian menjadi strategis dan sangat relevan karena kebijakan industrialisasi, standarisasi proses produksi, dan inkorporasi teknologi dalam proses industri menjadi tumpuan pengembangan produk berorientasi ekspor.

Hubungan dan sinergi antara Kementerian Perdagangan sebagai pembina pelaku pemasaran nasional dan Kementerian Perindustrian sebagai pembina pelaku produksi nasional menjadi isu yang penting karena harmonisasi kebijakan dan operasionalisasi kebijakan kedua kementerian baik di tingkat kementerian teknis maupun di pemerintah daerah akan saling bersinggungan. Dalam arah dan kebijakan strategi pembangunan industri nasional yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015-2019, *proxy* terkait dengan industri prioritas, perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) menjadi agenda prioritas nasional. Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang diciptakan dari kebijakan industri nasional ini sangat berperan dalam membangun fondasi perdagangan dan perekonomian yang pada akhirnya akan mengarah dan mendukung capaian target ekspor nasional.

Beberapa sasaran/target kinerja industri nasional yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015-2019 yang berpotensi mendukung sasaran/target pengembangan ekspor nasional diantaranya tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.
Sasaran/Target Kinerja Industri
yang Mendukung Program Pengembangan Ekspor Nasional

Sasaran Kebijakan Perindustrian	Indikator	Proyeksi Jangka Menengah				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional	Laju pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non-migas (%)	6.0	6.9	7.5	8.1	8.6
	Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional (%)	20.8	21	21.1	21.3	21.6
Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional (%)	66.3	66.9	67.7	68.4	69.1
Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional	Pertumbuhan jumlah unit IKM (%)	1	1	1	1	1
	Penyerapan tenaga kerja IKM (%)	3	3	3	3	3
Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standarisasi industri	Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib.	10	10	10	10	10

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015-2019.

E. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam Program Pengembangan Ekspor Nasional

Salah satu karakteristik dari suatu program lintas sektoral adalah keterlibatan beberapa institusi dalam implementasi dan eksekusi dari suatu program dan adanya pembagian peran dan fungsi serta pola hubungan koordinasi antar institusi yang terlibat. Instansi yang berkepentingan (*stakeholders*) mendeskripsikan pihak-pihak dan/atau instansi yang memiliki kewenangan dan persinggungan urusan terkait dengan proses formulasi kebijakan, perencanaan, implementasi, dan pertanggungjawaban program pengembangan ekspor nasional. Berikut adalah daftar pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki peran dalam program pengembangan ekspor nasional:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Melaksanakan perencanaan kebijakan pembangunan yang berkualitas serta melakukan evaluasi dan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan ekspor nasional.

2. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan, khususnya Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional memiliki tugas pokok penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor, serta pelaku pasar.

3. Kementerian Keuangan.
Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melaksanakan fungsi administrasi dan pelayanan perpajakan, serta kepabeanan dan cukai dalam pelaksanaan ekspor.
4. Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menetapkan kebijakan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan ekspor terkait dengan pelaku ekspor berbasis usaha kecil dan menengah.
5. Kementerian Perindustrian
Kementerian Perindustrian berperan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian serta melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dalam mendukung kinerja ekspor nasional.
6. Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri berperan dalam kerangka koordinasi pembangunan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional dan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dan daerah. Koordinasi teknis pembangunan ini mencakup proses sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah serta pembinaan pelaksanaan urusan pembangunan sesuai dengan kewenangan.
7. Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mengembangkan ekspor nasional, mewujudkan sinergi yang solid antara pusat dan daerah dalam mendukung peningkatan ekspor non-migas sebagai kontribusi sektor ekspor bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
8. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/ PT Indonesian Eximbank
Berdasarkan UU No.2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI atau PT. Indonesian Eximbank bertugas untuk menyediakan fasilitas kepada entitas bisnis, termasuk individu untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program pengembangan ekspor nasional.
9. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
APINDO merupakan wadah yang memfasilitasi komunikasi para pengusaha atas isu-isu yang terkait dengan ketenagakerjaan/perburuhan, hubungan industrial, dan kepentingan pemerintah.

F. Proses Bisnis Program Pengembangan Ekspor Nasional

Meskipun Program Pengembangan Ekspor Nasional merupakan *core business* dari Kementerian Perdagangan, tahapan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam alur proses bisnis Program Pengembangan Ekspor Nasional, terutama dalam konteks sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) cukup kompleks dan saling berhubungan. Secara umum, berdasarkan alur kerja proses ekspor nasional yang disarikan dari berbagai praktik bisnis dan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai ekspor, diantaranya:

1. Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
2. Undang-undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
3. Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
4. Peraturan Menteri Perdagangan No.13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
6. Peraturan Menteri Perdagangan No.26/M-DAG/PER/6/2013 tentang Jenis Perijinan Ekspor dan Impor, *Standard Operating Procedure* (SOP), dan Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Ekspor.

Secara sederhana, alur bisnis Program Pengembangan Ekspor Nasional dalam konteks Sektor UKM dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2.
Proses Bisnis Ekspor Nasional



Sumber: Diolah dari berbagai ketentuan peraturan perundangan.

Proses bisnis dari ekspor nasional dapat dibagi menjadi empat tahapan utama yang meliputi:

1. Proses produksi (industri) dan standarisasi kualitas produk ekspor

Mencakup diantaranya distribusi kebutuhan bahan/logistik pokok untuk proses produksi/industri, mekanisme sertifikasi standar dan kualitas produk ekspor, fasilitasi hak kekayaan intelektual atas desain dan produk UMKM, serta pengembangan produk unggulan daerah.

Tahapan ini merupakan proses inisial produksi dan industri produk ekspor oleh para pelaku usaha. Dalam pelaksanaan proses produksi, topik mengenai ketersediaan bahan baku/logistik untuk mendukung proses produksi, pengurusan sertifikasi kualitas dan produk ekspor, serta pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi wacana strategis. Selain itu, dalam Program Pengembangan Ekspor di daerah, penciptaan produk ekspor dalam konteks Pengembangan Produk Unggulan Daerah menjadi relevan karena dapat mendorong identifikasi potensi produk ekspor dan meningkatkan kualitas keberagaman produk ekspor dari daerah.

Kementerian teknis yang terlibat dalam tahapan proses bisnis ini adalah antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Dalam Negeri.

2. Proses fasilitasi permodalan, akses informasi pasar, promosi produk, dan insentif lainnya

Mencakup proses pembiayaan ekspor dan insentif permodalan, pemanfaatan laporan/informasi pasar, penyelenggaraan promosi ekspor, pelatihan ekspor, serta pembinaan dan pemberdayaan UMKM.

Tahapan dalam proses ini secara substansi merupakan bentuk dukungan kebijakan dan pemberian fasilitas/insentif oleh pemerintah baik melalui kementerian teknis maupun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah daerah. Dukungan kebijakan dan insentif yang diperlukan dalam tahapan proses bisnis ini adalah antara lain bantuan permodalan dan pembiayaan ekspor, sosialisasi dan diseminasi informasi pasar ekspor dalam bentuk *market intelligence* atau *market brief*, penjaringan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pameran dagang (*trade expo*) dan promosi ekspor, pelatihan produksi dan pelatihan ekspor (*coaching programme*), serta kegiatan pembinaan dan pemberdayaan UKM.

Kementerian teknis yang terlibat dalam tahapan proses bisnis ini adalah antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan

Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM di daerah.

3. Proses fasilitasi perizinan ekspor

Mencakup proses perizinan ekspor yang dikelola oleh dan menjadi tanggung jawab dari Unit Layanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan dengan menggunakan INATRADE dan *National Single Window System*. Implementasi perizinan ekspor sudah menginkorporasi penggunaan teknologi informasi sehingga pengurusan perizinan ekspor dapat dilakukan dengan lebih efisien. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga telah menyediakan layanan konsultasi terkait dengan proses perizinan ekspor melalui *customer service centre (export-import centre)*.

4. Proses fasilitasi kepabeanan dan pemeriksaan ekspor

Mencakup prosedur kepabeanan ekspor yang dikelola oleh dan menjadi tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan termasuk didalamnya pemberitahuan ekspor barang, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Bea Keluar, pemeriksaan pabean dan barang ekspor, pemuatan barang, rekonsiliasi, pengangkutan ekspor, dan pengawasan kepabeanan, serta imigrasi dan karantina.

Namun untuk pengawasan intern lintas sektoral atas Program Pengembangan Ekspor Nasional ini akan difokuskan pada dua tahapan pertama yaitu: proses produksi (industri) dan standarisasi kualitas produk ekspor dan proses fasilitasi insentif permodalan, akses informasi pasar, promosi produk, dan insentif lainnya.

G. Urgensi Evaluasi Atas Program Pengembangan Ekspor Nasional

Sebagai agenda nasional yang bersifat strategis, program pengembangan ekspor nasional memiliki substansi perencanaan, implementasi, dan pertanggungjawaban kebijakan yang cukup kompleks. Kompleksitas kebijakan dan program pengembangan ekspor nasional ini didasari landasan ideologis bahwa negara harus dapat berdikari dalam ekonomi dan rakyat sebagai pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional sangat berperan dalam memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan.

Menilik karakteristik agenda strategis nasional dan identifikasi *gap* dalam Program Pengembangan Ekspor Nasional, perlu adanya upaya pengawalan dan pengawasan yang strategis. Dalam konteks program pengembangan ekspor nasional, urgensi Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional didasarkan pada empat fokus utama yaitu:

1. Pengawalan pencapaian target RPJMN 2015-2019

Program pengembangan ekspor nasional harus dapat menjadi *trigger* yang kuat untuk memposisikan Indonesia dalam peta kompetisi perdagangan regional dan global sehingga kebijakan dan regulasi perdagangan luar negeri harus membangun ekosistem yang atraktif untuk pengembangan industri, perdagangan, serta meningkatkan ekspor. Untuk proyeksi jangka menengah, pemerintah telah menetapkan sasaran perdagangan/ekspor nasional dengan indikator terkait perdagangan dan ekspor nasional sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Sasaran Program Pengembangan Ekspor Nasional 2015-2019

Sasaran Program Pengembangan Ekspor Nasional	Indikator	Proyeksi Jangka Menengah				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pertumbuhan barang ekspor non-migas yang bernilai tambah dan jasa.	Pertumbuhan Ekspor Non-Migas (%)	8.0	9.9	11.9	13.7	14.3
	Rasio Ekspor Jasa terhadap PDB (%)	12-14	13-16	14-17	16-18	16-19
	Kontribusi Produk Manufaktur terhadap Total Ekspor (%)	44.0	47.0	51.0	57.0	65.0
Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor.	Pertumbuhan Ekspor Non-Migas ke Pasar Utama (%)	5.5	7.7	10	11.5	13.5
	Pertumbuhan Ekspor Non-Migas di Pasar Prospektif (%)	9.7	11.9	14.3	15.9	18
	Pertumbuhan Ekspor Non-Migas Produk Utama (%)	5.9	8	10.4	11.9	13.9
	Pertumbuhan Ekspor Non-Migas Produk Prospektif	10.6	12.8	15.2	16.8	18.9
Meningkatnya promosi citra produk Indonesia.	Skor Dimensi Ekspor dalam National Branding Index	45-46	46-47	47-48	48-49	49-50
Optimalnya kelembagaan ekspor.	Peningkatan pemanfaatan laporan pasar ekspor (<i>market intelligent</i> dan <i>market brief</i>) (pelaku usaha).	500	650	800	950	1100
	Pendirian lembaga promosi di luar negeri (unit)	2	2	1	2	1
	Persentase UKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir (%)	10	10	12	12	15

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2015-2019.

Selain itu, untuk sasaran meminimalisasi dampak globalisasi dan ekonomi global, peningkatan pertumbuhan ekspor yang menggunakan skema kesepakatan kerjasama ekonomi internasional ditetapkan sebesar 10%, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hasil-hasil kesepakatan kerjasama ekonomi internasional mencapai 65%, dan pertumbuhan nilai

ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi sebesar 10% pada tahun 2019.

2. Mitigasi hambatan dan permasalahan ekspor nasional

Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional juga diarahkan sebagai upaya mitigasi dan penyelesaian hambatan/permasalahan yang terkait dengan Program Pengembangan Ekspor Nasional. Berikut ini adalah identifikasi titik-titik kritis (*critical points*) dan juga potensi masalah dan hambatan dalam proses bisnis pengembangan ekspor nasional mencakup isu perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban (pelaporan), serta atas dampak kebijakan program yang ditinjau dari dua aspek yaitu:

a. Regulasi dan kebijakan (*regulation and policy*)

Suatu aspek dikategorikan dalam cakupan regulasi dan kebijakan apabila uraian titik kritis dan potensi masalah secara substansi lebih mengarah pada suatu kondisi terdapat kelemahan dan potensi masalah yang ditimbulkan oleh peraturan perundangan dan/atau kerangka regulasi lainnya serta kebijakan yang terkait dengan program pengembangan ekspor nasional.

b. Implementasi kebijakan (*policy implementation*).

Suatu aspek dikategorikan dalam cakupan implementasi kebijakan (*policy implementation*) apabila uraian titik kritis dan potensi masalah secara substansi lebih mengarah pada suatu kondisi terdapat kelemahan dan potensi masalah yang ditimbulkan oleh tata kelola (*governance*) termasuk pengendalian (*control*) dalam eksekusi prosedur kerja dan *business process* program pengembangan ekspor nasional. Dalam hal ini yang dimaksud tata kelola (*governance*) meliputi keberadaan dan peran kelembagaan sebagai pemangku kepentingan program/kegiatan maupun proses implementasinya, dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi atas program/kegiatan.

Berdasarkan survei pendahuluan dan kajian literatur atas program pengembangan ekspor nasional diantaranya berasal dari Paket Kebijakan Ekonomi I (2015), Forum Pengembangan Ekspor Nasional (2015), Paparan Kementerian Koordinator Perekonomian dalam Inland FTA dan AEC, *Journal Asian Social Science*, 10 (19) tahun 2014, dan LAKIP Ditjen PEN tahun 2015, berikut adalah titik-titik kritis (*critical points*) dan indikasi

masalah dalam pelaksanaan program pengembangan ekspor nasional yang disajikan kedalam matriks berikut.

Tabel 2.4.
Isu dan Permasalahan Ekspor di Indonesia

No.	Uraian Titik Kritis/ Potensi Masalah	Instansi Terkait	Sumber Referensi
Aspek Regulasi/Kebijakan			
1.	Sinergi kebijakan pengembangan ekspor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang belum optimal.	Kemendag, Pemda	Forum Sinergi Pengembangan Ekspor, 2015
2.	Rendahnya fasilitas yang diterima industri dalam negeri dalam bentuk pemberian kebijakan perdagangan dan akses permodalan ke pelaku usaha menyiratkan daya saing Indonesia yang rendah.	Kemendag, Kemenperin	Antara News, 2015
3.	Industri dalam negeri dan produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atau <i>Small Medium Industries</i> (SMI) masih kurang kompetitif karena tidak adanya pengaturan standar dan kualitas dari pemerintah, proses pembinaan belum fokus pada sumber daya, belum adanya pusat promosi di daerah, proses <i>quality control</i> yang lemah, dan ketidakmampuan UKM untuk mendukung proses produksi massal (<i>mass production</i>).	Kemenkop & UKM, Kemenperin	<i>Asian Social Science</i> , 10 (19), 2014
4.	Pemerintah dirasa kurang memfasilitasi UKM/SMI dalam hal membangun kerjasama dengan industri besar dan pemberian informasi atas akses pasar ekspor.	Kemendag, Kemenkop & UKM	Kajian Peluang dan Permasalahan yang dihadapi UMKM berorientasi Ekspor
5.	Atensi pemerintah dalam hal pemberian insentif fiskal untuk mengatasi ekonomi biaya tinggi (<i>high economic cost</i>) masih belum optimal.	Kemenkeu	Paket Kebijakan Ekonomi I, Kebijakan <i>Inland FTA</i> dalam rangka AEC
Aspek Impelementasi Kebijakan (termasuk kelembagaannya)			
6.	Birokrasi serta efektivitas dan transparansi kelembagaan ekspor masih menjadi sorotan pelaku ekspor dan investor termasuk potensi <i>fraud</i> dan praktik korupsi serta kolusi.	Kemendag, Kemenkeu, Pemda	LAKIP Ditjen
7.	Masih terdapat pemerintah daerah yang seringkali menerbitkan peraturan daerah untuk pemungutan pajak daerah yang terkait dengan ekspor sebagai sumber pendanaan APBD, belum lagi adanya pungutan-pungutan liar dan tidak resmi.	Pemda	Neraca News, 2015
8.	Birokrasi dan kelembagaan di daerah cenderung sering berubah dan kapasitas SDM Perdagangan di daerah masih terbatas.	Pemda	Hasil Survei Pendahuluan
9.	Pengawasan atas kebijakan dan aktivitas program pengembangan ekspor nasional masih belum optimal.	BPKP	Hasil Survei Pendahuluan

No.	Uraian Titik Kritis/ Potensi Masalah	Instansi Terkait	Sumber Referensi
10.	Program pengembangan ekspor masih dihadapkan pada persoalan fasilitas infrastruktur dan jaringan (pelabuhan, transportasi, sumber daya energi) yang belum sesuai dengan laju tuntutan pasar dan ekonomi.	Kemendag, Bappenas	Paket Kebijakan Ekonomi I, Kebijakan <i>Inland</i> FTA dalam rangka AEC
11.	Peningkatan biaya logistik yang dapat menghambat ekspor dan investasi.	Kemendag, Bappenas	Paket Kebijakan Ekonomi I, Kebijakan <i>Inland</i> FTA dalam rangka AEC
12.	Faktor keamanan barang dan jasa di <i>shipping point</i> masih belum mendapatkan perhatian yang optimal oleh otoritas, dimana aktivitas premanisme sering kali menjadi kendala proses produksi dan distribusi industri.	Kemendag, Kemenkeu	Antara News, 2015
13.	Anggaran untuk kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya untuk produk UKM/IKM masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi sehingga belum optimal dalam mendukung kegiatan promosi ekspor nasional.	Kemendag, Kemenperin, Kemenkop & UKM	CNN News, 2015 dan LAKIP Ditjen PEN
14.	Banyak pelaku usaha di daerah masih belum berorientasi ekspor karena masih sering bermasalah dengan aspek legalitas dan perijinan usaha.	Pemda	Hasil Survei Pendahuluan

3. Respon atas dampak kompleksitas faktor eksternal

Dari perspektif eksternal, konteks program pengembangan ekspor nasional sangat dipengaruhi oleh situasi global yang didominasi oleh perekonomian Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Negara Industri maju lainnya yang diperkirakan akan tetap menjadi penggerak pasar ekspor dari Negara berkembang, termasuk Indonesia. Sejalan dengan semakin terbukanya pasar global dan dengan adanya berbagai perjanjian perdagangan bebas, baik bilateral, regional, maupun multilateral, timbul berbagai tantangan bagi pengembangan ekspor nasional.

Sementara itu, dalam lingkup regional momentum dan implementasi dari *The ASEAN Community* 2015 juga membuka peluang yang besar bagi perekonomian dan ekspor nasional. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan pilar dari kompetisi regional atas aliran barang dan jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil (Bappenas, 2016). Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari akan menuntut kapasitas daya saing yang lebih tinggi dan pengawasan intern lintas sektoral atas program pengembangan ekspor nasional diharapkan dapat menjadi salah satu dorongan peningkatan kualitas daya saing tersebut (Febrianto, 2015).

4. Perumusan rekomendasi strategis

Hasil akhir dari Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional adalah rekomendasi strategis (*strategic recommendation*) kepada Pemerintah dan *stakeholders* terkait, yang dapat berupa masukan, informasi dan saran perbaikan mengenai kebijakan maupun implementasi kebijakan atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, khususnya yang berkaitan dalam upaya mendorong pengembangan ekspor non migas yang bernilai tambah oleh UKM/IKM selaku pelaku usaha/ekspor.

BAB III
METODOLOGI EVALUASI
ATAS PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

A. Dasar Hukum

Dasar hukum evaluasi atas program pengembangan ekspor nasional adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sesuai dengan amanat kedua dasar hukum dimaksud, BPKP bertanggung jawab melaksanakan pengawasan intern terhadap program/kegiatan pembangunan nasional yang bersifat lintas sektoral, diantaranya Program Pengembangan Ekspor Nasional sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015 – 2019. Lebih lanjut, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral adalah kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) karena keterbatasan kewenangan; dan,
2. Yang dimaksud dengan evaluasi sebagai salah satu bentuk pengawasan intern adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, termasuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan dan implementasi kebijakan Program Pengembangan Ekspor Nasional, sebagai berikut:

1. Evaluasi atas kebijakan pengembangan ekspor nasional, dengan tujuan:
 - a. Mengidentifikasi keberadaan kebijakan/prosedur formal yang bersifat (lebih) operasional untuk mendorong pengembangan ekspor non migas yang bernilai tambah, khususnya bagi pelaku ekspor UKM/IKM dalam rangka mendukung upaya pengembangan ekspor nasional.
 - b. Menganalisis adanya ketidakjelasan/ketidaksinkronan (disharmonisasi) dan tumpang tindih antar kebijakan/regulasi yang mengatur mengenai pengembangan ekspor, baik pengembangan produk ekspor maupun pasar ekspor.
2. Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekspor Nasional, dengan tujuan:
 - a. Mengidentifikasi dan menganalisis keberadaan dan peran kelembagaan ekspor dalam upaya optimalisasi pengembangan ekspor nasional.
 - b. Mengidentifikasi dan menganalisis sejauhmana penetapan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekspor sebagai salah satu indikator kinerja masing-masing satuan kerja kementerian teknis maupun pemerintah daerah.
 - c. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi dan permasalahan atas pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi atas program/kegiatan pengembangan ekspor nasional/daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional meliputi evaluasi atas kebijakan dan implementasi kebijakan program/kegiatan pengembangan ekspor untuk suatu periode tahun tertentu, dengan sasaran evaluasi, sebagai berikut:

1. Aspek kebijakan pengembangan ekspor nasional, yang menitikberatkan pada keberadaan kebijakan/regulasi atas pengembangan produk ekspor maupun pasar ekspor dan harmonisasi antar kebijakan/regulasi yang ada.
2. Aspek implementasi kebijakan pengembangan ekspor nasional, yang menitikberatkan pada kelembagaan ekspor, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi atas program/kegiatan pengembangan ekspor. Dalam hal ini, sesuai dengan RPJMN 2015 – 2019, program/kegiatan pengembangan ekspor nasional meliputi:

Tabel 3.1.
Program/Kegiatan Pengembangan Ekspor Nasional (RPJMN 2015 – 2019)

Program	Kegiatan	Sasaran/Target
a. Pengembangan Ekspor Nasional (Perdagangan)	1) Peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor	➢ Meningkatnya peran dunia usaha dan lembaga ekspor dalam peningkatan ekspor non migas
	2) Pengembangan promosi dan citra	➢ Meningkatnya hubungan dan nilai transaksi dagang
	3) Kerjasama pengembangan ekspor	➢ Meningkatnya citra produk ekspor
	4) Pengembangan produk ekspor	➢ Meningkatnya kualitas dan diversifikasi dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor di Pasar Utama maupun Pasar Prospektif
	5) Pengembangan SDM bidang ekspor	➢ Meningkatnya jumlah dan kualitas pelatihan eksportir dan calon eksportir
	6) Pengembangan pasar dan informasi ekspor	➢ Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan informasi ekspor
b. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri (Perdagangan)	7) Pengelolaan ekspor produk pertanian, kehutanan dan industri	➢ Tersedianya kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang ekspor produk pertanian, kehutanan dan industri
	8) Pengelolaan Fasilitasi Ekspor	➢ Tersedianya kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi ekspor
	9) Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	➢ Meningkatnya hasil pengamanan dan perlindungan akses pasar
	10) Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah	➢ Meningkatnya peran daerah dalam fasilitasi ekspor nasional, Meningkatnya kemampuan dan keterampilan eksportir daerah dalam bidang ekspor dan promosi
	11) Dukungan Sektor Perdagangan terhadap KEK	➢ Meningkatnya peranan sektor perdagangan di Kawasan Ekonomi
c. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional (Perdagangan)	12) Peningkatan kerjasama perdagangan, multilateral, bilateral, ASEAN dan forum internasional lainnya	➢ Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Multilateral dan Bilateral ➢ Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internal dan Eksternal ASEAN ➢ Peningkatan Kerja Sama Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional Lainnya ➢ Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Hasil Perdagangan Internasional
d. Penumbuhan/ Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri (Perindustrian)	13) Pengembangan fasilitasi industri	➢ Terbangunnya Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua ➢ Terfasilitasinya pengembangan industri di daerah
e. Penumbuhan/ Pengembangan Industri Berbasis Agro (Perindustrian)	14) Revitalisasi dan penumbuhan industri hasil hutan, perkebunan dan perikanan	➢ Meningkatnya daya saing industri hasil hutan, perkebunan dan perikanan
f. Penumbuhan/ Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Perindustrian)	15) Penyebaran dan penumbuhan industri kecil dan menengah	➢ Meningkatnya fasilitas pengembangan produk IKM ➢ Terfasilitasinya peningkatan kemampuan sentra ➢ Terfasilitasinya bantuan informasi pasar, promosi dan pameran

Program	Kegiatan	Sasaran/Target
g. Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen (Perindustrian)	16) Peningkatan kualitas perencanaan	➤ Tersusunnya Kebijakan Industri yang sesuai dengan Visi-Misi Presiden
	17) Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	➤ Meningkatnya apresiasi terhadap produk industri dalam negeri
	18) Penelitian dan Pengembangan Teknolog	➤ Meningkatnya kemampuan Balai Besar dan terwujudnya hasil litbang untuk meningkatkan daya saing industri
h. Peningkatan Daya Saing UMKM (Koperasi & UMKM)	19) Peningkatan kualitas produk UMKM	➤ Meningkatnya kualitas dan daya saing produk ➤ UMKM dan koperasi
	20) Peningkatan akses UMKM ke pasar luar negeri	➤ Meningkatnya jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi di pasar luar negeri

Rincian lebih lengkap atas program/kegiatan pengembangan ekspor (RPJNM 2015 – 2019), disajikan pada Lampiran Pedoman Nomor 4 dan 5.

D. Keluaran/Output yang Diharapkan

Keluaran/output yang diharapkan dari evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional adalah hasil identifikasi atas kondisi dan permasalahan program/kegiatan pengembangan ekspor beserta rekomendasi strategis yang relevan kepada Pemerintah dan *Stakeholders* terkait sebagai bahan masukan, informasi dan saran perbaikan dalam rangka optimalisasi dan peningkatan pengembangan ekspor nasional.

Lebih lanjut, dalam rangka memastikan diperolehnya keluaran/output yang diharapkan dalam pelaksanaan evaluasi, maka disusun permasalahan-permasalahan tentatif (*Tentative Evaluation Objectives ~ TEO*) sebagai acuan sasaran dan langkah kerja evaluasi bagi Tim Evaluasi BPKP, baik di tingkat Kedeputian teknis maupun Perwakilan BPKP.

E. Desain Kerangka Evaluasi

Untuk memastikan pencapaian tujuan, sasaran, dan output/keluaran dari pelaksanaan Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, telah disusun suatu desain kerangka evaluasi yang menggambarkan tahapan kegiatan dalam proses evaluasi, sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Desain Kerangka Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional



Dari gambar 3.1. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penentuan *Tentative Evaluation Objectives* (TEO)

TEO diidentifikasi dan dibangun berdasarkan kondisi-kondisi normatif serta isu dan permasalahan yang berkembang terkait kebijakan dan implementasi kebijakan atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, sesuai dengan ruang lingkup evaluasi yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi ini, terdapat 25 TEO yang menjadi fokus evaluasi, yang terdiri 4 TEO berkaitan dengan aspek kebijakan dan 21 TEO berkaitan dengan aspek implementasi kebijakan, yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.

2. Evaluasi dengan pendekatan *Root Cause Analysis*

Dalam pelaksanaan evaluasi, Tim Assurance menggali informasi untuk membuktikan dan menguji TEO sebagai fokus evaluasi dengan langkah-langkah kerja mengacu pada program kerja evaluasi. Tim Assurance diharapkan dapat mengevaluasi dan menganalisis secara mendalam mengenai kondisi dan permasalahan berkaitan TEO – TEO sebagai fokus evaluasi dengan menggunakan pendekatan “*Root Cause Analysis*”, yaitu suatu metode/teknik bertanya dengan lebih mendalam (*the five whys approach*) sehingga dapat diperoleh simpulan yang memadai atas atribut (kondisi, sebab dan akibat) TEO-TEO yang dievaluasi, untuk selanjutnya dapat dirumuskan rekomendasi strategis yang relevan.

3. Identifikasi Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program

Hasil evaluasi dengan pendekatan "*Root Cause Analysis*" tersebut, selanjutnya Tim *Assurance* diharapkan dapat mengidentifikasi dan memetakan faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Program Pengembangan Ekspor Nasional sebagai data dan informasi yang dapat diungkapkan dalam laporan hasil evaluasi, disamping menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi strategis atas hasil evaluasi.

4. Perumusan Rekomendasi Strategis

Perumusan rekomendasi strategis merupakan output/keluaran yang diharapkan dari hasil evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, sehingga dapat memberikan informasi, masukan dan saran perbaikan kepada Pemerintah dan *Stakeholders* terkait lainnya mengenai:

- a) Perlunya dorongan (*trigger*) yang kuat dan atraktif untuk pengembangan produk ekspor non migas yang bernilai tambah maupun pengembangan pasar ekspor untuk meningkatnya ekspor nasional.
- b) Perlunya kejelasan dan ketegasan kebijakan/regulasi dan iklim birokrasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan pengembangan ekspor nasional.
- c) Pemberdayaan UMKM sebagai bagian integral program pengembangan ekspor nasional dengan pemberian dukungan dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peran dan potensi UMKM.

F. Organisasi Pelaksanaan Evaluasi

Pengorganisasian Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional dilaksanakan oleh Kedepuitan teknis dan Perwakilan BPKP selaku Tim Evaluasi (Tim *Assurance*), serta dikoordinasikan oleh Tim Teknis Lintas Sektor - *State Accountability Revitalisation* (STAR) BPKP sekaligus selaku Tim *Quality Assurance*, sebagai berikut:

1. Tim Teknis Lintas Sektor - STAR BPKP selaku Koordinator (Tim *Quality Assurance*), antara lain bertanggung jawab:
 - a) Menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Terms of Reference* (TOR) dan pedoman evaluasi.
 - b) Melaksanakan koordinasi dan *Focused Group Discussion* (FGD) dengan pihak-pihak terkait di pusat.

- c) Memantau dan mengendalikan proses pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Kedepuitan teknis dan Perwakilan BPKP, termasuk memberikan arahan dan solusi atas kendala-kendala di lapangan (*field assurance*).
- d) Melaksanakan asistensi dan *quality assurance* terhadap proses penyusunan Laporan Hasil Evaluasi oleh Tim Evaluasi.
- e) Menyusun laporan kompilasi dan konsolidasi hasil evaluasi untuk disampaikan kepada Pemerintah dan *Stakeholders* terkait.

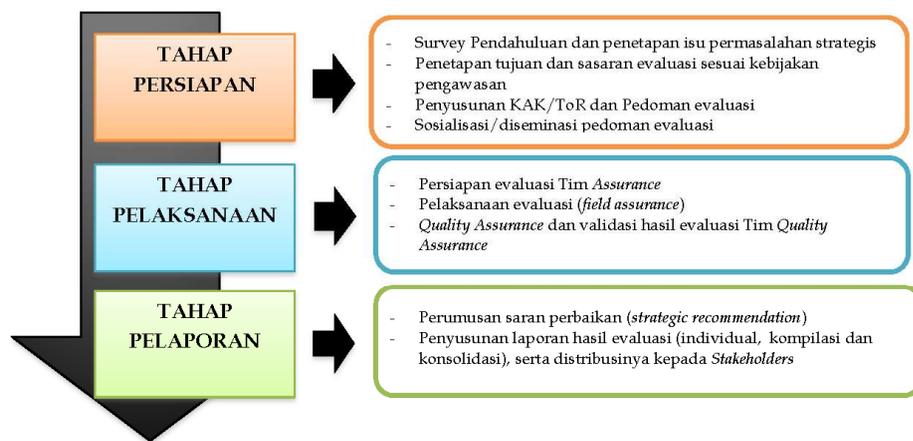
2. Kedepuitan teknis dan Perwakilan BPKP selaku Tim Evaluasi (*Tim Assurance*), antara lain bertanggung jawab:

- a) Melaksanakan Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional mengacu pada pedoman evaluasi yang ditetapkan.
- b) Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah.
- c) Mendokumentasikan seluruh proses kegiatan evaluasi.
- d) Menyusun laporan individual atas hasil evaluasi untuk disampaikan kepada *Stakeholders* terkait dan ditembuskan kepada Tim Teknis Lintas Sektor - STAR BPKP untuk dilakukan kompilasi dan konsolidasinya.

G. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Gambar 3.2.
Tahapan Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional



Dari gambar 3.2. di atas, dapat dijelaskan tahapan Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan serangkaian kegiatan persiapan evaluasi oleh Tim Teknis Lintas Sektor STAR BPKP selaku Koordinator (Tim *Quality Assurance*), yang meliputi:

a. Survei pendahuluan dan penetapan isu permasalahan strategis

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi awal serta pemahaman inisial terkait dengan program pengembangan ekspor nasional melalui kajian dan *Focused Discussion Group* (FGD) dengan *stakeholders* terkait sehingga peta permasalahan strategis sebagai fondasi utama kegiatan pengawasan dapat dirumuskan.

b. Penetapan tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan pengawasan serta penyusunan program kerja pengawasan.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan dan penetapan isu permasalahan strategis, selanjutnya akan dilakukan korelasi dengan kebijakan pengawasan BPKP untuk menyusun kerangka acuan kerja (KAK) dan pedoman evaluasi.

c. Penyusunan pedoman evaluasi

Output utama dari tahapan persiapan ini adalah pedoman evaluasi yang disusun sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, baik oleh Kedeputian teknis maupun Perwakilan BPKP.

d. Sosialisasi/diseminasi pedoman evaluasi

Sosialisasi dan diseminasi pedoman diperlukan untuk memperoleh pemahaman persepsi maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta langkah kerja Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional guna tercapainya standar kualitas yang diharapkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini dilakukan serangkaian kegiatan pelaksanaan evaluasi, baik oleh Kedeputian teknis dan Perwakilan BPKP selaku Tim *Assurance* maupun Tim Teknis Lintas Sektor STAR BPKP selaku Koordinator (Tim *Quality Assurance*), sebagai berikut:

a. Kedeputian Teknis dan Perwakilan BPKP

Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kedeputian teknis dan Perwakilan BPKP selaku Tim *Assurance*, meliputi:

1) Persiapan evaluasi Tim *Assurance*

Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, direncanakan pelaksanaannya selama 25 hari kerja (persiapan, pelaksanaan dan pelaporan), dengan komposisi tim terdiri dari; 1 orang Koordinator, 1 orang Pengendali Teknis, 1 orang Ketua Tim, dan 2 – 3 orang Anggota Tim. Dalam hal ini, diharapkan untuk Perwakilan BPKP dapat menyertakan 1 orang pegawai/auditor Inspektorat Provinsi sebagai Anggota Tim.

2) Pelaksanaan evaluasi (*field assurance*)

Dalam pelaksanaan evaluasi, diawali dengan pembicaraan pendahuluan kepada pihak-pihak terkait dengan Program Pengembangan Ekspor Nasional mengenai latar belakang serta maksud dan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Selanjutnya, Tim *Assurance* melaksanakan pengumpulan data dan informasi, analisis dan evaluasi data dan informasi dapat diperoleh melalui; reviu dokumen, wawancara, kuesioner, observasi maupun *Focused Group Discussion (FGD/Workshop)* yang melibatkan narasumber yang kompeten, sesuai dengan rencana program kerja evaluasi.

Tim *Assurance* diharapkan dapat melaksanakan evaluasi secara cermat, sesuai dengan maksud dan tujuan, sasaran dan ruang lingkup, serta langkah-langkah kerja yang telah ditetapkan dalam pedoman evaluasi, sehingga diperoleh simpulan hasil evaluasi yang memadai sebagai dasar perumusan rekomendasi strategis sebagai output/keluaran hasil evaluasi yang diharapkan.

b. Tim Teknis Lintas Sektor STAR BPKP

Dalam pelaksanaan evaluasi, Tim Teknis Lintas Sektor STAR BPKP selaku Koordinator sekaligus Tim *Quality Assurance* melaksanakan kegiatan *quality assurance* terhadap pelaksanaan Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, untuk memastikan bahwa proses *assurance* yang dilaksanakan oleh Tim *Assurance*, baik Kedeputian teknis maupun Perwakilan BPKP telah sesuai pedoman. Di samping itu, Tim *Quality Assurance* juga memantau *progress* kemajuan pelaksanaan *assurance* dan membahas berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi Tim *Assurance* di lapangan, termasuk memberikan arahan dan solusi yang relevan.

3. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan akhir dari tahap evaluasi, di mana hasil evaluasi beserta rekomendasi strategis yang dirumuskan telah dilakukan pembahasan dan klarifikasinya kepada *Stakeholders* terkait. Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, Kedeputusan teknis dan Perwakilan BPKP selaku Tim *Assurance* berkewajiban menyusun laporan individual hasil Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, untuk selanjutnya laporan disampaikan kepada *Stakeholders* terkait (*hardcopy*) dan Tim Teknis Lintas Sektor STAR BPKP (*hardcopy* dan *softcopy*), sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Selanjutnya, Tim Teknis Lintas Sektor STAR BPKP selaku Koordinator (Tim *Quality Assurance*) berkewajiban menyusun laporan kompilasi dan konsolidasi hasil laporan Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, yang memuat permasalahan-permasalahan beserta rekomendasi strategis untuk disampaikan/dilaporkan kepada Pemerintah dan *Stakeholders* terkait lainnya. Dalam hal ini, untuk memperoleh rumusan permasalahan dan rekomendasi strategis, direncanakan dilaksanakannya *workshop* atau *Focused Group Discussion* (FGD) dengan mengundang pihak Perwakilan BPKP untuk validasinya dan pihak-pihak terkait lainnya sebagai narasumber yang kompeten, obyektif, dan independen.

H. Rencana dan Jadwal Evaluasi

Untuk memastikan kelancaran terlaksananya kegiatan Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, maka disusun rencana dan jadwal evaluasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Rencana dan Jadwal Evaluasi atas
Program Pengembangan Ekspor Nasional

Uraian Kegiatan	Jadwal Rencana
1. Tahap Persiapan, yaitu proses penyusunan KAK/ToR dan pedoman evaluasi oleh Tim <i>Quality Assurance</i>:	
a. Pengumpulan data dan informasi awal (<i>browsing internet</i> , telaah database profil pemda)	: April 2016
b. Penyusunan KAK/ToR evaluasi	: Mei 2016
c. Penyusunan <i>draft</i> pedoman evaluasi	: Mei – Juni 2016
d. <i>Pilotting</i> atas <i>draft</i> pedoman evaluasi	: Juli – Agustus 2016
e. Finalisasi pedoman evaluasi dan sosialisasinya	: Agustus – September 2016
2. Tahap Pelaksanaan, yaitu proses evaluasi oleh Tim <i>Assurance</i>:	
a. Persiapan dan pelaksanaan evaluasi oleh Tim <i>Assurance</i>	: PM

Uraian Kegiatan	Jadwal Rencana
b. Pelaksanaan <i>quality assurance</i> oleh Tim <i>Quality Assurance</i>	: PM
c. Penyusunan laporan individual hasil evaluasi	: PM
3. Tahap Pelaporan, yaitu proses pelaporan hasil evaluasi:	
a. Penyusunan <i>draft</i> kompilasi dan konsolidasi hasil evaluasi	: PM
b. FGD atas <i>draft</i> kompilasi dan konsolidasi hasil evaluasi	: PM
c. Finalisasi laporan kompilasi dan konsolidasi hasil evaluasi	: PM

Rencana dan jadwal evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional secara rinci untuk setiap tahunnya, ditetapkan oleh Deputi Kepala BPKP terkait.

I. Anggaran Biaya Evaluasi

Anggaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional untuk tahun 2016 dibebankan pada DIPA STAR BPKP, sedangkan untuk tahun anggaran berikutnya menggunakan beban biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
DESAIN PROGRAM KERJA DAN PELAPORAN EVALUASI ATAS
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

A. Program Kerja Evaluasi

Program kerja evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional menggambarkan desain langkah-langkah kerja yang harus dilakukan oleh Tim Assurance pada saat pelaksanaan proses evaluasi. Program kerja evaluasi yang disajikan dalam pedoman ini mencakup langkah kerja/prosedur sesuai desain kerangka evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, sebagai acuan minimal yang dapat dikembangkan oleh Tim Assurance sesuai dengan kondisi pelaksanaan evaluasi di lapangan (*field assurance*). Program kerja evaluasi ini dimaksudkan untuk mendukung perolehan bukti yang relevan, cukup, dan kompeten dalam mendukung simpulan hasil evaluasi dan rekomendasi strategis.

1. Evaluasi atas Kebijakan Pengembangan Ekspor Nasional

Evaluasi atas kebijakan pengembangan ekspor nasional bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis keberadaan dan kejelasan (harmonisasi) kebijakan/prosedur formal yang bersifat (lebih) operasional untuk mendorong pengembangan ekspor non migas yang bernilai tambah, khususnya bagi pelaku ekspor UKM/IKM dalam rangka mendukung upaya pengembangan ekspor nasional. Dalam evaluasi atas kebijakan ini, diharapkan Tim Assurance dapat mengevaluasi dan menguji sekurang-kurangnya 4 TEO yang telah diidentifikasi, dengan langkah kerja/prosedur sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Program Kerja Evaluasi atas Kebijakan Pengembangan Ekspor Nasional

a. Kebijakan Pengembangan Produk Ekspor			
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:
Uraian		Keterangan	
TEO#1a: Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang menetapkan jenis-jenis produk unggulan daerah (a.l. klastering produk pertanian, kehutanan, industri, pertambangan, dll), sesuai karakteristik potensi daerah, sebagai acuan pengembangan produk ekspor (termasuk diversifikasi produk ekspor)		Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan	
TEO#1b: Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai insentif permodalan produksi dan/atau bantuan teknis proses produksi,		Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan	

a. Kebijakan Pengembangan Produk Ekspor			
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:
Uraian		Keterangan	
khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan produk ekspor non migas			
<p>TEO#1c: Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai standarisasi kualitas produk ekspor (termasuk desain branding/ packaging dan pengurusan HKI), khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan produk ekspor non migas</p>		<p>Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan</p>	
<p>a. Tujuan Evaluasi (terkait TEO #1a, #1b, #1c):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Untuk memastikan/menyakinkan keberadaan kebijakan/ regulasi formal (yang bersifat lebih operasional ~ juklak/juknis/prosedur) atas pengembangan produk ekspor, khususnya untuk dapat mendorong UKM/IKM dalam pengembangan produk ekspor, a.l. mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - Klastering produk unggulan daerah (#1a) - Insentif permodalan produksi dan bantuan teknis proses produksi (#1b) - Standardisasi kualitas produk ekspor (termasuk desain branding/packaging dan pengurusan HKI ~ #1c) 			
<p>b. Langkah Kerja (terkait TEO #1a, #1b, #1c):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan/regulasi ttg klastering produk unggulan daerah - Kebijakan/regulasi ttg insentif permodalan produksi dan bantuan teknis proses produksi - Kebijakan/regulasi ttg standarisasi kualitas produk ekspor (termasuk desain branding/packaging dan pengurusan HKI) - Laporan kegiatan/Laporan kemajuan atas program/kegiatan pengembangan produk ekspor yang telah dilaksanakan (jika ada) (jika ada) 2) > Jika kebijakan/regulasi dimaksud tidak ada, maka; <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan identifikasi penyebabnya - Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya terhadap upaya pengembangan produk ekspor nasional/daerah, khususnya dalam rangka mendorong pengembangan ekspor non migas oleh UKM/IKM > Jika kebijakan/regulasi dimaksud ada, maka: <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan telaah atas kebijakan/regulasi dimaksud untuk mengetahui substansi kebijakan/regulasi terkait pengembangan produk ekspor - Lakukan evaluasi atas kebijakan/regulasi dimaksud apakah secara substansi telah mengatur secara jelas upaya peningkatan/pengembangan produk ekspor, khususnya bagi UKM/IKM 			

a. Kebijakan Pengembangan Produk Ekspor			
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:
Uraian		Keterangan	
3) Lakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas keberadaan kebijakan/regulasi dimaksud dan praktek implementasinya 4) Buat simpulan dan saran			
TEO#2: Adanya ketidakjelasan/ketidaksinkronan (disharmonisasi tumpang tindih) atas kebijakan/regulasi terkait pengembangan produk ekspor		Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan	
a. Tujuan Evaluasi: ➤ Untuk memastikan bahwa keberadaan kebijakan/regulasi formal dimaksud (jika ada) telah harmonis/sinkron, tidak tumpang tindih (jelas) dan dapat diimplementasikan secara memadai			
b. Langkah Kerja: 1) Dapatkan dokumen/data: - Kebijakan/regulasi ttg klustering produk unggulan daerah - Kebijakan/regulasi ttg insentif permodalan produksi dan bantuan teknis proses produksi - Kebijakan/regulasi ttg standardisasi kualitas produk ekspor (termasuk desain branding/packaging dan pengurusan HKI) - Kebijakan/regulasi lainnya terkait pengembangan produk ekspor 2) Lakukan telaah atas kebijakan/regulasi dimaksud untuk mengetahui substansi kebijakan/regulasi terkait pengembangan produk ekspor 3) Lakukan evaluasi atas harmonisasi/keselarasan antar kebijakan/regulasi terkait pengembangan produk ekspor. Identifikasi kebijakan/regulasi yang dalam prakteknya dapat menghambat pengembangan produk ekspor, khususnya bagi UKM/IKM 4) Lakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas harmonisasi/keselarasan antar kebijakan/regulasi beserta permasalahannya 5) Buat simpulan dan saran			

b. Kebijakan Pengembangan Pasar Ekspor			
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:
Uraian		Keterangan	
TEO#3a: Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai kemudahan investasi/berusaha dan perijinan ekspor, khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan produk ekspor non migas		Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan	
TEO#3b: Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai mekanisme/tatacara pembinaan dan pemberdayaan UKM/IKM yang		Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan	

b. Kebijakan Pengembangan Pasar Ekspor			
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:
Uraian		Keterangan	
berorientasi ekspor untuk pengembangan ekspor nasional/daerah			
<p>TEO#3c: Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai proses/mechanisme kegiatan diseminasi dan pemanfaatan informasi pasar ekspor (market intelligence/ market brief), khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan pasar ekspor</p>		<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan 	
<p>TEO#3d: Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai proses/mechanisme kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan pasar ekspor</p>		<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan 	
<p>TEO#3e: Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai proses/mechanisme kegiatan fasilitasi kerjasama UKM/IKM yang berorientasi ekspor dengan usaha besar, Kadin, lembaga pendidikan/penelitian, dan asosiasi industri/profesi</p>		<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan 	
<p>a. Tujuan Evaluasi (terkait TEO #3a, #3b, #3c, #3d, #3e):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Untuk memastikan/meyakinkan keberadaan kebijakan/regulasi/prosedural formal (yang bersifat lebih operasional ~ juklak/juknis/prosedur) atas pengembangan pasar ekspor, khususnya untuk dapat mendorong UKM/IKM dalam pengembangan pasar ekspor, a.l. mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan berusaha dan perijinan ekspor (#3a) - Mekanisme/tatacara pembinaan dan pemberdayaan UKM/IKM yang berorientasi ekspor (#3b) - Mekanisme/tatacara kegiatan desiminasi dan pemanfaatan informasi pasar ekspor (market intelligence/brief ~ #3c) - Mekanisme/tatacara kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor (#3d) - Mekanisme/tatacara fasilitasi kerjasama UKM/IKM dengan usaha besar dan kelembagaan ekspor lainnya (#3e) 			
<p>b. Langkah Kerja (terkait TEO #3a, #3b, #3c, #3d, #3e):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan/regulasi ttg kemudahan berusaha dan perijinan ekspor - Kebijakan/regulasi/prosedur ttg mekanisme/tatacara pembinaan dan pemberdayaan UKM/IKM - Kebijakan/regulasi/prosedur ttg mekanisme/tatacara desiminasi dan pemanfaatan informasi pasar ekspor (market intelligence/ market brief) - Kebijakan/regulasi/prosedur ttg mekanisme pameran dagang dan promosi ekspor - Kebijakan/regulasi/prosedur mekanisme fasilitasi kerjasama UKM/IKM dengan usaha besar dan kelembagaan ekspor lainnya 			

b. Kebijakan Pengembangan Pasar Ekspor	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kegiatan/Laporan kemajuan atas program/kegiatan pengembangan pasar ekspor yang telah dilaksanakan (jika ada) 2) > Jika kebijakan/regulasi dimaksud tidak ada, maka; <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan identifikasi penyebabnya - Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya terhadap upaya pengembangan pasar ekspor nasional/daerah (termasuk fasilitas kemudahan berusaha dan proses perijinan ekspor), khususnya dalam rangka mendorong pengembangan ekspor non migas oleh UKM/IKM > Jika kebijakan/regulasi dimaksud ada, maka: <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan telaah atas kebijakan/regulasi dimaksud untuk mengetahui substansi kebijakan/regulasi terkait pengembangan pasar ekspor - Lakukan evaluasi atas kebijakan/regulasi dimaksud apakah secara substansi telah mengatur secara jelas upaya peningkatan/pengembangan pasar ekspor (termasuk fasilitas kemudahan berusaha dan proses perijinan ekspor), khususnya dalam rangka mendorong pengembangan ekspor non migas oleh UKM/IKM 3) Lakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas keberadaan kebijakan/regulasi dimaksud dan praktek implementasinya 4) Buat simpulan dan saran 	
TEO#4: Adanya ketidakjelasan/ketidaksinkronan (disharmonisasi tumpang tindih) atas kebijakan/regulasi terkait pengembangan pasar ekspor	Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan
a. Tujuan Evaluasi: > Untuk memastikan bahwa keberadaan kebijakan/regulasi/prosedural formal dimaksud (jika ada), telah harmonis/sinkron, tidak tumpang tindih (jelas) dan dapat diimplementasikan secara memadai	
b. Langkah Kerja: 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan/regulasi ttg kemudahan berusaha dan perijinan ekspor - Kebijakan/regulasi/prosedur ttg mekanisme/tatacara pembinaan dan pemberdayaan UKM/IKM - Kebijakan/regulasi/prosedur ttg mekanisme/tatacara desiminasi dan pemanfaatan informasi pasar ekspor (market intelligence/market brief) 	

b. Kebijakan Pengembangan Pasar Ekspor			
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:
Uraian		Keterangan	
<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan/regulasi/prosedur ttg mekanisme pameran dagang dan promosi ekspor - Kebijakan/regulasi/prosedur mekanisme fasilitasi kerjasama UKM/IKM dengan usaha besar dan kelembagaan ekspor lainnya - Kebijakan/regulasi lainnya terkait pengembangan pasar ekspor <p>2) Lakukan telaah atas kebijakan/regulasi dimaksud untuk mengetahui substansi kebijakan/regulasi terkait pengembangan pasar ekspor</p> <p>3) Lakukan evaluasi atas harmonisasi/keselarasan antar kebijakan/regulasi terkait pengembangan pasar ekspor. Identifikasi kebijakan/regulasi yang dalam prakteknya dapat menghambat pengembangan pasar ekspor, khususnya bagi UKM/IKM</p> <p>4) Lakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atas harmonisasi/keselarasan antar kebijakan/regulasi beserta permasalahannya</p> <p>5) Buat simpulan dan saran</p>			

2. Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekspor Nasional

Evaluasi atas implementasi kebijakan pengembangan ekspor nasional bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis keberadaan dan peran kelembagaan ekspor serta pengelolaan program/kegiatan pengembangan ekspor (perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi) dalam upaya optimalisasi dan peningkatan ekspor nasional. Dalam evaluasi atas implementasi kebijakan ini, diharapkan Tim Assurance dapat mengevaluasi dan menguji sekurang-kurangnya ... TEO yang telah diidentifikasi, dengan langkah kerja/prosedur sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Program Kerja Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekspor Nasional

a. Efektivitas Kelembagaan Pengembangan Ekspor			
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:
Uraian		Keterangan	
<p>TEO#5a: Belum adanya penetapan kelembagaan ekspor secara jelas yang bertanggung jawab dalam sinkronisasi dan efektivitas koordinasi program/kegiatan pengembangan ekspor nasional secara terintegrasi, baik di</p>		<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan 	

a. Efektivitas Kelembagaan Pengembangan Ekspor	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
tingkap pemerintah pusat/daerah	
<p>a. Tujuan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Untuk memastikan/meyakinkan adanya kebijakan/regulasi ttg penetapan kelembagaan ekspor sebagai koordinator program/kegiatan pengembangan ekspor nasional (yang bersifat lintas sektoral) secara terintegrasi ➢ Untuk memastikan/meyakinkan adanya kejelasan pola hubungan dan tata kelola program/kegiatan pengembangan ekspor nasional, baik di tingkat pusat/daerah 	
<p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan/regulasi ttg penetapan kelembagaan ekspor - Struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawabnya (<i>job description</i>) - Laporan kegiatan koordinasi pengembangan ekspor (jika ada) 2) > Jika dokumen/data dimaksud tidak ada, maka; <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan identifikasi penyebabnya - Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya terhadap upaya sinkronisasi dan efektivitas koordinasi program/kegiatan pengembangan produk ekspor nasional/daerah, khususnya dalam rangka mendorong pengembangan ekspor non migas oleh UKM/IKM > Jika dokumen/data dimaksud ada, maka; <ul style="list-style-type: none"> - Telaah keberadaan dokumen/data dimaksud untuk mengetahui keberadaan pihak-pihak terkait kelembagaan ekspor dan perannya - Lakukan evaluasi atas kejelasan pola hubungan dan tata kelola program/kegiatan pengembangan ekspor nasional 3) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak terkait atas keberadaan kelembagaan ekspor dan perannya 4) Buat simpulan dan saran 	
<p>TEO#5b: Kelembagaan dan pengelolaan program/kegiatan terkait pengembangan ekspor nasional masih bersifat sektoral/ parsial di masing-masing entitas (satker/unit satker), sehingga berisiko terhadap efektivitas tujuan program/kegiatan secara optimal</p>	<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan
<p>a. Tujuan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Untuk memastikan/meyakinkan adanya koordinasi dan sinergi atas implementasi program/kegiatan pengembangan ekspor oleh masing-masing entitas terkait (tidak parsial oleh masing-masing entitas) 	

a. Efektivitas Kelembagaan Pengembangan Ekspor	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
<p>➤ Untuk memastikan/meyakinkan tidak adanya tumpang tindih program/kegiatan pengembangan ekspor di masing-masing entitas terkait</p>	
<p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - RPJMN 2015-2019, RKP 2015-2016 - RKA KL/SKPD 2015-2016 - SOTK masing-masing entitas terkait - Laporan kegiatan (Lakip) masing-masing entitas terkait 2) Lakukan mapping dokumen/data dimaksud, dan identifikasi adanya tumpang tindih program/kegiatan pengembangan ekspor oleh masing-masing entitas terkait 3) Lakukan evaluasi adanya koordinasi dan sinergi atas implementasi program/kegiatan pengembangan ekspor (yang bersifat lintas sektoral) 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak terkait atas implementasi program/kegiatan pengembangan ekspor 5) Buat simpulan dan saran 	
<p>TEO#6a: Kementerian teknis terkait (perdagangan, perindustrian, UMKM, dll.) belum melaksanakan program/kegiatan terkait pengembangan ekspor nasional secara optimal sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya</p>	<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian
<p>a. Tujuan Evaluasi:</p> <p>Untuk memastikan/meyakinkan bahwa kementerian teknis terkait (perdagangan, perindustrian, UMKM) telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terkait program/kegiatan pengembangan ekspor secara optimal</p>	
<p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) Kementerian teknis terkait - Renstra, RKA KL 2015-2016 masing-masing entitas - Laporan kegiatan/kinerja masing-masing entitas 2) Telaah keberadaan dokumen/data dimaksud untuk mengetahui peran masing-masing entitas terkait pengembangan ekspor nasional, beserta rencana sasaran/target dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan 3) Lakukan evaluasi atas capaian kinerja masing-masing entitas untuk mengetahui efektivitas kerjanya sesuai tugas pokok dan fungsi maupun rencana sasaran/targetnya. 	

a. Efektivitas Kelembagaan Pengembangan Ekspor			
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:
Uraian		Keterangan	
4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai efektivitas capaian kinerja masing-masing entitas beserta permasalahan yang ada 5) Buat simpulan dan saran			
<p>TEO#6b: Tim Teknis Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Pusat/Daerah ~ PEPI/PEPIDA) yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan peningkatan ekspor dan investasi belum dibentuk/ditetapkan, atau</p> <p>Tim PEPI/PEPIDA telah dibentuk namun belum berperan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terkait pengembangan ekspor nasional</p>		<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan 	
<p>a. Tujuan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Untuk memastikan/meyakinkan adanya Tim Teknis Peningkatan Ekspor/Investasi sebagai salah satu lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam pengembangan ekspor ➢ Untuk memastikan/meyakinkan bahwa Tim Teknis telah melaksanakan tanggung jawabnya (peran) secara memadai 			
<p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - SK pembentukan Tim Teknis beserta tanggung jawabnya (peran) - Struktur organisasi dan jumlah personalia - Laporan kegiatan peningkatan ekspor 2) > Jika Tim Teknis PEPI/DA dimaksud belum ada, maka; <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan identifikasi penyebabnya - Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya terhadap upaya pengembangan ekspor nasional/daerah (sesuai peran, tugas, dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan/regulasi yang ada), khususnya dalam rangka mendorong pengembangan ekspor non migas oleh UKM/IKM <p>> Jika Tim Teknis PEPI/DA dimaksud ada, maka;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telaah keberadaan dokumen/data dimaksud untuk mengetahui tanggung jawab Tim Teknis dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan, telah sesuai/menagacu pada peraturan/regulasi yang ada 3) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait mengenai keberadaan Tim Teknis dan efektivitasnya dalam upaya pengembangan ekspor 4) Buat simpulan dan saran 			

a. Efektivitas Kelembagaan Pengembangan Ekspor			
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:
Uraian		Keterangan	
TEO#7: Pemerintah daerah (provinsi, kab/kota) tidak menetapkan program/kegiatan pengembangan ekspor sesuai karakteristik/ potensi daerahnya (sebagai urusan pilihan daerah) dalam rangka mendukung program pengembangan ekspor nasional (prioritas nasional)			
a. Tujuan Evaluasi: Untuk memastikan/meyakinkan bahwa Pemda menetapkan program/kegiatan pengembangan ekspor sesuai karakteristik/ potensi daerahnya (urusan pilihan daerah), sebagai salah satu indikator kinerja pemerintah			
b. Langkah Kerja: 1) Dapatkan dokumen/data: - RPJMD dan Renstra SKPD - KUA dan PPAS, atau kebijakan formal lainnya - Profil karakteristik/potensi daerah 2) Telaah dokumen/data dimaksud untuk mengetahui profil karakteristik/potensi daerah dan keberadaan program/kegiatan terkait pengembangan ekspor 3) Lakukan evaluasi atas keberadaan program/kegiatan pengembangan ekspor dikaitkan dengan profil karakteristik/ potensi daerah (untuk memastikan bahwa daerah yang memiliki potensi ekspor telah menetapkan program/kegiatan terkait pengembangan ekspor). Jika tidak ditetapkan program/kegiatan pengembangan ekspor, identifikasi penyebab permasalahannya beserta dampak terhadap upaya pengembangan ekspor nasional/daerah 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai keberadaan program/kegiatan pengembangan ekspor beserta permasalahan yang ada 5) Buat simpulan dan saran			

b. Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan			
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:
Uraian		Keterangan	
TEO#8: Belum ditetapkannya Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional/Daerah (RIPIN/D) maupun Kebijakan Industri Nasional (KIN) sebagai perencanaan strategis pemerintah dalam pengembangan industri		Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan	
a. Tujuan Evaluasi: Untuk memastikan/meyakinkan bahwa pemerintah telah menetapkan perencanaan strategis (RIPIN/D) sebagai dasar/acuan perencanaan			

b. Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
pembangunan industri nasional/daerah (termasuk UKM/IKM) secara berkelanjutan dalam rangka mendukung upaya pengembangan ekspor nasional/daerah	
<p>b. Langkah Kerja:</p> <p>1) Dapatkan dokumen/data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RIPIN/D 2015-2035 (jika ada, sesuai amanat PP 14/2015) - RIPIN/D atau Renstra periode sebelumnya (jika ada) - Renstra KL/SKPD <p>2) > Jika dokumen RIPIN/D dimaksud tidak ada, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan identifikasi penyebabnya - Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya terhadap upaya pengembangan industrialisasi di daerah dalam rangka mendukung upaya pengembangan ekspor nasional/daerah, khususnya oleh UKM/IKM <p>> Jika dokumen RIPIN/D dimaksud ada, maka;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telaah keberadaan dokumen/data dimaksud untuk mengetahui adanya perencanaan jangka menengah/jangka panjang atas pembangunan industri nasional/daerah - Lakukan evaluasi apakah RIPIN/D memuat perencanaan pembangunan industri nasional/daerah secara berkelanjutan <p>3) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai adanya perencanaan pembangunan industri nasional/daerah (termasuk UKM/IKM) secara berkelanjutan dalam upaya mendukung pengembangan ekspor nasional/daerah</p> <p>4) Buat simpulan dan saran</p>	
<p>TEO#9a: Program/kegiatan terkait pengembangan ekspor (yang tertuang dalam RKA KL/SKPD, RKPD/APBD) belum sepenuhnya sinkron dan selaras dengan program/kegiatan prioritas nasional (RPJMN/RKP), baik secara nomenklatur maupun substansi target output/outcome, atau Kementerian teknis maupun pemda tidak mengakomodasi sebagian besar program/kegiatan prioritas pengembangan ekspor nasional yang tertuang dalam RPJMN/RKP (~ misal, hanya fokus dg kegiatan promosi/pameran dg anggaran yang terbatas)</p>	<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan
<p>a. Tujuan Evaluasi:</p> <p>Untuk memastikan/meyakinkan bahwa program/kegiatan pengembangan ekspor (RKA KL/SKPD, RKPD/APBD) telah sinkron dan selaras dengan program/kegiatan prioritas nasional (RKP/ RPJMN), baik secara nomenklatur maupun substansi sasaran output/outcome</p>	

b. Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
<p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016 - RKA KL/SKPD, RKPD/APBD tahun 2015, 2016 2) Mapping dan bandingkan program/kegiatan pengembangan ekspor prioritas nasional (RPJMN/ RKP) dengan program/ kegiatan Kementerian maupun Pemda (RKA KL/SKPD, RKPD/APBD) 3) Telaah dan identifikasi apakah program/kegiatan prioritas nasional (RPJMN/RKP) telah diakomodir dalam perencanaan/penganggaran Kementerian maupun Pemda (RKA KL/SKPD, RKPD/APBD), baik secara nomenklatur maupun substansi sasaran/target output/outcome; <ul style="list-style-type: none"> > <u>Sinkron/selaras secara langsung:</u> Indikator kinerja RKA KL/Pemda terkait langsung dengan program/kegiatan yang ada di RPJMN/RKP, baik secara nomenklatur, maupun target/volume kegiatan > <u>Sinkron/selaras secara tidak langsung:</u> Indikator kinerja RKA KL/Pemda tidak terkait langsung secara nomenklatur, tetapi secara substansi terkait dengan output program/kegiatan yang ada di RPJMN/RKP > <u>Tidak sinkron/selaras:</u> Indikator kinerja yang ada di RPJMN/RKP tidak terkait sama sekali/tidak dapat/sulit iterjemahkan dengan output kegiatan yang ada dalam RKA KL maupun Pemda, baik nomenklatur maupun substansi. 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait atas sinkronisasi dan keselarasan program/kegiatan prioritas pengembangan ekspor 5) Buat simpulan dan saran. 	
<p>TEO#9b: Penetapan target/sasaran output/outcome program/kegiatan pengembangan ekspor (yang tertuang dalam RKA KL/SKPD, RKPD/APBD) belum sepenuhnya didukung sumber data yang jelas/akurat</p>	<p>Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan</p>
<p>a. Tujuan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Untuk memastikan/meyakinkan bahwa target/sasaran output/outcome program/kegiatan pengembangan ekspor yang ditetapkan, baik oleh Kementerian teknis maupun pemda telah berdasarkan pertimbangan/sumber data yang jelas dan akurat. ➢ Untuk memastikan/meyakinkan bahwa terdapat rincian (<i>breakdown</i>) atas target/sasaran output/outcome dalam RPJMN/RKP 	

b. Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
<p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - RKP/ APBD dan RKA KL/SKPD tahun 2015, 2016 - Renstra KL/SKPD - Data pendukung indikator kinerja/target tahun 2015, 2016 - Rincian (breakdown) atas target/sasaran output/outcome dalam RPJMN/RKP (jika ada) 2) Mapping dan identifikasi indikator target/sasaran kinerja atas program/kegiatan pengembangan ekspor (RKA KL/SKPD, RKP/ APBD) dengan sumber data dasar penetapan indikator kinerja beserta target/sasarannya 3) Lakukan telaah dan evaluasi: <ul style="list-style-type: none"> - Apakah indikator kinerja output/outcome, baik kuantitatif maupun kualitatif, telah menggambarkan tingkat capaian kinerja Kementerian maupun Pemda - Apakah sumber data sebagai dasar penetapan target/sasaran program/kegiatan Kementerian maupun Pemda akurat/valid 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai indikator kinerja beserta target/sasaran output/outcome atas program/kegiatan 5) Buat simpulan dan saran 	
<p>TEO#10: Belum adanya/belum memadainya sistem informasi (database) yang akurat/jelas dan terintegrasi terkait data/informasi pengembangan ekspor nasional, baik di tingkat pusat/daerah</p>	<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan
<p>a. Tujuan Evaluasi:</p> <p>Untuk memastikan/meyakinkan adanya sistem informasi (database) terkait data/informasi pengembangan ekspor nasional, a.l. berupa; produk ekspor, pelaku ekspor (UKM/Non UKM), pasar ekspor, baik di tingkat pusat/daerah, berdasarkan hasil kajian/survey sebagai dasar/acuan perencanaan pengembangan ekspor berkelanjutan</p>	
<p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - Database/aplikasi terkait ekspor, yang a.l. memuat informasi: jenis produk ekspor non migas, pelaku ekspor non migas (UMK/IKM maupun Non UKM/IKM), tujuan pasar ekspor non migas, dan lainnya - Laporan kegiatan ekspor (profil ekspor) 	

b. Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan			
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:
Uraian		Keterangan	
<p>2) > Jika dokumen database/aplikasi dimaksud tidak ada, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan identifikasi penyebabnya - Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekspor nasional/daerah <p>> Jika dokumen database/aplikasi dimaksud ada, maka;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telaah dan evaluasi keberadaan dokumen/data tersebut untuk mengetahui dan memastikan kecukupan database ekspor yang akurat sebagai dasar perencanaan program/kegiatan <p>3) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai keberadaan database ekspor yang akurat beserta kendala/permasalahan yang ada</p> <p>4) Buat simpulan dan saran</p>			

c. Pelaksanaan Program/Kegiatan			
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:
Uraian		Keterangan	
<p>TEO#11: Capaian pertumbuhan barang ekspor non migas (berupa a.l. pertanian, kehutanan, industri, dll), khususnya produk ekspor dari UMKM belum optimal sesuai target yang ditetapkan, baik secara nasional/daerah</p>		<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan 	
<p>a. Tujuan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan barang ekspor non migas (berupa a.l. pertanian, kehutanan, industri, dll), khususnya produk ekspor UKM/IKM secara optimal (sesuai target yang telah ditetapkan ~ Ref. Target RPJMN/RKP, RKA KL/SKPD 2015, 2016) ➢ Untuk mengetahui kondisi perkembangan pertumbuhan barang ekspor non migas, khususnya produk ekspor UKM/ IKM beserta identifikasi permasalahannya 		<p>Ref.: Kegiatan Pengembangan Produk Ekspor</p>	
<p>b. Langkah Kerja:</p> <p>1) Dapatkan dokumen/data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016 - RKA KL/SKPD, RKP/APBD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait perkembangan barang/produk ekspor non migas (jika ada) - Dokumen/data terkait lainnyaTelaah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pertumbuhan ekspor non migas, khususnya produk ekspor UKM/IKM 			

c. Pelaksanaan Program/Kegiatan			
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:
Uraian		Keterangan	
2) Telaah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pertumbuhan ekspor non migas, khususnya produk ekspor UKM/IKM (Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan) 3) Lakukan evaluasi kondisi perkembangan pertumbuhan barang ekspor non migas, dan identifikasi keberhasilan/ permasalahan yang ada 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi perkembangan barang ekspor non migas 5) Buat simpulan dan saran			
TEO#12a: Belum adanya/belum optimalnya upaya standardisasi kualitas produk ekspor non migas guna mendorong peningkatan daya saing produk ekspor UKM/IKM di pasar ekspor		Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan	
TEO#12b: Pengelolaan produk ekspor non migas, berupa produk pertanian, kehutanan, dan industri belum optimal (belum adanya standardisasi produk)		Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan	
a. Tujuan Evaluasi (terkait TEO#12a, #12b): ➤ Untuk memastikan tercapainya target standardisasi produk ekspor non migas, termasuk produk pertanian, kehutanan, industri (sesuai target yang telah ditetapkan ~ Ref. Target RPJMN/RKP, RKA KL/SKPD 2015, 2016) ➤ Untuk mengetahui kondisi perkembangan upaya standardisasi kualitas produk ekspor, beserta identifikasi permasalahannya		Ref.: Kegiatan Pengembangan Produk Ekspor & Kegiatan Pengelolaan Ekspor Produk pertanian, Kehutanan dan Industri	
b. Langkah Kerja (terkait TEO#12a, #12b): 1) Dapatkan dokumen/data: - RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016 - RKA KL/SKPD, RKPD/APBD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait pengembangan produk ekspor non migas, yang a.l. memuat data kegiatan; standardisasi kualitas produk ekspor (jika ada) - Dokumen/data terkait lainnya 2) Telaah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target kegiatan standardisasi produk ekspor non migas (Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan)			

c. Pelaksanaan Program/Kegiatan	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
<p>3) Lakukan evaluasi kondisi atas kondisi kegiatan standardisasi produk ekspor non migas, dan identifikasi keberhasilan/ permasalahannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah produk ekspor yang ada sudah distandardisasi (baik terkait desain, kualitas, harga produk, dll) - Bagaimana upaya pemerintah dalam mendorong standardisasi produk ekspor non migas - ... dll ... <p>4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai capaian dan kondisi kegiatan standardisasi produk ekspor non migas, beserta permasalahannya</p> <p>5) Buat simpulan dan saran</p>	
<p>TEO#13: Kurangnya/belum optimalnya insentif permodalan/pembiayaan produksi maupun bantuan teknis produksi bagi UKM/IKM, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Lembaga Pembiayaan/Dunia Usaha</p>	<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan
<p>a. Tujuan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Untuk memastikan tercapainya target kegiatan insentif pembiayaan maupun bantuan teknis produksi (sesuai target yang telah ditetapkan ~ Ref. Target RPJMN/RKP, RKA KL/SKPD 2015, 2016) ➢ Untuk mengetahui kondisi perkembangan upaya pembiayaan insentif permodalan maupun bantuan teknis produksi, beserta identifikasi permasalahannya 	<p>Ref.:</p> <p>Kegiatan Pengembangan Produk Ekspor</p>
<p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016 - RKA KL/SKPD, RKPD/APBD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait pengembangan produk ekspor non migas, yang a.l. memuat data kegiatan; pemberian insentif pembiayaan maupun bantuan teknis produksi (jika ada) - Dokumen/data terkait lainnya 2) Telaah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target kegiatan pemberian insentif pembiayaan maupun bantuan teknis produksi (UKM/IKM) (Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan) 3) Lakukan evaluasi kondisi atas kondisi kegiatan pemberian insentif pembiayaan maupun bantuan teknis produksi (UKM/ IKM), dan identifikasi keberhasilan/ permasalahannya <ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat kegiatan insentif pembiayaan produksi maupun bantuan teknis dalam rangka mendorong produksi ekspor non 	

c. Pelaksanaan Program/Kegiatan	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
<p>migas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah kegiatan tsb telah memadai dan efektif mendorong pertumbuhan produk ekspor non migas - Bagaimana peran pemerintah, dll .. <p>4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai capaian dan kondisi kegiatan pemberian insentif pembiayaan maupun bantuan teknis produksi, beserta permasalahannya</p> <p>5) Buat simpulan dan saran</p>	
<p>TEO#14a: Kurangnya/belum optimalnya diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas dalam rangka meningkatkan daya saing (pertumbuhan) ekspor non migas (baik di Pasar Utama maupun Pasar Prospektif)</p>	<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan
<p>TEO#14b: Kurangnya/belum optimalnya diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas dalam rangka meningkatkan daya saing (pertumbuhan) ekspor non migas (baik di Pasar Utama maupun Pasar Prospektif)</p>	<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan
<p>a. Tujuan Evaluasi (terkait TEO#14a, #14b):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Untuk memastikan tercapainya target (jika ada); <ul style="list-style-type: none"> - pertumbuhan ekspor non migas produk utama dan prospektif - pertumbuhan ekspor non migas pasar utama dan prospektif - revitalisasi dan penumbuhan produk ekspor agroindustri ➢ Untuk mengetahui kondisi perkembangan kegiatan diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas (termasuk produk ekspor agro industri), beserta identifikasi permasalahannya 	<p>Ref:</p> <p>Kegiatan Pengembangan Produk Ekspor</p>
<p>b. Langkah Kerja (terkait TEO#14a, #14b):</p> <p>1) Dapatkan dokumen/data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016 - RKA KL/SKPD, RKPD/APBD tahun 2015, 2016 - Data perkembangan ekspor non migas atas produk/pasar utama/prospektif maupun pasar utama/prospektif - Laporan kegiatan/kinerja terkait pengembangan produk ekspor non migas, yang a.l. memuat data kegiatan; diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas, termasuk produk ekspor agro industri (produk hasil hutan, perkebunan, perikanan, dll) - Dokumen/data terkait lainnyaTelaah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pengembangan dan promosi citra ekspor <p>2) Telaah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target kegiatan diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas, termasuk produk agro</p>	

c. Pelaksanaan Program/Kegiatan	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
industri (Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan) 3) Lakukan evaluasi kondisi atas kondisi kegiatan diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas, dan identifikasi keberhasilan/ permasalahannya - Bagaimana keberadaan data produk utama/prospektif maupun pasar utama/prospektif terkait ekspor non migas - Bagaimana peran pemerintah dalam upaya diversifikasi produk ekspor maupun pasar ekspor - ... dll ... 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai capaian dan kondisi kegiatan diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas, beserta permasalahannya 5) Buat simpulan dan saran	
TEO#15a: Jumlah dan kualitas pelatihan ekspor dalam rangka mendorong pelaku usaha UKM/IKM untuk ekspor maupun mencetak para eksportir baru kurang memadai (materi pelatihan belum berorientasi ekspor)	Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan
TEO#15b: Banyak pelaku usaha UKM/IKM yang masih belum berorientasi ekspor (jumlah eksportir UMKM di daerah masih terbatas), atau Belum memadainya kemampuan dan keterampilan eksportir daerah dalam bidang ekspor dan promosi	Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan
TEO#15c: Masih belum memadainya keberadaan infrastruktur dan peran/kemampuan balai penelitian dalam upaya meningkatkan daya saing industri, khususnya bagi pelaku UKM/IKM	Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan
a. Tujuan Evaluasi (terkait TEO#15a, #15b, #15c): ➤ Untuk memastikan tercapainya target (jika ada); - kegiatan pelatihan eksportir dan calon eksportir - penelitian/pengembangan teknologi industri ➤ Untuk mengetahui kondisi perkembangan mengenai; - jumlah dan kualitas pelatihan ekspor yang telah diselenggarakan dalam rangka mendorong pelaku usaha UKM/IKM untuk ekspor - jumlah pelaku usaha UKM/IKM yang menjadi eksportir dan calon eksportir - keberadaan infrastruktur dan kemampuan Balai Litbang Industri	Reff.: Kegiatan Pengembangan SDM Bid. Ekspor & Kegiatan Litbang Teknologi
b. Langkah Kerja (terkait TEO#15a, #15b, #15c): 1) Dapatkan dokumen/data: - RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016 - RKA KL/SKPD, RKPD/APBD tahun 2015, 2016	

c. Pelaksanaan Program/Kegiatan	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kegiatan/kinerja terkait yang memuat informasi mengenai: kegiatan pengembangan SDM bidang ekspor, kondisi jumlah pelaku ekspor UKM/IKM, serta kondisi infrastruktur dan kemampuan/peran Balai Litbang Industri - Dokumen/data terkait lainnya <p>2) Telaah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pengembangan SDM bidang ekspor maupun target penelitian/pengembangan teknologi industri (Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan)</p> <p>3) Lakukan evaluasi kondisi perkembangan kegiatan pengembangan SDM bidang ekspor, kondisi keberadaan pelaku usaha ekspor, dan kondisi infrastruktur maupun kemampuan/ peran Balai Litbang Industri, serta identifikasi keberhasilan/ permasalahan yang ada</p> <p>4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi perkembangan kegiatan pengembangan SDM bidang ekspor maupun kondisi keberadaan pelaku usaha ekspor serta kondisi infrastruktur dan kemampuan/peran Balai Litbang Industri</p> <p>5) Buat simpulan dan saran</p>	
TEO#16a: Belum adanya/memadainya pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah (kawasan industri maupun sentra industri), sehingga berisiko rendahnya kualitas produk ekspor daerah	Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan
TEO#16b: Belum optimalnya upaya fasilitasi pengembangan produk-produk UKM/IKM yang berorientasi ekspor	Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan
<p>a. Tujuan Evaluasi (terkait TEO#16a, #16b):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk memastikan tercapainya target pembangunan dan fasilitasi kawasan industri dan sentra industri kecil menengah maupun target pengembangan fasilitas industri kecil menengah ➤ Untuk mengetahui kondisi kegiatan pengembangan fasilitasi pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitasi pengembangan produk UKM/IKM 	<p>Ref: Kegiatan Pengembangan Fasilitas Industri</p> <p>& Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan IKM</p>
<p>b. Langkah Kerja (terkait TEO#16a, #16b):</p> <p>1) Dapatkan dokumen/data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016 - RKA KL/SKPD, RKPD/APBD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait yang memuat informasi mengenai: kegiatan pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitasi pengembangan produk UKM/IKM 	

c. Pelaksanaan Program/Kegiatan	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen/data terkait lainnya 2) Telaah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pembangunan dan fasilitasi kawasan industri dan sentra industri kecil menengah maupun target pengembangan fasilitas industri kecil menengah (Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan) 3) Lakukan evaluasi kondisi perkembangan kegiatan engembangan fasilitasi pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitasi pengembangan produk UKM/IKM, serta identifikasi keberhasilan/permasalahan yang ada <ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat fasilitas pengolahan industri produk ekspor di daerah, dan berupa apa saja - Bagaimana peran pemerintah dalam fasilitasi pengembangan produk ekspor non migas - ... dll ... 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi perkembangan kegiatan engembangan fasilitasi pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitasi pengembangan produk UKM/IKM 5) Buat simpulan dan saran 	
<p>TEO#17: Kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya untuk produk UKM/IKM masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi, sehingga belum optimal dalam mendukung kegiatan promosi ekspor nasional</p>	<p>Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan</p>
<p>a. Tujuan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Untuk memastikan tercapainya target pameran dagang dan promosi ekspor, baik di dalam negeri maupun luar negeri (sesuai target yang telah ditetapkan ~ Reff. Target RPJMN/RKP, RKA KL/SKPD 2015, 2016) ➢ Untuk mengetahui kondisi perkembangan kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya untuk produk UKM/IKM 	<p>Reff: Kegiatan Pengembangan Promosi dan Citra</p>
<p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016 - RKA KL/SKPD, RKP/APBD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait pengembangan dan promosi citra ekspor (jika ada) - Dokumen/data terkait lainnya 	

c. Pelaksanaan Program/Kegiatan			
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:
Uraian		Keterangan	
<p>2) Telaah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pengembangan dan promosi citra ekspor (Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan)</p> <p>3) Lakukan evaluasi kondisi perkembangan kegiatan pengembangan promosi dan citra ekspor, dan identifikasi keberhasilan/permasalahan yang ada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah kegiatan pameran dagang maupun promosi ekspor telah dilaksanakan secara rutin - Bagaimana efektivitas kegiatan pameran dagang maupun promosi ekspor telah mendorong peningkatan produk maupun pasar ekspor - Bagaimana peran pemerintah, dll.. <p>4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi perkembangan kegiatan pengembangan promosi dan citra ekspor</p> <p>5) Buat simpulan dan saran</p>			
TEO#18a: Kurangnya/belum optimalnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kerjasama di bidang pengembangan ekspor, baik dengan pihak luar negeri maupun dalam negeri		Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan	
TEO#18b: Kurangnya upaya peningkatan kerjasama perdagangan bilateral maupun multilateral melalui proses ratifikasi		Evaluator: - Kedeputian	
TEO#18c: Kurangnya upaya peningkatan kerjasama perdagangan di Forum ASEAN, APEC dan Organisasi Internasional lainnya		Evaluator: - Kedeputian	
TEO#18d: Adanya ketidakjelasan capaian tindak lanjut dan manfaat yang diperoleh dari hasil-hasil kerjasama perdagangan internasional		Evaluator: - Kedeputian	
TEO#18e: Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam fasilitasi pengembangan ekspor nasional		Evaluator: - Perwakilan	
<p>a. Tujuan Evaluasi (terkait TEO#18a, #18b, #18c, #18d, #18e):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk memastikan tercapainya target kerjasama pengembangan ekspor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan target fasilitasi perdagangan luar negeri daerah ➤ Untuk mengetahui kondisi perkembangan kegiatan kerjasama pengembangan ekspor (termasuk kerjasama perdagangan bilateral/multilateral), dan kondisi peran pemda dalam fasilitasi pengembangan ekspor (khususnya bagi pelaku UKM/IKM) 		Reff.: Kegiatan Kerjasama Pengembangan Ekspor, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Bilateral/ Multilateral, & Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Luar Negeri Daerah	

c. Pelaksanaan Program/Kegiatan	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
<p>b. Langkah Kerja Evaluasi (terkait TEO#18a, #18b, #18c, #18d, #18e):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - RPJMN 2015-2019, dan RKP tahun 2015, 2016 - RKA KL/SKPD, RKPD/APBD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait kerjasama pengembangan ekspor (termasuk kerjasama perdagangan bilateral/multilateral), dan kegiatan fasilitasi pengembangan ekspor - Dokumen/data terkait lainnya 2) Telaah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target kerjasama pengembangan ekspor (Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan) 3) Lakukan evaluasi kondisi keberhasilan/permasalahan terkait: <ul style="list-style-type: none"> - perkembangan kerjasama pengembangan ekspor oleh pemerintah (termasuk kerjasama perdagangan bilateral/multilateral), dan capaian tindak lanjut hasil kerjasama - upaya/peran pemda dalam fasilitasi pengembangan ekspor, khususnya bagi pelaku UKM/IKM 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi perkembangan kerjasama maupun fasilitasi pengembangan ekspor oleh pemerintah, beserta permasalahannya 5) Buat simpulan dan saran 	
<p>TEO#19a: Kurangnya/belum optimalnya kegiatan pencitraan produk ekspor, khususnya produk UKM/IKM sehingga citra produk ekspor (nation branding) masih relatif rendah</p>	<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan
<p>TEO#19b: Keberadaan produk ekspor UKM/IKM kurang/tidak kompetitif (jumlah produk ekspor berkualitas terbatas, harga tidak murah dan/atau tidak sebanding kualitas produk)</p>	<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan
<p>TEO#19c: Kurangnya tingkat apresiasi maupun penghargaan terhadap inovasi produk industri dalam negeri yang berorientasi ekspor</p>	<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan
<p>a. Tujuan Evaluasi (terkait TEO#19a, #19b, #19c):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk memastikan tercapainya target kegiatan pencitraan produk ekspor (nation branding), sesuai target yang telah ditetapkan (Reff. Target RPJMN/RKP, RKA KL/SKPD 2015, 2016) ➤ Untuk mengetahui kondisi perkembangan citra produk pasar (nation branding), keberadaan produk ekspor UKM/IKM maupun tingkat apresiasi/penghargaan terhadap produk ekspor (terkait Hak Kekayaan Intelektual) 	<p>Reff.:</p> <p>Kegiatan Kerjasama Pengembangan Ekspor, Kegiatan Pengembangan Promosi dan Citra, & Kegiatan Kajian Teknologi dan HKI</p>

c. Pelaksanaan Program/Kegiatan	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
<p>b. Langkah Kerja (terkait TEO#19a, #19b, #19c):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016 - RKA KL/SKPD, RKPD/APBD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait capaian pencitraan produk ekspor (nation branding), perkembangan persaingan kualitas produk ekspor non migas - Dokumen/data terkait lainnya 2) Telaah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pencitraan produk ekspor (nation branding) (Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan) 3) Lakukan evaluasi atas kondisi citra produk ekspor, persaingan kualitas produk ekspor, maupun tingkat apresiasi terhadap produk ekspor non migas <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana kondisi citra produk ekspor non migas (terkait kualitas, harga yang kompetitif) - Bagaimana peran pemerintah dalam upaya mendorong meningkatnya citra produk ekspor non migas - ... dll ... 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi produk ekspor non migas dimaksud, beserta permasalahannya 5) Buat simpulan dan saran 	
TEO#20a: Kualitas dan kuantitas pelayanan informasi ekspor, khususnya kepada pelaku usaha ekspor UKM/IKM belum memadai	Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan
TEO#20b: Ketersediaan infrastruktur perijinan ekspor masih belum memadai, sehingga berisiko terhambatnya proses penyelesaian perijinan ekspor	Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan
TEO#20c: Belum optimalnya upaya pengamanan dan perlindungan akses pasar kepada para pelaku ekspor, khususnya UKM/IKM	Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan
TEO#20d: Belum adanya kejelasan pendelegasian perijinan sektor perdagangan dari pemerintah kepada Administratur KEK untuk mendukung peranan KEK terkait pengembangan ekspor	Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan
<p>a. Tujuan Evaluasi (terkait TEO#20a, #20b, #20c, #20d):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk memastikan tercapainya target pengembangan pasar/informasi ekspor maupun peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha (jika ada), a.l. berupa: 	Reff.: Kegiatan Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Kegiatan Pengelolaan

c. Pelaksanaan Program/Kegiatan					
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:		
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:		
Uraian		Keterangan			
<ul style="list-style-type: none"> - pengelolaan/pelayanan informasi ekspor - ketersediaan infrastruktur perijinan ekspor dan pengamanan akses pasar - kejelasan pendelegasian wewenang perijinan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus (KEK) ➤ Untuk mengetahui kondisi perkembangan kegiatan pengembangan pasar/informasi pasar maupun peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha/ekspor, khususnya bagi pelaku UKM/IKM 		Fasilitasi Ekspor, Kegiatan Pengamanan/Perlindungan Akses Pasar, Dukungan Perdagangan Thd KEK			
b. Langkah Kerja (terkait TEO#20a, #20b, #20c, #20d): <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016 - RKA KL/SKPD, RKPD/APBD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait kegiatan pengembangan pasar dan informasi ekspor, serta peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha/ekspor (jika ada) - Dokumen/data terkait lainnya 2) Telaah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target kegiatan pengembangan pasar dan informasi ekspor, serta peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha/ekspor (Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan) 3) Lakukan evaluasi atas kondisi dan permasalahan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - pengelolaan/pelayanan informasi ekspor - ketersediaan infrastruktur perijinan ekspor dan pengamanan akses pasar - kejelasan pendelegasian wewenang perijinan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus (KEK) 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi dan permasalahan terkait kegiatan pengembangan pasar dan informasi ekspor, serta peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha/ekspor 5) Buat simpulan dan saran 					
TEO#21: Kurang/belum optimalnya capaian peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor dalam rangka mendorong peningkatan ekspor non migas		Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan			
a. Tujuan Evaluasi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk memastikan tercapainya target peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor secara optimal (sesuai target yang telah 		Reff: Kegiatan Peningkatan Promosi dan Kelembagaan			

c. Pelaksanaan Program/Kegiatan	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
<p>ditetapkan ~ Reff. Target RPJMN/RKP, RKA KL/SKPD 2015, 2016)</p> <p>➤ Untuk mengetahui kondisi perkembangan peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor (termasuk peran dunia usaha dan lembaga ekspor), beserta identifikasi permasalahannya</p>	Ekspor
<p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - RPJMN 2015-2019, dan RKP tahun 2015, 2016 - RKA KL/SKPD, RKPD/APBD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor (jika ada) - Dokumen/data terkait lainnya 2) Telaah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor (Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan) 3) Lakukan evaluasi kondisi perkembangan peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor, dan identifikasi keberhasilan/permasalahan yang ada <ul style="list-style-type: none"> - Berupa apa saja asosiasi atau kelembagaan ekspor yang ada - Bagaimana efektivitas peran kelembagaan ekspor yang ada dalam upaya mendorong pengembangan ekspor - Bagaimana peran pemerintah ..., dll ... 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi perkembangan peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor 5) Buat simpulan dan saran 	

d. Penatausahaan dan Pelaporan	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
<p>TEO#22a: Kementerian teknis maupun Pemda belum menatausahakan/mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan terkait pengembangan ekspor secara tertib dan memadai</p>	<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan
<p>a. Tujuan Evaluasi:</p> <p>Untuk memastikan/meyakinkan adanya mekanisme penatausahaan dan pelaporan program/kegiatan oleh pihak-pihak terkait, baik Kementerian teknis maupun pemda secara tertib (tepat waktu, tepat substansi dan</p>	

d. Penatausahaan dan Pelaporan	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
sesuai ketentuan)	
<p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen penatausahaan dan pelaporan atas pelaksanaan program/kegiatan pengembangan ekspor, a.l. berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perencanaan/penganggaran; Renstra, RKA KL/SKPD, dll. - Dokumen pelaksanaan/pelaporan; Laporan kegiatan, Laporan Kinerja (Lakip), dll. 2) Lakukan telaah dan evaluasi atas dokumen dimaksud, untuk mengetahui mekanisme administrasi dan pelaporan telah dilaksanakan secara tertib (tepat waktu, tepat substansi dan sesuai ketentuan), serta identifikasi permasalahan yang ada 3) Lakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pejabat terkait mengenai mekanisme administrasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku, beserta permasalahan yang teridentifikasi 4) Buat simpulan dan saran 	
<p>TEO#22b: Pengelolaan alokasi/anggaran program/kegiatan terkait pengembangan ekspor di daerah yang bersumber dana APBN (Dana Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan) belum dikoordinasikan/dilaporkan kepada pemerintah daerah secara memadai (kurang transparan)</p>	<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan
<p>a. Tujuan Evaluasi:</p> <p>Untuk memastikan/meyakinkan bahwa pengelolaan alokasi/ anggaran program/kegiatan yang bersumber dana APBN (Dana Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan) terkait pengembangan ekspor telah dikoordinasikan kepada pemerintah daerah secara memadai</p>	
<p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan data/dokumen: <ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan alokasi/anggaran program/kegiatan terkait pengembangan ekspor yang bersumber dana APBN (Dana Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan), yang dilaksanakan di daerah - Program/kegiatan pengembangan ekspor yang bersumber dana APBD (provinsi/kabupaten/kota) 2) Lakukan telaah dan evaluasi, apakah pengelolaan alokasi/ anggaran tersebut (khususnya yang bersumber dana APBN) telah dikoordinasikan kepada pemda, dan telah didokumentasikan/dilaporkan secara tertib. Identifikasi permasalahan yang ada 	

d. Penatausahaan dan Pelaporan	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
3) Lakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pejabat terkait mengenai keberadaan dan pengelolaan alokasi/anggaran program/ kegiatan yang bersumber dana APBN, beserta permasalahan yang ada 4) Buat simpulan dan saran	
TEO#23: Kementerian teknis maupun Pemda belum memiliki/ menyelenggarakan sistem informasi (database) terkait informasi ekspor (produk ekspor, pelaku ekspor, pasar ekspor) secara akurat dan update	Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan
a. Tujuan Evaluasi: Untuk memastikan/meyakinkan bahwa Kementerian teknis maupun Pemda telah memiliki/menyelenggarakan sistem informasi (database) yang akurat terkait ekspor dan telah dilakukan update nya secara berkala	
b. Langkah Kerja: 1) Dapatkan dokumen dan/atau aplikasi terkait database ekspor, baik di tingkat kementerian teknis maupun pemerintah daerah 2) Telaah dokumen/aplikasi database dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengetahui akurasi data-data terkait pengembangan ekspor (produk ekspor, pelaku ekspor, pasar ekspor). Identifikasi permasalahan yang ada. 3) Lakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pejabat terkait mengenai keberadaan database ekspor dan mekanisme updating yang dilaksanakan, beserta permasalahan yang ada 4) Buat simpulan dan saran	

e. Monitoring dan Evaluasi	
Objek Evaluasi :	Dievaluasi oleh :
Masa Evaluasi :	Direviu oleh :
Uraian	Keterangan
TEO#24: Kementerian teknis maupun Pemda belum melaksanakan monitoring atas rencana, realisasi dan capaian hasil (output/outcome) program/kegiatan pengembangan ekspor secara memadai (tidak ada laporan kegiatan monitoring dan tindak lanjutnya)	Evaluator: - Kedeputian - Perwakilan
a. Tujuan Evaluasi: Untuk memastikan/meyakinkan bahwa Kementerian teknis maupun Pemda telah memonitor/mengevaluasi capaian output/outcome program/kegiatan pengembangan ekspor nasional (baik secara parsial di masing-masing satker maupun secara keseluruhan program/kegiatan lintas sektoral)	

e. Monitoring dan Evaluasi			
Objek Evaluasi	:	Dievaluasi oleh	:
Masa Evaluasi	:	Direviu oleh	:
Uraian		Keterangan	
<p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan hasil notulen rapat, laporan pelaksanaan monitoring/ evaluasi oleh Kementerian teknis maupun pemda terhadap capaian output/outcome program/kegiatan pengembangan ekspor 2) Telaah dokumen-dokumen dimaksud, untuk mengetahui hasil monitoring/evaluasi dan sejauhmana respon/tindak lanjut yang telah dilaksanakan 3) Lakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pejabat terkait mengenai proses dan hasil kegiatan monitoring/evaluasi dan respon tindak lanjut yang telah dilaksanakan 4) Buat simpulan dan saran 			
<p>TEO#25: Inspektorat Kementerian teknis maupun Pemda (APIP) belum melaksanakan evaluasi terpisah secara memadai atas program/kegiatan pengembangan ekspor nasional, baik secara parsial di masing-masing Satker maupun secara keseluruhan program/kegiatan lintas sektoral</p>		<p>Evaluator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedeputian - Perwakilan 	
<p>a. Tujuan Evaluasi:</p> <p>Untuk memastikan/meyakinkan bahwa Inspektorat Kementerian teknis maupun Pemda (APIP) telah melaksanakan pengawasan atas program/kegiatan pengembangan ekspor nasional (baik secara parsial di masing-masing satker maupun secara keseluruhan program/kegiatan lintas sektoral)</p>			
<p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan laporan hasil pengawasan oleh APIP atas program /kegiatan pengembangan ekspor, beserta progres tindak lanjutnya 2) Telaah dokumen-dokumen dimaksud, untuk mengetahui hasil pengawasan dan sejauhmana tindak lanjut yang telah dilaksanakan 3) Lakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pejabat terkait mengenai proses dan hasil kegiatan pengawasan beserta tindak lanjutnya 4) Buat simpulan dan saran 			

B. Pelaporan Hasil Evaluasi

Pelaporan hasil Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional merupakan desain penyusunan format laporan sebagai media output/keluaran yang diharapkan, yang memuat perumusan simpulan hasil evaluasi berupa kondisi riil atas permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan pengembangan ekspor, baik di tingkat pusat maupun daerah, beserta saran perbaikan yang relevan sebagai rekomendasi strategis kepada Pemerintah dan *Stakeholders* terkait lainnya.

Desain pelaporan yang digunakan sebagai media laporan hasil Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional tahun 2015, berupa format laporan individual oleh Kedeputian teknis maupun Perwakilan BPKP selaku Tim Assurance dan laporan konsolidasi oleh Tim Teknis Lintas Sektor STAR BPKP selaku Koordinator (Tim *Quality Assurance*), sebagai berikut:

1. Format Laporan Individual

Laporan individual hasil Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional tahun 2015, disusun dalam bentuk bab dengan format sebagai berikut:

..... **page break**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI**

Jalan
Telepon:

Nomor : LAP - /PW...../2016 2016
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Program
Pengembangan Ekspor Nasional pada
Pemerintah Provinsi
Tahun 2015

Yth. Gubernur.....
di

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional pada Pemerintah Provinsi tahun 2015, sebagai berikut:

BAB I SIMPULAN DAN SARAN
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI

..... **page break**

**BAB I
SIMPULAN DAN SARAN**

Kami telah melakukan Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional pada Pemerintah Provinsi..... tahun 2015, dengan hasil sebagai berikut :

A. SIMPULAN

Simpulan memuat ringkasan hasil evaluasi dan analisis terhadap kondisi/fakta, kriteria/standar, dan permasalahan (penyimpangan/gap antara kondisi dan kriteria) yang ditemukan dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu;

1. Evaluasi atas Kebijakan Pengembangan Ekspor
.....
..... (uraian ringkas)

2. Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Ekspor
.....
..... (uraian ringkas)

B. SARAN

Saran memuat masukan, informasi dan saran perbaikan strategis atas permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi, serta tanggapan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk menindaklanjutinya.

.....
.....
... (uraian saran perbaikan atas setiap kondisi permasalahan yang ditemukan)

Demikian hasil evaluasi lintas sektoral atas Program Pengembangan Ekspor Nasional pada.....kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Perwakilan

(Nama)

NIP.....

Tembusan

1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
2. *Project Management Unit (PMU) STAR* BPKP

..... **page break**

BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

Kami telah melaksanakan Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional pada pemerintah Provinsi tahun 2015, sebagai berikut:

A. Dasar Evaluasi

Dasar Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP).
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan KesejahteraanRakyat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP).
4. Surat Tugas Kepala Perwakilan Nomor..... tanggal..... Tentang

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional pada Pemerintah Provinsi ertujuan:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberadaan dan kejelasan (harmonisasi) kebijakan/prosedur formal yang bersifat (lebih) operasional untuk mendorong pengembangan ekspor non migas yang bernilai tambah, khususnya bagi pelaku ekspor UKM/IKM dalam rangka mendukung upaya pengembangan ekspor nasional.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis keberadaan dan peran kelembagaan ekspor serta pengelolaan program/kegiatan pengembangan ekspor (perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi) dalam upaya optimalisasi dan peningkatan ekspor nasional

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi evaluasi atas kebijakan dan implementasi kebijakan program/kegiatan pengembangan ekspor tahun 2015, dengan sasaran evaluasi yang menitikberatkan pada:

1. Keberadaan kebijakan/regulasi atas pengembangan produk ekspor maupun pasar ekspor dan harmonisasi antar kebijakan/regulasi yang ada.
2. Kelembagaan ekspor dan pengelolaan pengembangan program/kegiatan ekspor, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasinya.

D. Profil Obyek yang Dievaluasi

Memuat informasi mengenai profil umum dari objek evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, antara lain:

1. Penjelasan mengenai profil birokrasi/struktur organisasi dari objek evaluasi.
2. Kondisi geografis dan profil ekonomi regional makro yang mencakup data pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, kontribusi ekspor non-migas terhadap ekspor non-migas nasional, tren konsumsi, sektor penerimaan dan pengeluaran APBD.
3. Potensi regional yang mencakup potensi sumber daya, produk unggulan, industri UKM, dan potensi ekspor.

E. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi memuat uraian hasil evaluasi dan analisis atas Program Pengembangan Ekspor Nasional secara lengkap terhadap kondisi/fakta, kriteria/standar, dan permasalahan (penyimpangan/gap antara kondisi dan kriteria) yang ditemukan dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu;

1. Evaluasi atas Kebijakan Pengembangan Ekspor

- a. Kebijakan Pengembangan Produk Ekspor
(Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat dan Rekomendasi)
 - Kondisi
 - Kriteria
 - Sebab
 - Akibat.....
 - Rekomendasi.....
- b. Kebijakan Pengembangan Pasar Ekspor
(Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat dan Rekomendasi)
- c. Kebijakan Lainnya terkait Pengembangan Ekspor
(Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat dan Rekomendasi)

2. Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekspor

- a. Efektivitas Kelembagaan Pengembangan Ekspor
(Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat dan Rekomendasi)
 - Kondisi
 - Kriteria
 - Sebab
 - Akibat.....
 - Rekomendasi.....
- b. Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan Ekspor
(Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat dan Rekomendasi)
 - i.
- c. Pelaksanaan Program/Kegiatan ekspor
(Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat dan Rekomendasi)
- d. Penatausahaan dan Pelaporan Program/Kegiatan Ekspor
- e. (Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat dan Rekomendasi)
- f. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Ekspor
(Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat dan Rekomendasi)

F. Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan

.....
.....

..... *page break*

2. Format Laporan Konsolidasi

Laporan konsolidasi hasil Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, disusun dalam bentuk bab dengan format sebagai berikut:

- a. Surat Pengantar (Laporan Laporan Hasil Evaluasi), yang ditujukan kepada pemerintah dan/atau Menteri/Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, dan/atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

..... **page break**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN**

Jalan Pramuka Nomor 33 Lt. 1 Jakarta 13120
Telepon 021-85910031 Faksimile (021)
85910106



Nomor : S - /STAR/2016 2016
Lampiran : Satu set laporan
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Program Pengembangan Ekspor
Nasional Tahun 2015

Yth.
di

Bersama ini kami sampaikan Laporan Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional Tahun 2015. Evaluasi mencakup aspek kebijakan dan implementasi kebijakan atas pengembangan ekspor, dengan hasil simpulan sebagai berikut:

.....
..... (uraian ringkas)

Terhadap permasalahan dalam simpulan di atas, kami telah memberikan saran perbaikan kepada
(Kementerian/Lembaga/Pemda terkait). Uraian lebih lanjut tentang evaluasi disajikan dalam laporan hasil evaluasi, telampir.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPKP

ttd

Ardan Adiperdana

NIP.

Tembusan:

.....

..... **page break**

- b. Laporan Hasil Evaluasi (Konsolidasi), sebagai lampiran dari Surat Pengantar dimaksud, yang disusun dengan struktur;
 - 1) Kata Pengantar, yang ditandatangani Kepala BPKP dan/atau Deputi Kepala BPKP.
 - 2) Ringkasan Eksekutif, memuat ringkasan simpulan hasil evaluasi beserta rekomendasi strategis berkaitan Program Pengembangan Ekspor Nasional.
 - 3) Bab I Pendahuluan, yang memuat kerangka acuan evaluasi, berupa; latar belakang, dasar evaluasi, tujuan evaluasi, keluaran/output hasil evaluasi, ruang lingkup evaluasi, kerangka pemikiran (desain) evaluasi, dan pelaksanaan kompilasi dan konsolidasi hasil evaluasi.

..... *page break*

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

.....
..... (uraian ringkas)

B. Dasar Evaluasi

Dasar evaluasi lintas sektoral atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, yaitu:

- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP).
- 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan KesejahteraanRakyat.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP).
- 4.

C. Tujuan Evaluasi

Evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional pada Pemerintah Provinsi ertujuan:

- 1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberadaan dan kejelasan (harmonisasi) kebijakan/prosedur formal yang bersifat (lebih) operasional untuk mendorong pengembangan ekspor non migas yang bernilai tambah, khususnya bagi pelaku ekspor UKM/IKM dalam rangka mendukung upaya pengembangan ekspor nasional.
- 2. Mengidentifikasi dan menganalisis keberadan dan peran kelembagaan ekspor serta pengelolaan program/kegiatan pengembangan ekspor (perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan

pelaporan, serta monitoring dan evaluasi) dalam upaya optimalisasi dan peningkatan ekspor nasional

D. Output/Keluaran Hasil Evaluasi

Output/keluaran yang diharapkan adalah rekomendasi strategis (*strategic recommendation*) kepada pemerintah sebagai bahan masukan, informasi dan saran perbaikan kepada pemerintah berkaitan dengan Pengembangan Ekspor Nasional secara terintegrasi dalam rangka mendukung tujuan prioritas pembangunan nasional.

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi evaluasi atas kebijakan dan implementasi kebijakan program/kegiatan pengembangan ekspor tahun 2015, dengan sasaran evaluasi yang menitikberatkan pada:

1. Keberadaan kebijakan/regulasi atas pengembangan produk ekspor maupun pasar ekspor dan harmonisasi antar kebijakan/regulasi yang ada.
2. Kelembagaan ekspor dan pengelolaan pengembangan program/kegiatan ekspor, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasinya.

F. Kerangka Pemikiran (Desain) Evaluasi

Kerangka pemikiran (desain) evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, dimaksudkan sebagai acuan langkah-langkah kerja evaluasi dalam setiap tahapan evaluasi yang dilaksanakan, sebagai berikut:

.....
 (uraian ringkas)

G. Pelaksanaan Kompilasi dan Konsolidasi Hasil Evaluasi

Laporan evaluasi atas Program Pengembangan Ekspor Nasional tahun 2015 ini disusun berdasarkan hasil kompilasi dan konsolidasi laporan hasil evaluasi oleh Kedeputusan teknis dan Perwakilan BPKP pada, sebagai berikut

.....
 (uraian ringkas)

..... **page break**

- 4) Bab II Uraian Hasil Evaluasi, yang memuat informasi umum berkaitan profil program/kegiatan yang dievaluasi.

..... **page break**

**BAB II
URAIAN HASIL EVALUASI**

A. Informasi Umum Berkaitan Program Pengembangan Ekspor Nasional

.....
..... (uraian ringkas)

B. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi memuat uraian hasil evaluasi dan analisis atas Program Pengembangan Ekspor Nasional secara lengkap terhadap kondisi/fakta, kriteria/standar, dan permasalahan (penyimpangan/gap antara kondisi dan kriteria) yang ditemukan dalam pelaksanaan evaluasi, yang dikompilasi dan dikonsolidasikan dari hasil evaluasi 15 perwakilan BPKP, yaitu;

1. Evaluasi atas Kebijakan Pengembangan Ekspor

- a. Kebijakan Pengembangan Produk Ekspor
(Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, dan Akibat)
- b. Kebijakan Pengembangan Pasar Ekspor
(Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, dan Akibat)
- c. Kebijakan Lainnya terkait Pengembangan Ekspor
(Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, dan Akibat)

2. Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekspor

- a. Efektivitas Kelembagaan Pengembangan Ekspor
(Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, dan Akibat)
- b. Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan Ekspor
(Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, dan Akibat)
- c. Pelaksanaan Program/Kegiatan ekspor
(Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, dan Akibat)
- d. Penatausahaan dan Pelaporan Program/Kegiatan Ekspor
(Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, dan Akibat)
- e. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Ekspor
(Uraikan hasil evaluasi atas masing-masing TEO yang isinya mencakup Kondisi, Kriteria, Sebab, dan Akibat)

(Hasil evaluasi dari Kedeputusan teknis dan Perwakilan BPKP ditabulasi sebagai dasar kompilasi dan konsolidasi, dan disajikan sebagai lampiran).

..... **page break**

- 5) Bab III Simpulan dan Rekomendasi Strategis, yang memuat simpulan dari uraian hasil evaluasi (yang disajikan dalam Bab II Uraian Hasil Evaluasi) beserta rekomendasi strateginya.

..... *page break*

BAB III SIMPULAN DAN REKOMENDASI STRATEGIS

A. Simpulan

Simpulan memuat ringkasan hasil evaluasi dan analisis terhadap kondisi/fakta, kriteria/standar, dan permasalahan (penyimpangan/gap antara kondisi dan kriteria) yang ditemukan dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu;

1. Evaluasi atas Kebijakan Pengembangan Ekspor
(Uraikan Ringkas)
(Uraikan Ringkas)
2. Aspek Implementasi Kebijakan
(Uraikan Ringkas)
(Uraikan Ringkas)

B. Rekomendasi Strategis

Rekomendasi strategis memuat masukan, informasi dan saran perbaikan strategik atas permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi, serta tanggapan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk menindaklanjutinya.

.....

 (uraian saran perbaikan atas setiap kondisi permasalahan yang ditemukan)

..... *page break*

TENTATIVE EVALUATION OBJECTIVES (TEO)
EVALUASI ATAS PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL TAHUN 2016

Lampiran Pedoman Nomor 1

TENTATIVE EVALUATION OBJECTIVE (TEO)	KRITERIA TERKAIT TEO	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TIM ASSURANCE BPKP	
			KEDEPUTIAN	PERWAKILAN
A. KEBIJAKAN				
PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR				
TEO# 1a , Belum terdapat kebijakan/ regulasi formal yang menetapkan jenis-jenis produk unggulan daerah (a.l. klastering produk pertanian, kehutanan, industri, pertambangan, dll), sesuai karakteristik potensi daerah, sebagai dasar/acuan pengembangan produk ekspor (termasuk diversifikasi produk ekspor)	<ul style="list-style-type: none"> > Permendagri 9/2014 tlg Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah > Pasal 2: Permenhik Daerah berwenang menyusun dan menetapkan PUD setiap tahun. PUD ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan keputusan Bupati/Walikota 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tlg klastering produk-produk unggulan daerah, khususnya produk non migas yang berorientasi ekspor 	-	√
TEO# 1b , Belum terdapat kebijakan/ regulasi formal yang mengatur mengenai insentif permodalan produksi dan/atau bantuan teknis proses produksi, khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan produk ekspor non migas	<ul style="list-style-type: none"> UU 20/2008 tlg UMKM > Pasal 7, 21: Permenhik dan penda ... menetapkan peraturan/ kebijakan yang meliputi aspek pendanaan dan aspek sarana dan prasarana Permenhik dan penda menyediakan pembiayaan bagi UMK.... dapat memberikan hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk UMK. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan/ regulasi (yang bersifat lebih operasional ~ juklak/juknis/prosedur) tlg insentif permodalan dan/atau bantuan teknis proses produksi bagi UKM/ IKM dalam upaya mendorong pengembangan produk-produk non migas yang berorientasi ekspor 	√	√
TEO# 1c , Belum terdapat kebijakan/ regulasi formal yang mengatur mengenai standarisasi kualitas produk ekspor (termasuk desain branding/ packaging dan pengurusan HKI), khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan produk ekspor non migas	<ul style="list-style-type: none"> UU 20/2008 tlg UMKM > Pasal 7, 14, 16: Permenhik dan penda ... menetapkan peraturan/ kebijakan yang meliputi aspek promosi dagang ... ditujukan untuk memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain UMKM ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan/ regulasi (yang bersifat lebih operasional ~ juklak/juknis/prosedur) tlg penetapan standarisasi kualitas produk-produk yang berorientasi ekspor 	√	√
TEO# 2 , Adanya ketidaktelesan/ketidaksinkronan (disharmonisasi tumpang tindih) atas kebijakan/ regulasi terkait pengembangan produk ekspor		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya harmonisasi dan kejelasan kebijakan/ regulasi tlg pengembangan produk ekspor, khususnya bagi pelaku UKM/IKM 	√	√
PENGEMBANGAN PASAR EKSPOR				
TEO# 3a , Belum terdapat kebijakan/ regulasi formal yang mengatur mengenai kemudahan investasi/bertusaha dan perjanjian ekspor, khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan produk ekspor non migas	<ul style="list-style-type: none"> Perpres 98/2014 tlg Perzinan utk UMK > Pasal 3: IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Penda dengan berpedoman pada Permenhik PP 17/2013 tlg Pelaksanaan UU 20/2008 tlg UMKM > Pasal 37: Permenhik dan penda wajib memberikan kemudahan perzinan memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh UMKM ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan/ regulasi (yang bersifat lebih operasional ~ juklak/juknis/prosedur) tlg kemudahan bertusaha dan perjanjian ekspor, khususnya bagi pelaku UKM/IKM 	√	√
TEO# 3b , Belum terdapat kebijakan/ regulasi formal yang mengatur mengenai mekanisme/ tatacara pembinaan dan pemberdayaan UKM/IKM yang berorientasi ekspor untuk pengembangan ekspor nasional/ daerah	<ul style="list-style-type: none"> PP 17/2013 jo UU 20/2008 tlg UMKM > Pasal 2: Permenhik dan penda menyelenggarakan pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM dilakukan dengan pengembangan usaha, kemitraan, perzinan, koordinasi dan pengendalian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan/ regulasi (yang bersifat lebih operasional ~ juklak/juknis/prosedur) tlg mekanisme/ tatacara pembinaan dan pemberdayaan UKM/IKM yang berorientasi ekspor (termasuk mendorong UKM/IKM menjadi pengusaha ekspor) 	√	√

Lampiran Pedoman Nomor 1

TENTATIVE EVALUATION OBJECTIVE (TEO)		KRITERIA TERKAIT TEO	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TJM ASSURANCE BP4P KEDEPHTIAN PERWAKILAN
TEO# 3c	Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai proses/mekanisme kegiatan diseminasi dan pemantauan informasi pasar ekspor (<i>market intelligence/market brief</i>). Khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan pasar ekspor	UU 20/2008 tgg UMKM Pasal 7, 16: Pemerintah dan pemda ... menetapkan peraturan/ kebijakan yang meliputi aspek informasi usaha. Pemerintah dan pemda menfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pemasaran.	Adanya kebijakan/regulasi yang bersifat lebih operasional ~ juklak/jukris/prosedur tgg mekanisme/tatacara kegiatan diseminasi dan pemantauan informasi pasar ekspor, khususnya bagi pelaku UKM/IKM	√
TEO# 3d	Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai proses/mekanisme kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan pasar ekspor	UU 20/2008 tgg UMKM Pasal 7, 14: Pemerintah dan pemda ... menetapkan peraturan/ kebijakan yang meliputi aspek promosi dagang ... ditujukan untuk meningkatkan promosi produk usaha UMKM di dalam dan di luar negeri, memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk UMKM di dalam dan di luar negeri; memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.	Adanya kebijakan/regulasi yang bersifat lebih operasional ~ juklak/jukris/prosedur tgg mekanisme/tatacara kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya bagi pelaku UKM/IKM	√
TEO# 3e	Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai proses/mekanisme kegiatan fasilitasi kerjasama UKM/IKM yang berorientasi ekspor dengan usaha besar, kadin, lembaga pendidikan/penelitian, dan asosiasi industri/profesi	UU 20/2008 tgg UMKM Pasal 7, 11: Pemerintah dan pemda ... menetapkan peraturan/ kebijakan yang meliputi aspek kerjasama ... ditujukan untuk mewujudkan kerjasama antar UMKM, antara UMKM dan usaha besar, dan mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar UMKM dan antara UMKM dan usaha besar.	Adanya kebijakan/regulasi yang bersifat lebih operasional ~ juklak/jukris/prosedur tgg mekanisme/tatacara kegiatan fasilitasi kerjasama ekspor, khususnya bagi pelaku UKM/IKM	√
TEO# 4	Adanya ketidakjelasan/ketidaksinkronan (disharmonisasi tumpang tindih) atas kebijakan/regulasi terkait pengembangan pasar ekspor		Adanya harmonisasi dan kejelasan kebijakan/regulasi tgg pengembangan pasar ekspor, khususnya bagi pelaku UKM/IKM	√
B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN				
1 EFEKTIVITAS KELEMBAGAN EKSPOR				
TEO# 5a	Belum adanya penerapan kelembagaan ekspor secara jelas yang bertanggung jawab dalam sinkronisasi dan efektivitas koordinasi program/kegiatan pengembangan ekspor nasional secara terintegrasi, baik di tingkat pemerintah pusat/daerah		Adanya kebijakan/regulasi tgg penetapan kelembagaan ekspor sebagai koordinator program/kegiatan pengembangan ekspor nasional yang bersifat lintas sektoral secara terintegrasi Adanya kejelasan pola hubungan dan tata kelola program/kegiatan pengembangan ekspor nasional, baik di tingkat pusat/daerah	√
TEO# 5b	Kelengkapan dan pengelolaan program/kegiatan terkait pengembangan ekspor nasional masih bersifat sektoral/ parsial di masing-masing entitas (saber/unt saber), sehingga bersiko terhadap efektivitas tujuan program/kegiatan secara optimal		Adanya koordinasi dan sinergi atas implementasi (kelengkapan dan pengelolaan) program/kegiatan terkait pengembangan ekspor di masing-masing entitas terkait (perdagangan, perindustrian, UMKM, dll) Tidak adanya tumpang tindih program/kegiatan pengembangan ekspor di masing-masing entitas terkait	√
TEO# 6a	Kementerian teknis terkait (perdagangan, perindustrian, UMKM, dll) belum melaksanakan program/kegiatan terkait pengembangan ekspor nasional secara optimal sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya		Kementerian teknis terkait (perdagangan, perindustrian, UMKM) telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terkait program/kegiatan pengembangan ekspor secara optimal	√

TENTATIVE EVALUATION OBJECTIVE (TEO)		KRITERIA TERKAIT TEO	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TIM ASSURANCE BPP KEDEPUTIAN PERWAKILAN
TEO# 6b	Tim Teknis Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Pusat/Daerah - PEP/PEPIDA) yang bertanggung jawab dalam penumusan kebijakan peningkatan ekspor dan investasi belum dibentuk/ditetapkan, atau Tim PEP/PEPIDA telah dibentuk namun belum berperan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terkait pengembangan ekspor nasional	Keppres 28/2010 jo Keppres 3/2006 > Dalam kerangka peningkatan ekspor dan peningkatan investasi, perlu dibentuk Tim Teknis PEP/... dalam kerangka peningkatan ekspor dan peningkatan investasi di daerah, perlu dibentuk PEP/IDA	Tim teknis PEP/PEPIDA telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terkait program/kegiatan pengembangan ekspor secara optimal	√
TEO# 7	Pemerintah daerah (provinsi, kab/kota) tidak menetapkan program/kegiatan pengembangan ekspor sesuai karakteristik/ potensi daerahnya (sebagai urusan pilihan daerah) dalam rangka mendukung program pengembangan ekspor nasional (prioritas nasional)		Pemda menetapkan program/kegiatan pengembangan ekspor sesuai karakteristik/ potensi daerahnya (urusan pilihan daerah), sebagai salah satu indikator kinerja pemerintah	√
2 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN				
TEO# 8	Belum diterapkannya Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional/Daerah (RIPN/D) maupun Kebijakan Industri Nasional (KIN) sebagai perencanaan strategis pemerintah dalam pengembangan industri	PP 14/2015 tgg RIPN 2015-2035 > Pasal 3: RIPN 2015-2035 dilaksanakan melalui KIN yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, berkoordinasi dengan menteri dan kepala lembaga pemerintahan non-kementerian terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan. RIPN 2015 - 2019 (target tahun 2015)	Adanya RIPN/D sesuai dengan visi/misi pemerintah (nawaacel) sebagai salah satu perencanaan strategis pemerintah dalam pengembangan industri nasional/daerah, dalam rangka mendukung program pengembangan ekspor nasional	√
TEO# 9a	Program/kegiatan terkait pengembangan ekspor (yang tertuang dalam RKA KU/SKPD, RKPD/ APBD) belum sepenuhnya sinkron dan selaras dengan program/kegiatan prioritas nasional (RJM/ RKIP, baik secara nomenklatur maupun substansi target output/ outcome, atau Kementerian teknis maupun pemda tidak mengkomodasi sebagian besar program/kegiatan prioritas pengembangan ekspor nasional yang tertuang dalam RJMN/RKP (- misal, hanya fokus dg kegiatan promosi/pameran dg anggaran yang terbatas)	RJMN 2015- 2019 (program/kegiatan dan targetnya) RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya)	Kementerian teknis dan pemda mengkomodasi program/kegiatan prioritas pengembangan ekspor nasional (yang tertuang dalam RJMN/RKIP) Sinkronisasi/keselarasan program/kegiatan kementerian teknis dan pemda dengan program/kegiatan prioritas nasional	√
TEO# 9b	Penetapan target/sasaran output/outcome program/kegiatan pengembangan ekspor (yang tertuang dalam RKA KU/SKPD, RKPD/ APBD) belum sepenuhnya didukung sumber data yang jelas/akurat	RJMN 2015- 2019 (program/kegiatan dan targetnya) RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya)	Adanya tinjauan (<i>breakdown</i>) atas target/sasaran output/ outcome dalam RJMN/ RKP Adanya database ekspor (produk ekspor, pelaku ekspor, pasar ekspor) yang akurat	√
TEO# 10	Belum adanya/belum memadainya sistem informasi (database) yang akurat/elas dan terintegrasi terkait data/informasi pengembangan ekspor nasional, baik di tingkat pusat/daerah	Sistem Informasi (database) ekspor	Adanya sistem informasi (database) yang <i>update</i> terkait data/informasi pengembangan ekspor nasional, a.l berupa: produk ekspor, pelaku ekspor (UKM/Mon UKM), pasar ekspor, baik di tingkat pusat/daerah	√
3 PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR				

Lampiran Pedoman Nomor 1

TENTATIVE EVALUATION OBJECTIVE (TEO)	KRITERIA TERKAIT TEO	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TIM ASSURANCE BP4P	
			KEDEPITIAN	PERWAKILAN
TEO# 11 , Capaian pertumbuhan barang ekspor non migas (berupa a.l. pertanian, kehutanan, industri, dll). Khususnya produk ekspor dari UMKM belum optimal sesuai target yang ditetapkan, baik secara nasional/daerah	RPJMN 2015- 2019 (program/kegiatan dan targetnya) RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) RKA K/L/SKPD, RKPD/APBD 2015, 2016	Capaian target: - Meningkatkan pertumbuhan barang ekspor non migas (berupa a.l. pertanian, kehutanan, industri, dll), sesuai target yang ditetapkan - Refl. Target RPJMN/RKP, RKA K/L/SKPD 2015, 2016	√	√
TEO# 12a , Belum adanya/belum optimalnya upaya standarisasi kualitas produk ekspor non migas guna mendorong peningkatan daya saing produk ekspor UMKM/IKM di pasar ekspor	RPJMN 2015- 2019 (program/kegiatan dan targetnya) RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) RKA K/L/SKPD, RKPD/APBD 2015, 2016	Capaian target: - Tercapainya target standarisasi produk ekspor non migas, termasuk produk pertanian, kehutanan, industri (jika ada)	√	√
TEO# 12b , Pengelolaan produk ekspor non migas, berupa produk pertanian, kehutanan, dan industri belum optimal (belum adanya standarisasi produk)		Kondisi/Permasalahan: - Telah/belum adanya/optimalnya upaya standarisasi produk ekspor non migas (termasuk produk pertanian, kehutanan, industri, dll)	√	√
TEO# 13 , Kurangnya/belum optimalnya insentif permodalan/ pembiayaan produksi maupun bantuan teknis produksi bagi UMKM/IKM, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Lembaga Pembiayaan/Dunia Usaha	RPJMN 2015- 2019 (program/kegiatan dan targetnya) RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) RKA K/L/SKPD, RKPD/APBD 2015, 2016	Capaian target: - Tercapainya target kegiatan insentif maupun bantuan teknis produksi (jika ada)	√	√
TEO# 14a , Kurangnya/belum optimalnya diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas dalam rangka meningkatkan daya saing (pertumbuhan) ekspor non migas (baik di Pasar Utama maupun Pasar Prospektif)	RPJMN 2015- 2019 (program/kegiatan dan targetnya) RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) RKA K/L/SKPD, RKPD/APBD 2015, 2016	Capaian target: - Tercapainya target pertumbuhan ekspor non migas produk utama dan prospektif (jika ada) - Tercapainya target pertumbuhan ekspor non migas pasar utama dan prospektif (jika ada) - Tercapainya target revitalisasi dan penumbuhan produk ekspor agribudus (jika ada)	√	√
TEO# 14b , Belum optimalnya upaya revitalisasi dan pengembangan pengolahan industri berbasis agro (produk hasil hutan, perkebunan, perikanan, dll) dalam rangka diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas		Kondisi/Permasalahan: - Telah/belum optimalnya kegiatan diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas (termasuk produk ekspor agro industri)	√	√
TEO# 15a , Jumlah dan kualitas pelatihan ekspor dalam rangka mendorong pelaku usaha UMKM untuk ekspor maupun mencetak para eksportir baru kurang memadai (materi-pelatihan belum berorientasi ekspor)	RPJMN 2015- 2019 (program/kegiatan dan targetnya) RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) RKA K/L/SKPD, RKPD/APBD 2015, 2016	Capaian target: - Tercapainya target pelatihan eksportir dan calon eksportir (jika ada) - Tercapainya target penelitian/ pengembangan teknologi industri (jika ada)	√	√
TEO# 15b , Banyak pelaku usaha UMKM/IKM yang masih belum berorientasi ekspor (jumlah eksportir UMKM di daerah masih terbatas) atau		Kondisi/Permasalahan: - Jumlah/kualitas pelatihan ekspor telah/belum memadai - Banyak pelaku usaha UMKM/IKM telah/belum berorientasi ekspor. atau	√	√
TEO# 15c , Masih belum memadainya keberadaan infrastruktur dan peran/kemampuan balai penelitian dalam upaya meningkatkan daya saing industri, khususnya bagi pelaku UMKM/IKM		- Telah/belum memadainya kemampuan dan keterampilan eksportir daerah - Telah/belum memadainya infrastruktur dan peran/kemampuan Balai Penelitian/Pengembangan Industri	√	√
TEO# 16a , Belum adanya/memadainya pengembangan fasilitas-pengolahan industri di daerah (kawasan industri maupun sentra industri), sehingga bersihko rendahnya kualitas produk-ekspor daerah	RPJMN 2015- 2019 (program/kegiatan dan targetnya) RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) RKA K/L/SKPD, RKPD/APBD 2015, 2016	Capaian target: - Tercapainya target pembangunan dan fasilitas kawasan industri dan sentra industri kecil menengah di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua (jika ada) - Tercapainya target pengembangan fasilitas industri kecil dan	√	√

TENTATIVE EVALUATION OBJECTIVE (TEO)		KRITERIA TERKAIT TEO	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TIM ASSURANCE BPAP KEDEPITIAN PERWAKILAN
TEO# 16b	Pelum optimalnya upaya fasilitasi pengembangan produk-produk UKM/IKM yang berorientasi ekspor		<p>menengah (jika ada)</p> <p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum memadainya pengembangan fasilitasi pengolahan industri di daerah Telah/belum optimalnya upaya fasilitasi pengembangan produk-produk UKM/IKM 	√
PENGEMBANGAN PASAR EKSPOR				
TEO# 17	Kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya untuk produk UKM/IKM masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi, sehingga belum optimal dalam mendukung kegiatan promosi ekspor nasional	RPJMN 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) RKA K/L/SKPD, RKP/AFBD 2015, 2016	<p>Capaian target:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tercapainya target pameran dagang dan promosi ekspor, baik di dalam negeri maupun luar negeri (jika ada) <p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum optimalnya kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya untuk produk UKM/IKM 	√
TEO# 18a	Kurangnya/belum optimalnya upaya pemerintahan dalam meningkatkan kerjasama di bidang pengembangan ekspor, baik dengan pihak luar negeri maupun dalam negeri	RPJMN 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) RKA K/L/SKPD, RKP/AFBD 2015, 2016	<p>Capaian target:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tercapainya target kerjasama pengembangan ekspor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (jika ada) <p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum optimalnya kegiatan kerjasama pengembangan ekspor Telah/belum optimalnya upaya peningkatan kerjasama perdagangan bilateral maupun multilateral Telah/belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam fasilitas pengembangan ekspor nasional, khususnya bagi pelaku UKM/IKM di daerah 	√
TEO# 18b	Kurangnya upaya peningkatan kerjasama, perdagangan bilateral maupun multilateral melalui proses ratifikasi		<p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum optimalnya kegiatan kerjasama pengembangan ekspor 	√
TEO# 18c	Kurangnya upaya peningkatan kerjasama perdagangan di Forum ASEAN, APEC dan Organisasi Internasional lainnya		<p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam fasilitas pengembangan ekspor nasional, khususnya bagi pelaku UKM/IKM di daerah 	√
TEO# 18d	Adanya keterlaksanaan capaian tindak lanjut dan manfaat yang diperoleh dari hasil-hasil kerjasama perdagangan internasional		<p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum optimalnya kegiatan kerjasama pengembangan ekspor 	√
TEO# 18e	Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam fasilitasi pengembangan ekspor nasional		<p>Capaian target:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tercapainya target citra produk ekspor (jika ada) <p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum optimalnya kegiatan pencitraan produk ekspor, khususnya bagi UKM/IKM Keberadaan produk ekspor UKM/IKM telah/belum kompetitif (jumlah produk ekspor berkualitas terbatas, harga tidak murah dan/atau tidak sebanding kualitas produk) 	√
TEO# 19a	Kurangnya/belum optimalnya kegiatan pencitraan produk ekspor, khususnya produk UKM/IKM sehingga citra produk ekspor (tatanan branding) masih relatif rendah	RPJMN 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) RKA K/L/SKPD, RKP/AFBD 2015, 2016	<p>Capaian target:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tercapainya target citra produk ekspor (jika ada) <p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum optimalnya kegiatan pencitraan produk ekspor, khususnya bagi UKM/IKM Keberadaan produk ekspor UKM/IKM telah/belum kompetitif (jumlah produk ekspor berkualitas terbatas, harga tidak murah dan/atau tidak sebanding kualitas produk) 	√
TEO# 19b	Keberadaan produk ekspor UKM/IKM kurang/tidak kompetitif (jumlah produk ekspor berkualitas terbatas, harga tidak murah dan/atau tidak sebanding kualitas produk)		<p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum optimalnya kegiatan pencitraan produk ekspor, khususnya bagi UKM/IKM Keberadaan produk ekspor UKM/IKM telah/belum kompetitif (jumlah produk ekspor berkualitas terbatas, harga tidak murah dan/atau tidak sebanding kualitas produk) 	√
TEO# 19c	Kurangnya tingkat apresiasi maupun penghargaan terhadap inovasi produk industri dalam negeri yang berorientasi ekspor		<p>Capaian target:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tercapainya target pengelolaan/pelayanan informasi ekspor (jika ada) <p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum memadainya infrastruktur perijinan ekspor, dan pengamanan akses pasar (jika ada) Tercapainya target pendelegasian wewenang perijinan kepada Administrator KEK <p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum memadainya kegiatan pengelolaan/pelayanan informasi ekspor, khususnya bagi UKM/IKM Telah/belum memadainya infrastruktur perijinan ekspor dan pengamanan akses pasar Telah/belum jelasnya pendelegasian wewenang perijinan kepada Administrator KEK 	√
TEO# 20a	Kualitas dan kuantitas pelayanan informasi ekspor, khususnya kepada pelaku usaha ekspor UKM/IKM belum memadai	RPJMN 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) RKA K/L/SKPD, RKP/AFBD 2015, 2016	<p>Capaian target:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tercapainya target pengelolaan/pelayanan informasi ekspor (jika ada) <p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum memadainya infrastruktur perijinan ekspor, dan pengamanan akses pasar (jika ada) Tercapainya target pendelegasian wewenang perijinan kepada Administrator KEK <p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum memadainya kegiatan pengelolaan/pelayanan informasi ekspor, khususnya bagi UKM/IKM Telah/belum memadainya infrastruktur perijinan ekspor dan pengamanan akses pasar Telah/belum jelasnya pendelegasian wewenang perijinan kepada Administrator KEK 	√
TEO# 20b	Ketersediaan infrastruktur perijinan ekspor masih belum memadai, sehingga bersiko terlanjutnya proses penyelesaian perijinan ekspor		<p>Capaian target:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tercapainya target pengelolaan/pelayanan informasi ekspor (jika ada) <p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum memadainya infrastruktur perijinan ekspor, dan pengamanan akses pasar (jika ada) Tercapainya target pendelegasian wewenang perijinan kepada Administrator KEK <p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum memadainya kegiatan pengelolaan/pelayanan informasi ekspor, khususnya bagi UKM/IKM Telah/belum memadainya infrastruktur perijinan ekspor dan pengamanan akses pasar Telah/belum jelasnya pendelegasian wewenang perijinan kepada Administrator KEK 	√
TEO# 20c	Belum optimalnya upaya pengamanan dan perlindungan akses pasar kepada para pelaku ekspor, khususnya UKM/IKM		<p>Capaian target:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tercapainya target pengelolaan/pelayanan informasi ekspor (jika ada) <p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum memadainya infrastruktur perijinan ekspor, dan pengamanan akses pasar (jika ada) Tercapainya target pendelegasian wewenang perijinan kepada Administrator KEK <p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum memadainya kegiatan pengelolaan/pelayanan informasi ekspor, khususnya bagi UKM/IKM Telah/belum memadainya infrastruktur perijinan ekspor dan pengamanan akses pasar Telah/belum jelasnya pendelegasian wewenang perijinan kepada Administrator KEK 	√
TEO# 20d	Belum adanya kejelasan pendelegasian perijinan sektor perdagangan dari pemerintah kepada Administrator KEK untuk mendukung peranan KEK terkait pengembangan ekspor		<p>Capaian target:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tercapainya target pengelolaan/pelayanan informasi ekspor (jika ada) <p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum memadainya infrastruktur perijinan ekspor, dan pengamanan akses pasar (jika ada) Tercapainya target pendelegasian wewenang perijinan kepada Administrator KEK <p>Kondisi/Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah/belum memadainya kegiatan pengelolaan/pelayanan informasi ekspor, khususnya bagi UKM/IKM Telah/belum memadainya infrastruktur perijinan ekspor dan pengamanan akses pasar Telah/belum jelasnya pendelegasian wewenang perijinan kepada Administrator KEK 	√

Lampiran Pedoman Nomor 1

Lampiran Pedoman Nomor 1

TENTATIVE EVALUATION OBJECTIVE (TEO)		KRITERIA TERKAIT TEO	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TIM ASSURANCE BPKP KEDEPUTIAN PERWAKILAN	
TEO# 21 , Kurang/belum optimalnya capaian peningkatan kualitas-promosi dan kelengkapan ekspor dalam rangka mendorong-peningkatan ekspor non migas		- RRMN 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) - RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA KL/SKPD, RKT/APPD 2015, 2016	- Subsah target: - Tercapainya target peningkatan kualitas promosi dan kelengkapan ekspor (jika ada) - Kondisi/permasalahan: - Telah/belum optimalnya peningkatan kualitas promosi dan kelengkapan ekspor	✓	✓
4 PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN PROGRAM/KEGIATAN					
TEO# 22a , Kementerian teknis maupun Pemda belum menatausahakan/mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan terkait pengembangan ekspor secara tertib dan memadai			- Kondisi/permasalahan: - Telah/belum adanya mekanisme penatausahaan dan pelaporan program/kegiatan oleh pihak-pihak terkait, baik Kementerian teknis maupun pemda secara tertib (tepat waktu, tepat substansi dan sesuai ketentuan)	✓	✓
TEO# 22b , Pengelolaan alokasi/anggaran program/kegiatan terkait pengembangan ekspor di daerah yang bersumber dana APBN (Dana Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan) belum dikoordinasikan/dilaporkan kepada pemerintah daerah secara memadai (kurang transparan)			- Kondisi/permasalahan: - Pengelolaan alokasi/ anggaran program/kegiatan yang bersumber dana APBN (Dana Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan) terkait pengembangan ekspor telah/belum dikoordinasikan kepada pemerintah daerah secara memadai	✓	✓
TEO# 23 , Kementerian teknis maupun Pemda belum memiliki/menyelenggarakan sistem informasi (database) terkait informasi ekspor (produk ekspor, pelaku ekspor, pasar ekspor) secara akurat dan update			- Kondisi/permasalahan: - Kementerian teknis maupun Pemda telah/belum memiliki/menyelenggarakan sistem informasi (database) yang akurat/valid terkait ekspor dan telah dilakukannya update nya secara berkala	✓	✓
5 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN					
TEO# 24 , Kementerian teknis maupun Pemda belum melaksanakan monitoring atas rencana, realisasi dan capaian hasil (output/oucome) program/kegiatan pengembangan ekspor secara memadai (tidak ada laporan kegiatan monitoring dan tindak lanjutnya)			- Kondisi/permasalahan: - Kementerian teknis maupun Pemda telah /belum memonitor/mengevaluasi capaian output/oucome program/kegiatan pengembangan ekspor nasional (baik secara parsial di masing-masing satker maupun secara keseluruhan program/kegiatan lintas sektoral)	✓	✓
TEO# 25 , Inspektorat Kementerian teknis maupun Pemda (APIP) belum melaksanakan evaluasi terpisah secara memadai atas program/kegiatan pengembangan ekspor nasional, baik secara parsial di masing-masing Satker maupun secara keseluruhan program/kegiatan lintas sektoral			- Kondisi/permasalahan: - Inspektorat Kementerian teknis maupun Pemda (APIP) telah/belum melaksanakan pengawasan atas program/kegiatan pengembangan ekspor nasional (baik secara parsial di masing-masing satker maupun secara keseluruhan program/kegiatan lintas sektoral)	✓	✓

Lampiran Pedoman Nomor 2

TEMATIF EVALUATION OBJECTIVE (TEO)	KRITERIA TERKAIT TEO	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TUJUAN EVALUASI	LANGKAH KERJA
<p>TEO# 5a - Belum adanya penyetoran pengembangan ekspor secara jelas yang bertanggung jawab dalam sinkronisasi dan efektivitas koordinasi program/kegiatan pengembangan ekspor nasional secara terintegrasi, baik di tingkat pemerintah pusat/diarenah</p>		<p>Adanya kebijakan/regulasi yg penyetoran pengembangan ekspor sebagai koordinator program/kegiatan pengembangan ekspor nasional (yang bersifat lintas sektoral) secara terintegrasi</p> <p>Adanya kegiatan pola hubungan dan tata kelola program/kegiatan pengembangan ekspor nasional, baik di tingkat pusat/diarenah</p>	<p>Untuk memastikan/mencirikan adanya kebijakan/regulasi yg penyetoran pengembangan ekspor sebagai koordinator program/kegiatan pengembangan ekspor nasional yang bersifat lintas sektoral secara terintegrasi</p> <p>Untuk memastikan/revitalisasi adanya kegiatan pola hubungan dan tata kelola program/kegiatan pengembangan ekspor nasional, baik di tingkat pusat/diarenah</p>	<p>1) Siapkan dokumen/data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan/regulasi yg penyetoran pengembangan ekspor - Struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawabnya (jika ada) - Laporan koordinasi pengembangan ekspor <p>2) Uraikan dokumen/data dimaksud ada maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lakukan identifikasi permasalahan > Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya terhadap upaya sinkronisasi dan efektivitas koordinasi program/kegiatan pengembangan ekspor nasional/diarenah. Khususnya dalam rangka mendorong pengembangan ekspor non migas oleh UKM/IKM > Uraikan dokumen/data dimaksud ada maka: <ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi kelemahan/kekurangan/kelemahan untuk mengoptimalkan kinerja/pink-pink terkait pengembangan ekspor dan perannya > Lakukan evaluasi atas kebijakan pola hubungan dan tata kelola program/kegiatan pengembangan ekspor nasional
<p>TEO# 5b - Keterbatasan dan pengertanian program/kegiatan terkait pengembangan ekspor nasional masih bersifat sektoral/pasial di masing-masing entitas (sektor/instansi/lembaga) sehingga tidak terdapat koordinasi yang optimal dengan tujuan program/kegiatan secara optimal</p>		<p>Adanya koordinasi dan sinergi asas implementasi (pengembangan dan pengelolan) program/kegiatan terkait pengembangan ekspor di masing-masing entitas terkait</p> <p>Tidak adanya tumpang tindih program/kegiatan pengembangan ekspor di masing-masing entitas terkait</p>	<p>Untuk memastikan/meyakinkan adanya koordinasi dan sinergi asas implementasi program/kegiatan pengembangan ekspor oleh masing-masing entitas terkait baik pasial oleh masing-masing entitas</p> <p>Untuk memastikan/meyakinkan tidak adanya tumpang tindih program/kegiatan pengembangan ekspor di masing-masing entitas terkait</p>	<p>1) Siapkan dokumen/data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPO/NN 2015-2016, RMR 2015-2016 - ROK K/L/SR/PT 2015-2016 - Laporan kegiatan/kegiatan masing-masing entitas terkait <p>2) Lakukan kegiatan/kegiatan masing-masing entitas terkait</p> <p>3) Lakukan kegiatan/kegiatan masing-masing entitas terkait</p> <p>4) Lakukan kegiatan/kegiatan masing-masing entitas terkait</p> <p>5) Lakukan kegiatan/kegiatan masing-masing entitas terkait</p>
<p>TEO# 6a - Kementerian teknis terkait perdagangan, perindustrian, UMKM, dll belum melaksanakan program/kegiatan terkait pengembangan ekspor nasional secara optimal sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya</p>		<p>Kementerian teknis terkait perdagangan, perindustrian, UMKM telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terkait program/kegiatan pengembangan ekspor secara optimal</p>	<p>Untuk memastikan/meyakinkan bahwa Kementerian teknis terkait perdagangan, perindustrian, UMKM telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terkait program/kegiatan pengembangan ekspor secara optimal</p>	<p>1) Siapkan dokumen/data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi dari tiap kementerian/lembaga (SK/PTN) Kementerian teknis terkait - RPO/NN 2015-2016 masing-masing entitas - Laporan kegiatan/kegiatan masing-masing entitas <p>2) Tahap koordinasi dokumen/data dimaksud untuk mengetahui peran masing-masing entitas terkait pengembangan ekspor nasional, beserta rencana sasaran/target dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan</p> <p>3) Lakukan evaluasi atas capaian kinerja masing-masing entitas untuk mengetahui efektivitas kinerja secara tugas pokok dan fungsi masing-masing entitas terkait pengembangan ekspor</p> <p>4) Lakukan koordinasi/identifikasi kepada pejabat terkait mengenai efektivitas capaian kinerja masing-masing entitas beserta permasalahan yang ada</p> <p>5) Buat simpulan dan saran</p>
<p>TEO# 6b - Tim Teknis Pemungutan Ekspor dan Pemungutan Investasi (Pusat/Diarenah - PEP/PEPIDA) yang bertanggung jawab dalam penuntasan kelengkapan pemungutan ekspor dan investasi belum dibentuk/ditentukan ada</p> <p>Tim PEP/PEPIDA telah dibentuk namun belum berperan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terkait pengembangan ekspor nasional</p>	<p>Kepres 28/2010 jo Kepres 3/2006</p> <p>Dalam kerangka pemungutan ekspor dan pemungutan investasi, perlu dibentuk Tim Teknis PEP ... dalam kerangka pemungutan ekspor dan pemungutan investasi di daerah, perlu dibentuk PEPIDA</p>	<p>Tim teknis PEP/PEPIDA telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terkait program/kegiatan pengembangan ekspor secara optimal</p>	<p>Untuk memastikan/meyakinkan adanya Tim Teknis Pemungutan Ekspor/Investasi sebagai salah satu lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam pemungutan ekspor</p> <p>Untuk memastikan/meyakinkan bahwa Tim Teknis telah melaksanakan tanggung jawabnya (peran) secara optimal</p>	<p>1) Siapkan dokumen/data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK pembentukan Tim Teknis beserta tanggung jawabnya (peran) - Struktur organisasi (dan jumlah personalia) - Laporan kegiatan/kegiatan ekspor <p>2a) Uraikan Tim Teknis PEP/IDA dimaksud belum ada, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lakukan identifikasi permasalahan > Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya terhadap upaya pengembangan ekspor nasional/diarenah (sekaligus peran, tugas, dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan/regulasi yang ada). Khususnya dalam rangka mendorong pengembangan ekspor non migas oleh UKM/IKM <p>2b) Uraikan Tim Teknis PEP/IDA dimaksud ada, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lakukan koordinasi/identifikasi kepada pejabat terkait mengenai efektivitas capaian kinerja masing-masing entitas untuk mengetahui dampaknya terhadap upaya pengembangan ekspor dan perannya/ > Lakukan koordinasi/identifikasi kepada pejabat terkait mengenai efektivitas capaian kinerja masing-masing entitas untuk mengetahui dampaknya terhadap upaya pengembangan ekspor dan perannya/
				<p>3) Lakukan koordinasi/identifikasi kepada pihak-pihak terkait mengenai keterkaitan Tim Teknis dan deklarasinya dalam upaya pemungutan ekspor</p> <p>4) Buat simpulan dan saran</p>

TEMA/TITLE EVALUATION OBJECTIVE (TBO)	KRITERIA TERKAIT TEO	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TUJUAN EVALUASI	LANGKAH KERJA
<p>TEBO 7 - Penentuan daerah (provinsi, kab/kota) tidak menentang program/kegiatan pengembangan ekspor sesuai karakteristik/ potensi daerahnya (sebagai urusan pilihan daerah) dalam rangka mendukung program pengembangan ekspor nasional (prioritas nasional)</p>	<p>TEBO 8 - Penentuan pengembangan ekspor sesuai karakteristik/ potensi daerahnya (sebagai urusan pilihan daerah) dalam rangka mendukung program pengembangan ekspor nasional (prioritas nasional)</p>	<p>Penada menentang program/kegiatan pengembangan ekspor sesuai karakteristik/ potensi daerahnya (urusan pilihan daerah) sebagai salah satu indikator kinerja pemerintah</p>	<p>Untuk memastikan/proyeksikan bahwa pemerintah telah menegakkan perencanaan, strategi (RPJMN/D) sebagai dasar/rujukan perencanaan pembangunan industri nasional/daerah (termasuk UKM/IKM) secara berkelanjutan dalam rangka mendukung upaya pengembangan ekspor nasional/daerah</p>	<p>1. Menentukan daerah/daerah: - RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019</p> <p>2. Menentukan daerah/daerah: - RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019</p> <p>3. Menentukan daerah/daerah: - RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019</p> <p>4. Menentukan daerah/daerah: - RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019</p>
<p>2 PERENCANAAN DAN PENGANGKARAN PROGRAM/KEGIATAN</p> <p>TEBO 9 - Penentuan pengembangan ekspor sesuai karakteristik/ potensi daerahnya (sebagai urusan pilihan daerah) dalam rangka mendukung program pengembangan ekspor nasional (prioritas nasional)</p>	<p>TEBO 9a - Penentuan pengembangan ekspor (yang bertitik tolak pada RPJMN 2015-2019) sebagai prioritas nasional (RPJMN/RKP) baik secara komprehensif maupun substansi target output/outcome. atau Kementerian teknis maupun pemda tidak mengkomodifikasi sebagai besar program/kegiatan prioritas pengembangan ekspor nasional yang tertuang dalam RPJMN/RKP (= misal: hanya fokus dg kegiatan promosi/pameran dg anggaran yang terbatas)</p>	<p>Adanya RPJMN/D sesuai dengan isi/misi pemerintah (mawakil sebagai salah satu perencanaan strategis pemerintah) dalam pengembangan industri nasional/daerah, dalam rangka mendukung program pengembangan ekspor nasional</p>	<p>Untuk memastikan/proyeksikan bahwa pemerintah telah menegakkan perencanaan, strategi (RPJMN/D) sebagai dasar/rujukan perencanaan pembangunan industri nasional/daerah (termasuk UKM/IKM) secara berkelanjutan dalam rangka mendukung upaya pengembangan ekspor nasional/daerah</p>	<p>1. Menentukan daerah/daerah: - RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019</p> <p>2. Menentukan daerah/daerah: - RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019</p> <p>3. Menentukan daerah/daerah: - RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019</p> <p>4. Menentukan daerah/daerah: - RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019 - UU No. 1/2015 tentang RPJMN 2015-2019</p>

<p>TEMATIF EVALUATION OBJECTIVE (TEO)</p> <p>TEOP 09 - Penetapan target/sasaran program/kegiatan pengembangan ekspor (yang terutama dalam RKA KL/SKPD, RKPD/ARPD) belum sepenuhnya didukung sumber data yang jelas/akurat</p> <th data-bbox="1291 767 1386 1098"> <p>KRITERIA TERKAIT TEO</p> <p>- R/PMN 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) - RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya)</p> <th data-bbox="1291 1098 1386 1430"> <p>INFORMASI YANG DIHARAPKAN</p> <p>- Adanya rincian (breakdown) data target/sasaran output/outcome dalam R/PMN/RKP - Adanya database ekspor (produk ekspor, pelaku ekspor, pasar ekspor) yang akurat</p> <th data-bbox="1291 1430 1386 1821"> <p>TUJUAN EVALUASI</p> <p>> Untuk memastikan/menyakinkan bahwa target/sasaran output/outcome program/kegiatan pengembangan ekspor yang ditetapkan, baik oleh Kementerian teknis maupun pemda telah berdasarkan pertimbangan dan/atau sumber data yang jelas dan akurat. - Untuk memastikan/menyakinkan bahwa terdapat rincian (breakdown) data target/sasaran output/outcome dalam R/PMN/RKP</p> <th data-bbox="1291 1821 1386 2195"> <p>LANGKAH KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - R/PMN/ARPD dan RKA KL/SKPD tahun 2015, 2016 - Rencana KL/SKPD - Data pendukung indikator kinerja/target tahun 2015, 2016 - Rincian (breakdown) data target/sasaran output/outcome dalam R/PMN/ARPD jika ada - Matriks logika (Logika) pengembangan ekspor (RKA KL/SKPD, RKP/ARPD) dengan sumber data dasar pendukung indikator kinerja beserta target/sasarannya 2) Lakukan evaluasi: <ul style="list-style-type: none"> - apakah indikator kinerja output/outcome, baik kuantitatif maupun kualitatif, telah menggambarkan tingkat capaian sasaran program/kegiatan/kemampuan kemampuan Pemda akurat/valid 3) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai indikator kinerja beserta target/sasaran output/outcome atas program/kegiatan 4) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - Database/aplikasi terkait ekspor, yang a.l. memuat informasi jenis produk ekspor non migas, pelaku ekspor non migas (UMK/IKM maupun Non UMK/IKM), tujuan pasar ekspor non migas, dan lainnya - Laporan kegiatan ekspor (prodik ekspor) 5) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai ketepatan database/aplikasi yang akurat beserta bentuk sampul dan sistem </th></th></th></th>	<p>KRITERIA TERKAIT TEO</p> <p>- R/PMN 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) - RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya)</p> <th data-bbox="1291 1098 1386 1430"> <p>INFORMASI YANG DIHARAPKAN</p> <p>- Adanya rincian (breakdown) data target/sasaran output/outcome dalam R/PMN/RKP - Adanya database ekspor (produk ekspor, pelaku ekspor, pasar ekspor) yang akurat</p> <th data-bbox="1291 1430 1386 1821"> <p>TUJUAN EVALUASI</p> <p>> Untuk memastikan/menyakinkan bahwa target/sasaran output/outcome program/kegiatan pengembangan ekspor yang ditetapkan, baik oleh Kementerian teknis maupun pemda telah berdasarkan pertimbangan dan/atau sumber data yang jelas dan akurat. - Untuk memastikan/menyakinkan bahwa terdapat rincian (breakdown) data target/sasaran output/outcome dalam R/PMN/RKP</p> <th data-bbox="1291 1821 1386 2195"> <p>LANGKAH KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - R/PMN/ARPD dan RKA KL/SKPD tahun 2015, 2016 - Rencana KL/SKPD - Data pendukung indikator kinerja/target tahun 2015, 2016 - Rincian (breakdown) data target/sasaran output/outcome dalam R/PMN/ARPD jika ada - Matriks logika (Logika) pengembangan ekspor (RKA KL/SKPD, RKP/ARPD) dengan sumber data dasar pendukung indikator kinerja beserta target/sasarannya 2) Lakukan evaluasi: <ul style="list-style-type: none"> - apakah indikator kinerja output/outcome, baik kuantitatif maupun kualitatif, telah menggambarkan tingkat capaian sasaran program/kegiatan/kemampuan kemampuan Pemda akurat/valid 3) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai indikator kinerja beserta target/sasaran output/outcome atas program/kegiatan 4) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - Database/aplikasi terkait ekspor, yang a.l. memuat informasi jenis produk ekspor non migas, pelaku ekspor non migas (UMK/IKM maupun Non UMK/IKM), tujuan pasar ekspor non migas, dan lainnya - Laporan kegiatan ekspor (prodik ekspor) 5) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai ketepatan database/aplikasi yang akurat beserta bentuk sampul dan sistem </th></th></th>	<p>INFORMASI YANG DIHARAPKAN</p> <p>- Adanya rincian (breakdown) data target/sasaran output/outcome dalam R/PMN/RKP - Adanya database ekspor (produk ekspor, pelaku ekspor, pasar ekspor) yang akurat</p> <th data-bbox="1291 1430 1386 1821"> <p>TUJUAN EVALUASI</p> <p>> Untuk memastikan/menyakinkan bahwa target/sasaran output/outcome program/kegiatan pengembangan ekspor yang ditetapkan, baik oleh Kementerian teknis maupun pemda telah berdasarkan pertimbangan dan/atau sumber data yang jelas dan akurat. - Untuk memastikan/menyakinkan bahwa terdapat rincian (breakdown) data target/sasaran output/outcome dalam R/PMN/RKP</p> <th data-bbox="1291 1821 1386 2195"> <p>LANGKAH KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - R/PMN/ARPD dan RKA KL/SKPD tahun 2015, 2016 - Rencana KL/SKPD - Data pendukung indikator kinerja/target tahun 2015, 2016 - Rincian (breakdown) data target/sasaran output/outcome dalam R/PMN/ARPD jika ada - Matriks logika (Logika) pengembangan ekspor (RKA KL/SKPD, RKP/ARPD) dengan sumber data dasar pendukung indikator kinerja beserta target/sasarannya 2) Lakukan evaluasi: <ul style="list-style-type: none"> - apakah indikator kinerja output/outcome, baik kuantitatif maupun kualitatif, telah menggambarkan tingkat capaian sasaran program/kegiatan/kemampuan kemampuan Pemda akurat/valid 3) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai indikator kinerja beserta target/sasaran output/outcome atas program/kegiatan 4) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - Database/aplikasi terkait ekspor, yang a.l. memuat informasi jenis produk ekspor non migas, pelaku ekspor non migas (UMK/IKM maupun Non UMK/IKM), tujuan pasar ekspor non migas, dan lainnya - Laporan kegiatan ekspor (prodik ekspor) 5) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai ketepatan database/aplikasi yang akurat beserta bentuk sampul dan sistem </th></th>	<p>TUJUAN EVALUASI</p> <p>> Untuk memastikan/menyakinkan bahwa target/sasaran output/outcome program/kegiatan pengembangan ekspor yang ditetapkan, baik oleh Kementerian teknis maupun pemda telah berdasarkan pertimbangan dan/atau sumber data yang jelas dan akurat. - Untuk memastikan/menyakinkan bahwa terdapat rincian (breakdown) data target/sasaran output/outcome dalam R/PMN/RKP</p> <th data-bbox="1291 1821 1386 2195"> <p>LANGKAH KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - R/PMN/ARPD dan RKA KL/SKPD tahun 2015, 2016 - Rencana KL/SKPD - Data pendukung indikator kinerja/target tahun 2015, 2016 - Rincian (breakdown) data target/sasaran output/outcome dalam R/PMN/ARPD jika ada - Matriks logika (Logika) pengembangan ekspor (RKA KL/SKPD, RKP/ARPD) dengan sumber data dasar pendukung indikator kinerja beserta target/sasarannya 2) Lakukan evaluasi: <ul style="list-style-type: none"> - apakah indikator kinerja output/outcome, baik kuantitatif maupun kualitatif, telah menggambarkan tingkat capaian sasaran program/kegiatan/kemampuan kemampuan Pemda akurat/valid 3) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai indikator kinerja beserta target/sasaran output/outcome atas program/kegiatan 4) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - Database/aplikasi terkait ekspor, yang a.l. memuat informasi jenis produk ekspor non migas, pelaku ekspor non migas (UMK/IKM maupun Non UMK/IKM), tujuan pasar ekspor non migas, dan lainnya - Laporan kegiatan ekspor (prodik ekspor) 5) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai ketepatan database/aplikasi yang akurat beserta bentuk sampul dan sistem </th>	<p>LANGKAH KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - R/PMN/ARPD dan RKA KL/SKPD tahun 2015, 2016 - Rencana KL/SKPD - Data pendukung indikator kinerja/target tahun 2015, 2016 - Rincian (breakdown) data target/sasaran output/outcome dalam R/PMN/ARPD jika ada - Matriks logika (Logika) pengembangan ekspor (RKA KL/SKPD, RKP/ARPD) dengan sumber data dasar pendukung indikator kinerja beserta target/sasarannya 2) Lakukan evaluasi: <ul style="list-style-type: none"> - apakah indikator kinerja output/outcome, baik kuantitatif maupun kualitatif, telah menggambarkan tingkat capaian sasaran program/kegiatan/kemampuan kemampuan Pemda akurat/valid 3) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai indikator kinerja beserta target/sasaran output/outcome atas program/kegiatan 4) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - Database/aplikasi terkait ekspor, yang a.l. memuat informasi jenis produk ekspor non migas, pelaku ekspor non migas (UMK/IKM maupun Non UMK/IKM), tujuan pasar ekspor non migas, dan lainnya - Laporan kegiatan ekspor (prodik ekspor) 5) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai ketepatan database/aplikasi yang akurat beserta bentuk sampul dan sistem 				
<p>TEOP 10 - Belum adanya/belum memadainya sistem informasi (database) yang akurat/jelas dan terintegrasi terkait data/informasi pengembangan ekspor nasional, baik di tingkat pusat/desaerah</p> <th data-bbox="1047 767 1291 1098"> <p>- Sistem informasi (database) ekspor</p> <th data-bbox="1047 1098 1291 1430"> <p>- Adanya sistem informasi (database) yang update terkait data/informasi pengembangan ekspor nasional, a.l berupa: produk ekspor, pelaku ekspor (UMK/Non UMK), pasar ekspor, baik di tingkat pusat/desaerah</p> <th data-bbox="1047 1430 1291 1821"> <p>> Untuk memastikan/menyakinkan adanya sistem informasi (database) yang update-terkait data/informasi pengembangan ekspor nasional, a.l berupa: produk ekspor, pelaku ekspor (UMK/Non UMK), pasar ekspor, baik di tingkat pusat/desaerah, berdasarkan hasil bahan survey sebagai dasar/acuan perencanaan pengembangan ekspor berikutnya</p> <th data-bbox="1047 1821 1291 2195"> <ol style="list-style-type: none"> 2a) Jika dokumen database/aplikasi dimaksud tidak ada, maka: <ul style="list-style-type: none"> > Lakukan identifikasi penyebabnya > Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekspor nasional/desaerah 2b) Jika dokumen database/aplikasi dimaksud ada, maka: <ul style="list-style-type: none"> > Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekspor nasional/desaerah > Untuk memastikan/menyakinkan kondisi dan database ekspor yang akurat sebagai dasar perencanaan program/kegiatan 3) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai ketepatan database/aplikasi yang akurat beserta bentuk sampul dan sistem </th></th></th></th>	<p>- Sistem informasi (database) ekspor</p> <th data-bbox="1047 1098 1291 1430"> <p>- Adanya sistem informasi (database) yang update terkait data/informasi pengembangan ekspor nasional, a.l berupa: produk ekspor, pelaku ekspor (UMK/Non UMK), pasar ekspor, baik di tingkat pusat/desaerah</p> <th data-bbox="1047 1430 1291 1821"> <p>> Untuk memastikan/menyakinkan adanya sistem informasi (database) yang update-terkait data/informasi pengembangan ekspor nasional, a.l berupa: produk ekspor, pelaku ekspor (UMK/Non UMK), pasar ekspor, baik di tingkat pusat/desaerah, berdasarkan hasil bahan survey sebagai dasar/acuan perencanaan pengembangan ekspor berikutnya</p> <th data-bbox="1047 1821 1291 2195"> <ol style="list-style-type: none"> 2a) Jika dokumen database/aplikasi dimaksud tidak ada, maka: <ul style="list-style-type: none"> > Lakukan identifikasi penyebabnya > Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekspor nasional/desaerah 2b) Jika dokumen database/aplikasi dimaksud ada, maka: <ul style="list-style-type: none"> > Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekspor nasional/desaerah > Untuk memastikan/menyakinkan kondisi dan database ekspor yang akurat sebagai dasar perencanaan program/kegiatan 3) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai ketepatan database/aplikasi yang akurat beserta bentuk sampul dan sistem </th></th></th>	<p>- Adanya sistem informasi (database) yang update terkait data/informasi pengembangan ekspor nasional, a.l berupa: produk ekspor, pelaku ekspor (UMK/Non UMK), pasar ekspor, baik di tingkat pusat/desaerah</p> <th data-bbox="1047 1430 1291 1821"> <p>> Untuk memastikan/menyakinkan adanya sistem informasi (database) yang update-terkait data/informasi pengembangan ekspor nasional, a.l berupa: produk ekspor, pelaku ekspor (UMK/Non UMK), pasar ekspor, baik di tingkat pusat/desaerah, berdasarkan hasil bahan survey sebagai dasar/acuan perencanaan pengembangan ekspor berikutnya</p> <th data-bbox="1047 1821 1291 2195"> <ol style="list-style-type: none"> 2a) Jika dokumen database/aplikasi dimaksud tidak ada, maka: <ul style="list-style-type: none"> > Lakukan identifikasi penyebabnya > Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekspor nasional/desaerah 2b) Jika dokumen database/aplikasi dimaksud ada, maka: <ul style="list-style-type: none"> > Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekspor nasional/desaerah > Untuk memastikan/menyakinkan kondisi dan database ekspor yang akurat sebagai dasar perencanaan program/kegiatan 3) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai ketepatan database/aplikasi yang akurat beserta bentuk sampul dan sistem </th></th>	<p>> Untuk memastikan/menyakinkan adanya sistem informasi (database) yang update-terkait data/informasi pengembangan ekspor nasional, a.l berupa: produk ekspor, pelaku ekspor (UMK/Non UMK), pasar ekspor, baik di tingkat pusat/desaerah, berdasarkan hasil bahan survey sebagai dasar/acuan perencanaan pengembangan ekspor berikutnya</p> <th data-bbox="1047 1821 1291 2195"> <ol style="list-style-type: none"> 2a) Jika dokumen database/aplikasi dimaksud tidak ada, maka: <ul style="list-style-type: none"> > Lakukan identifikasi penyebabnya > Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekspor nasional/desaerah 2b) Jika dokumen database/aplikasi dimaksud ada, maka: <ul style="list-style-type: none"> > Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekspor nasional/desaerah > Untuk memastikan/menyakinkan kondisi dan database ekspor yang akurat sebagai dasar perencanaan program/kegiatan 3) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai ketepatan database/aplikasi yang akurat beserta bentuk sampul dan sistem </th>	<ol style="list-style-type: none"> 2a) Jika dokumen database/aplikasi dimaksud tidak ada, maka: <ul style="list-style-type: none"> > Lakukan identifikasi penyebabnya > Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekspor nasional/desaerah 2b) Jika dokumen database/aplikasi dimaksud ada, maka: <ul style="list-style-type: none"> > Lakukan evaluasi dan analisis dampaknya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekspor nasional/desaerah > Untuk memastikan/menyakinkan kondisi dan database ekspor yang akurat sebagai dasar perencanaan program/kegiatan 3) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai ketepatan database/aplikasi yang akurat beserta bentuk sampul dan sistem 				
<p>3 PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN</p> <p>PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR</p> <p>TEOP 11 - Capaian pertumbuhan barang ekspor non migas (terutama a.l. perikanan, kehutanan, industri, dll), khususnya produk ekspor non migas, belum sesuai target yang ditetapkan, baik secara nasional/desaerah</p> <th data-bbox="673 767 1047 1098"> <p>- R/PMN 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA KL/SKPD, RKP/ARPD 2015, 2016</p> <th data-bbox="673 1098 1047 1430"> <p>- Mengajukan permohonan barang ekspor non migas kepada instansi, khususnya, industri, dll, sesuai target yang ditetapkan - Ref: Target R/PMN/RKP, RKA KL/SKPD 2015, 2016</p> <th data-bbox="673 1430 1047 1821"> <p>> Untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan barang ekspor non migas berupa a.l. perikanan, kehutanan, industri, dll, khususnya perikanan - Ref: Target R/PMN/RKP, RKA KL/SKPD 2015, 2016 - Untuk mengetahui kondisi perkembangan pertumbuhan barang ekspor non migas, khususnya produk ekspor UMK/ IKM beserta identifikasi permasalahannya</p> <th data-bbox="673 1821 1047 2195"> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - R/PMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kondisi terkait perkembangan barang/produk ekspor non migas jika ada - Dokumen/data terkait lainnya 2) Telah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pertumbuhan ekspor non migas. Khususnya produk ekspor UMK/IKM 3) Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaan/permasalahan) <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan evaluasi kondisi perkembangan pertumbuhan barang ekspor non migas, dan identifikasi keberhasilan/ permasalahan yang ada 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi perkembangan barang ekspor non migas 5) Buat sampul dan sistem </th></th></th></th>					<p>- R/PMN 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA KL/SKPD, RKP/ARPD 2015, 2016</p> <th data-bbox="673 1098 1047 1430"> <p>- Mengajukan permohonan barang ekspor non migas kepada instansi, khususnya, industri, dll, sesuai target yang ditetapkan - Ref: Target R/PMN/RKP, RKA KL/SKPD 2015, 2016</p> <th data-bbox="673 1430 1047 1821"> <p>> Untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan barang ekspor non migas berupa a.l. perikanan, kehutanan, industri, dll, khususnya perikanan - Ref: Target R/PMN/RKP, RKA KL/SKPD 2015, 2016 - Untuk mengetahui kondisi perkembangan pertumbuhan barang ekspor non migas, khususnya produk ekspor UMK/ IKM beserta identifikasi permasalahannya</p> <th data-bbox="673 1821 1047 2195"> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - R/PMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kondisi terkait perkembangan barang/produk ekspor non migas jika ada - Dokumen/data terkait lainnya 2) Telah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pertumbuhan ekspor non migas. Khususnya produk ekspor UMK/IKM 3) Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaan/permasalahan) <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan evaluasi kondisi perkembangan pertumbuhan barang ekspor non migas, dan identifikasi keberhasilan/ permasalahan yang ada 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi perkembangan barang ekspor non migas 5) Buat sampul dan sistem </th></th></th>	<p>- Mengajukan permohonan barang ekspor non migas kepada instansi, khususnya, industri, dll, sesuai target yang ditetapkan - Ref: Target R/PMN/RKP, RKA KL/SKPD 2015, 2016</p> <th data-bbox="673 1430 1047 1821"> <p>> Untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan barang ekspor non migas berupa a.l. perikanan, kehutanan, industri, dll, khususnya perikanan - Ref: Target R/PMN/RKP, RKA KL/SKPD 2015, 2016 - Untuk mengetahui kondisi perkembangan pertumbuhan barang ekspor non migas, khususnya produk ekspor UMK/ IKM beserta identifikasi permasalahannya</p> <th data-bbox="673 1821 1047 2195"> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - R/PMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kondisi terkait perkembangan barang/produk ekspor non migas jika ada - Dokumen/data terkait lainnya 2) Telah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pertumbuhan ekspor non migas. Khususnya produk ekspor UMK/IKM 3) Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaan/permasalahan) <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan evaluasi kondisi perkembangan pertumbuhan barang ekspor non migas, dan identifikasi keberhasilan/ permasalahan yang ada 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi perkembangan barang ekspor non migas 5) Buat sampul dan sistem </th></th>	<p>> Untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan barang ekspor non migas berupa a.l. perikanan, kehutanan, industri, dll, khususnya perikanan - Ref: Target R/PMN/RKP, RKA KL/SKPD 2015, 2016 - Untuk mengetahui kondisi perkembangan pertumbuhan barang ekspor non migas, khususnya produk ekspor UMK/ IKM beserta identifikasi permasalahannya</p> <th data-bbox="673 1821 1047 2195"> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - R/PMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kondisi terkait perkembangan barang/produk ekspor non migas jika ada - Dokumen/data terkait lainnya 2) Telah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pertumbuhan ekspor non migas. Khususnya produk ekspor UMK/IKM 3) Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaan/permasalahan) <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan evaluasi kondisi perkembangan pertumbuhan barang ekspor non migas, dan identifikasi keberhasilan/ permasalahan yang ada 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi perkembangan barang ekspor non migas 5) Buat sampul dan sistem </th>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan dokumen/data: <ul style="list-style-type: none"> - R/PMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kondisi terkait perkembangan barang/produk ekspor non migas jika ada - Dokumen/data terkait lainnya 2) Telah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pertumbuhan ekspor non migas. Khususnya produk ekspor UMK/IKM 3) Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaan/permasalahan) <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan evaluasi kondisi perkembangan pertumbuhan barang ekspor non migas, dan identifikasi keberhasilan/ permasalahan yang ada 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi perkembangan barang ekspor non migas 5) Buat sampul dan sistem

TEMPERATIVE EVALUATION OBJECTIVE (TBO)	KRITERIA TERKAIT TEO	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TUJUAN EVALUASI	LANGKAH KERJA
<p>TBO# 12a - Belum adanya/belum optimalnya upaya standarisasi kualitas produk ekspor non migas guna mendorong peningkatan daya saing produk ekspor UKM/IKM di pasar ekspor</p>	<p>- RPPM 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) - RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA KJ/SKPD, RRPD/AFPD 2015, 2016</p>	<p>Capaian target: - Tercapainya target standarisasi produk ekspor non migas, termasuk produk pertanian, kehutanan, industri (jika ada)</p> <p>Kondisi/penyebab: - Rendahnya/optimalnya upaya standarisasi produk ekspor non migas (termasuk produk pertanian, kehutanan, industri, dll)</p>	<p>> Untuk menaikan tercapainya target standarisasi produk ekspor non migas, termasuk produk pertanian, kehutanan, industri (seuai target yang telah ditetapkan - Refl Target RPPM/RP, RKA KJ/SKPD 2015, 2016)</p> <p>> Untuk mengetahui besark perkembangan upaya standarisasi kualitas produk ekspor, secara identifikasi permasalahan</p>	<p>1) Dapatkan dokumen/data: - RPPM 2015-2019 dan RRP tahun 2015, 2016 - RKA KJ/SKPD, RRPD/AFPD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait pengembangan produk ekspor non migas, yang a.l. memuat data kegiatan: - Standarisasi kualitas produk ekspor jika ada - Tahap, dokumen/data dimaksud, dan lakukan analisis untuk mengidentifikasi tercapainya target kegiatan standarisasi produk ekspor non migas</p> <p>2) Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi produk permasalahan</p> <p>3) Lakukan evaluasi atas hasil kegiatan standarisasi produk ekspor non migas dan lakukan identifikasi permasalahan/penyebabnya terkait pengembangan produk ekspor non migas, yang a.l. memuat data kegiatan: - Standarisasi kualitas produk ekspor non migas, termasuk produk ekspor agro industri produk hasil hutan, perikanan, perikanan, dll</p> <p>4) Dapatkan/atau terkapainya - Tahap/pelembutannya kegiatan diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas (termasuk produk agro ekspor agro industri)</p>
<p>TBO# 12b - Peningkatan produk ekspor non migas, berupa produk pertanian, kehutanan, dan industri belum optimal belum adanya standarisasi produk</p>				<p>2) Tahap, dokumen/data dimaksud, dan lakukan analisis untuk mengidentifikasi tercapainya target kegiatan standarisasi produk ekspor non migas</p> <p>3) Lakukan evaluasi atas hasil kegiatan standarisasi produk ekspor non migas dan lakukan identifikasi permasalahan/penyebabnya terkait pengembangan produk ekspor non migas, yang a.l. memuat data kegiatan: - Standarisasi kualitas produk ekspor non migas, termasuk produk ekspor agro industri produk hasil hutan, perikanan, perikanan, dll</p> <p>4) Dapatkan/atau terkapainya - Tahap/pelembutannya kegiatan diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas (termasuk produk agro ekspor agro industri)</p>
<p>TBO# 13 - Kurangnya/belum optimalnya insentif permodalan/penyediaan produk maupun bantuan teknis produk bagi Lembaga Pembiayaan/Dunia Usaha</p>	<p>- RPPM 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) - RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA KJ/SKPD, RRPD/AFPD 2015, 2016</p>	<p>Capaian target: - Tercapainya target kegiatan insentif maupun bantuan teknis produk jika ada</p> <p>Kondisi/penyebab: - Tidak/pelembutannya insentif maupun bantuan teknis produk bagi UKM/IKM</p>	<p>> Untuk memastikan tercapainya target kegiatan insentif pembiayaan/produk ekspor non migas, yang a.l. memuat data kegiatan: - Standarisasi kualitas produk ekspor jika ada</p> <p>> Untuk mengetahui besark perkembangan upaya standarisasi kualitas produk ekspor, secara identifikasi permasalahan</p>	<p>1) Dapatkan dokumen/data: - RPPM 2015-2019 dan RRP tahun 2015, 2016 - RKA KJ/SKPD, RRPD/AFPD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait pengembangan produk ekspor non migas, yang a.l. memuat data kegiatan: - Standarisasi kualitas produk ekspor jika ada - Tahap, dokumen/data dimaksud, dan lakukan analisis untuk mengidentifikasi tercapainya target kegiatan standarisasi produk ekspor non migas</p> <p>2) Jika kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi produk permasalahan</p> <p>3) Lakukan evaluasi atas hasil kegiatan standarisasi produk ekspor non migas dan lakukan identifikasi permasalahan/penyebabnya terkait pengembangan produk ekspor non migas, yang a.l. memuat data kegiatan: - Standarisasi kualitas produk ekspor non migas, termasuk produk ekspor agro industri produk hasil hutan, perikanan, perikanan, dll</p> <p>4) Dapatkan/atau terkapainya - Tahap/pelembutannya kegiatan diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas (termasuk produk agro ekspor agro industri)</p>
<p>TBO# 14a - Kurangnya/belum optimalnya diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas dalam rangka meningkatkan daya saing (perumudanan) ekspor non migas baik di Pasar Utama maupun Pasar Prospektif</p>	<p>- RPPM 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) - RKP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA KJ/SKPD, RRPD/AFPD 2015, 2016</p>	<p>Capaian target: - Tercapainya target pertumbuhan ekspor non migas produk jika ada dan prospektif jika ada</p> <p>Kondisi/penyebab: - Rendahnya/optimalnya kegiatan diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas (termasuk produk agro ekspor agro industri)</p>	<p>> Untuk memastikan tercapainya target jika ada, pertumbuhan ekspor non migas produk utama dan prospektif - pertumbuhan ekspor non migas pasar utama dan prospektif - pertumbuhan dan pertumbuhan produk ekspor agro prospektif</p> <p>> Untuk mengetahui kondisi perkembangan kegiatan pengembangan produk ekspor non migas (termasuk produk ekspor agro industri), secara identifikasi permasalahannya</p>	<p>1) Dapatkan dokumen/data: - RPPM 2015-2019 dan RRP tahun 2015, 2016 - RKA KJ/SKPD, RRPD/AFPD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait pengembangan produk ekspor non migas, yang a.l. memuat data kegiatan: - Diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas, termasuk produk ekspor agro industri produk hasil hutan, perikanan, perikanan, dll</p> <p>2) Tahap/pelembutannya kegiatan diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas (termasuk produk agro ekspor agro industri)</p> <p>3) Lakukan analisis untuk mengidentifikasi tercapainya target kegiatan diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas (termasuk produk agro ekspor agro industri)</p> <p>4) Dapatkan/atau terkapainya - Tahap/pelembutannya kegiatan diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas (termasuk produk agro ekspor agro industri)</p>

Lampiran Pedoman Nomor 2

TENTATIVE EVALUATION OBJECTIVE (TEO)	KRITERIA TERKAIT TEO	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TUJUAN EVALUASI	LANGKAH KERJA
<p>TEO# 14a . Belum optimalnya upaya revitalisasi dan pengembangan pengolahan industri berbasis agro produk hasil hutan, perkebunan, perikanan, dll dalam rangka diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas</p>	<p>- RRI/MN 2015, 2019 (program/kegiatan dan targetnya) - RRP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA K/L/SRPP, RRP/APPD 2015, 2016</p>	<p>Capaian target: - Tercapainya target pelepasan ekspor dan calon ekspor (jika ada) - Tercapainya target pendiliv/ pengembangan teknologi industri (jika ada)</p> <p>Kondisi/pemenuhan: - Jumlah/keualitas pelepasan ekspor telah/ belum memadai - Banyak pelaku usaha UKM/IKM yang masih berorientasi ekspor (jumlah ekspor UMKM di daerah masih terbatas) atau - Belum memadainya kemampuan dan keterampilan ekspor/derah dalam bidang ekspor dan promosi</p>	<p>> Untuk memastikan tercapainya target (jika ada): - Kegiatan pelepasan ekspor dan calon ekspor - pendiliv/ pengembangan teknologi industri</p> <p>> Untuk mengetahui kondisi pengembangan teknologi: - Jumlah dan kualitas pelepasan ekspor (jika ada), diselaraskan dalam rangka menderong pelaku usaha UKM/IKM untuk ekspor</p> <p>- Jumlah pelaku usaha UKM/IKM yang menjadi ekspor/derah</p> <p>- Keterampilan infrastruktur dan kemampuan Balai Litbang Industri</p>	<p>3) Lakukan evaluasi atas kondisi kegiatan diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas, dan identifikasi keberhasilannya/pemenuhannya > Hargainya keberadaan dan produk utama/prospektif maupun pasar utama/prospektif terkait ekspor non migas > Bagaimana peran pemerintah dalam upaya diversifikasi > ... ekspor maupun pasar ekspor > dll ...</p> <p>4) Lakukan konfirmasi/identifikasi kepada pejabat terkait mengenai capaian dan kondisi kegiatan diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas, beserta pemenuhannya</p>
<p>TEO# 14b . Jumlah dan kualitas pelepasan ekspor dalam rangka menderong pelaku usaha UKM/IKM untuk ekspor maupun mendeck para ekspor/derah. Kurang memadai (materi pelatihan belum berorientasi ekspor)</p>	<p>- RRI/MN 2015, 2019 (program/kegiatan dan targetnya) - RRP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA K/L/SRPP, RRP/APPD 2015, 2016</p>	<p>Capaian target: - Tercapainya target pelepasan ekspor dan calon ekspor (jika ada) - Tercapainya target pendiliv/ pengembangan teknologi industri (jika ada)</p> <p>Kondisi/pemenuhan: - Jumlah/keualitas pelepasan ekspor telah/ belum memadai - Banyak pelaku usaha UKM/IKM telah/ belum berorientasi ekspor/derah - Banyak/madainya informasi/struktur dan penyaji/ kemampuan Balai Penelitian/ Pengembangan Industri</p>	<p>> Untuk memastikan tercapainya target (jika ada): - Kegiatan pelepasan ekspor dan calon ekspor - pendiliv/ pengembangan teknologi industri</p> <p>> Untuk mengetahui kondisi pengembangan teknologi: - Jumlah dan kualitas pelepasan ekspor (jika ada), diselaraskan dalam rangka menderong pelaku usaha UKM/IKM untuk ekspor</p> <p>- Jumlah pelaku usaha UKM/IKM yang menjadi ekspor/derah</p> <p>- Keterampilan infrastruktur dan kemampuan Balai Litbang Industri</p>	<p>1) Dapatkan dokumen/data: - RRI/MN 2015-2019 dan RRP tahun 2015, 2016 - RKA K/L/SRPP, RRP/APPD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kegiatan terkait yang pernah dilaksanakan mengenai kegiatan pengembangan UKM/IKM bidang ekspor, infrastruktur dan kemampuan/paran Balai Litbang Industri - Dokumen/data terkait lainnya</p> <p>2) Telah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pengembangan SDM bidang ekspor maupun target pendiliv/ pengembangan teknologi industri (jika ada) dan kondisi atau atau target/pemenuhannya (jika ada) terkait tercapainya/madainya/berhasilnya/keberhasilan/pemenuhannya</p> <p>3) Lakukan evaluasi kondisi pengembangan kegiatan pengembangan SDM bidang ekspor, kondisi keberadaan pelaku usaha ekspor, dan kondisi infrastruktur maupun kemampuan/ paran Balai Litbang Industri, serta identifikasi keberhasilan/pemenuhannya yang ada</p> <p>4) Lakukan konfirmasi/identifikasi kepada pejabat terkait mengenai capaian dan kondisi kegiatan pengembangan SDM bidang ekspor non migas, beserta pemenuhannya</p> <p>5) Lakukan infrastruktur dan kemampuan/paran Balai Litbang Industri</p> <p>6) Buat simpulan dan saran</p>
<p>TEO# 15a . Masih belum memadainya keberkahan infrastruktur dan penyaji/ kemampuan Balai Penelitian dan Pengembangan daya saing industri, khususnya bagi pelaku UKM/IKM</p>	<p>- RRI/MN 2015, 2019 (program/kegiatan dan targetnya) - RRP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA K/L/SRPP, RRP/APPD 2015, 2016</p>	<p>Capaian target: - Tercapainya target pembangunan dan fasilitas kawasan industri dan sentra industri kecil menengah di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua (jika ada) - Tercapainya target pengembangan fasilitas industri kecil dan menengah (jika ada)</p> <p>Kondisi/pemenuhan: - Telah/ belum memadainya pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah - Telah/ belum optimalnya upaya fasilitas pengembangan produk-produk UKM/IKM</p>	<p>> Untuk memastikan tercapainya target, pembangunan dan fasilitas kawasan industri dan sentra industri kecil menengah maupun target pengembangan fasilitas industri kecil menengah</p> <p>> Untuk mengetahui kondisi kegiatan pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitas pengembangan produk UKM/IKM</p>	<p>1) Dapatkan dokumen/data: - RRI/MN 2015-2019 dan RRP tahun 2015, 2016 - RKA K/L/SRPP, RRP/APPD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kegiatan terkait yang pernah dilaksanakan mengenai kegiatan pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitas pengembangan produk UKM/IKM</p> <p>2) Telah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pembangunan dan fasilitas kawasan industri dan sentra industri kecil menengah maupun target pengembangan fasilitas industri kecil menengah (jika ada) dan kondisi atau atau target/pemenuhannya (jika ada) terkait tercapainya/madainya/berhasilnya/keberhasilan/pemenuhannya</p> <p>3) Lakukan evaluasi kondisi pengembangan kegiatan pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitas pengembangan produk UKM/IKM serta identifikasi keberhasilan/pemenuhannya yang ada</p> <p>4) Lakukan konfirmasi/identifikasi kepada pejabat terkait mengenai capaian dan kondisi kegiatan pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitas pengembangan produk UKM/IKM</p> <p>5) Buat simpulan dan saran</p>
<p>TEO# 16a . Belum adanya/memadainya pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah kawasan industri maupun sentra industri, sehingga berakibat rendahnya kualitas produk ekspor daerah</p>	<p>- RRI/MN 2015, 2019 (program/kegiatan dan targetnya) - RRP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA K/L/SRPP, RRP/APPD 2015, 2016</p>	<p>Capaian target: - Tercapainya target pembangunan dan fasilitas kawasan industri dan sentra industri kecil menengah di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua (jika ada) - Tercapainya target pengembangan fasilitas industri kecil dan menengah (jika ada)</p> <p>Kondisi/pemenuhan: - Telah/ belum memadainya pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah - Telah/ belum optimalnya upaya fasilitas pengembangan produk-produk UKM/IKM</p>	<p>> Untuk memastikan tercapainya target, pembangunan dan fasilitas kawasan industri dan sentra industri kecil menengah maupun target pengembangan fasilitas industri kecil menengah</p> <p>> Untuk mengetahui kondisi kegiatan pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitas pengembangan produk UKM/IKM</p>	<p>1) Dapatkan dokumen/data: - RRI/MN 2015-2019 dan RRP tahun 2015, 2016 - RKA K/L/SRPP, RRP/APPD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kegiatan terkait yang pernah dilaksanakan mengenai kegiatan pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitas pengembangan produk UKM/IKM</p> <p>2) Telah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pembangunan dan fasilitas kawasan industri dan sentra industri kecil menengah maupun target pengembangan fasilitas industri kecil menengah (jika ada) dan kondisi atau atau target/pemenuhannya (jika ada) terkait tercapainya/madainya/berhasilnya/keberhasilan/pemenuhannya</p> <p>3) Lakukan evaluasi kondisi pengembangan kegiatan pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitas pengembangan produk UKM/IKM serta identifikasi keberhasilan/pemenuhannya yang ada</p> <p>4) Lakukan konfirmasi/identifikasi kepada pejabat terkait mengenai capaian dan kondisi kegiatan pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitas pengembangan produk UKM/IKM</p> <p>5) Buat simpulan dan saran</p>
<p>TEO# 16b . Belum optimalnya upaya fasilitas pengembangan produk-produk UKM/IKM yang berorientasi ekspor</p>	<p>- RRI/MN 2015, 2019 (program/kegiatan dan targetnya) - RRP 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA K/L/SRPP, RRP/APPD 2015, 2016</p>	<p>Capaian target: - Tercapainya target pembangunan dan fasilitas kawasan industri dan sentra industri kecil menengah di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua (jika ada) - Tercapainya target pengembangan fasilitas industri kecil dan menengah (jika ada)</p> <p>Kondisi/pemenuhan: - Telah/ belum memadainya pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah - Telah/ belum optimalnya upaya fasilitas pengembangan produk-produk UKM/IKM</p>	<p>> Untuk memastikan tercapainya target, pembangunan dan fasilitas kawasan industri dan sentra industri kecil menengah maupun target pengembangan fasilitas industri kecil menengah</p> <p>> Untuk mengetahui kondisi kegiatan pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitas pengembangan produk UKM/IKM</p>	<p>1) Dapatkan dokumen/data: - RRI/MN 2015-2019 dan RRP tahun 2015, 2016 - RKA K/L/SRPP, RRP/APPD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kegiatan terkait yang pernah dilaksanakan mengenai kegiatan pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitas pengembangan produk UKM/IKM</p> <p>2) Telah dokumen/data dimaksud, dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tercapainya target pembangunan dan fasilitas kawasan industri dan sentra industri kecil menengah maupun target pengembangan fasilitas industri kecil menengah (jika ada) dan kondisi atau atau target/pemenuhannya (jika ada) terkait tercapainya/madainya/berhasilnya/keberhasilan/pemenuhannya</p> <p>3) Lakukan evaluasi kondisi pengembangan kegiatan pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitas pengembangan produk UKM/IKM serta identifikasi keberhasilan/pemenuhannya yang ada</p> <p>4) Lakukan konfirmasi/identifikasi kepada pejabat terkait mengenai capaian dan kondisi kegiatan pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah, maupun upaya fasilitas pengembangan produk UKM/IKM</p> <p>5) Buat simpulan dan saran</p>

PENGEMBANGAN PASAR EKSPOR

TEMATIF EVALUATION OBJECTIVE (TEO)	KRITERIA TERKAIT TEO	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TUJUAN EVALUASI	LANGKAH KERJA
<p>TEO# 17 - Kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor. Kemampuan untuk produk UKM/IKM masih bersifat eksklusif dan belum terintegrasi sehingga belum optimal dalam mendukung kegiatan promosi ekspor nasional</p>	<p>- R/INN 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) - R/RY 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA KJ/SNPD, RRPD/AFBD 2015, 2016</p>	<p>Capaian target: - Terpapanya target pameran dagang dan promosi ekspor, baik di dalam negeri maupun luar negeri (jika ada) Kondisi/Permasalahan: - Tidak/belum optimalnya kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya untuk produk UKM/IKM</p>	<p>> Untuk memastikan tercapainya target pameran dagang dan promosi ekspor, baik di dalam negeri maupun luar negeri sesuai target yang telah ditetapkan - Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) > Untuk mengetahui kondisi perkembangan kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya untuk produk UKM/IKM</p>	<p>1) Depdikn dakumasi/dase: - R/UMN 2015-2019 dan RFP tahun 2015, 2016 - RKA KJ/SNPD, RRPD/AFBD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait pengembangan dan promosi citra ekspor (jika ada) 2) Depkumasi/dase terkait pameran dagang dan promosi untuk mengidentifikasi tercapainya target pengembangan dan promosi citra ekspor 3) Uraian kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan 4) Lakukan evaluasi kondisi perkembangan kegiatan pengembangan promosi citra ekspor, dan identifikasi keterbatasan/permasalahan yang ada > Apakah kegiatan pameran dagang maupun promosi ekspor telah dilaksanakan secara rutin > Bagaimana efektivitas kegiatan pameran dagang maupun promosi ekspor telah mendorong peningkatan produk maupun pasar ekspor 4) Bagaimana peran pemerintah, dll... 5) Bagaimana komitmen/dedikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi perkembangan kegiatan pengembangan promosi dan citra ekspor Buat simpulan dan saran</p>
<p>TEO# 18a - Kurangnya/belum optimalnya upaya pemertintah dalam meningkatkan kerjasama di bidang pengembangan ekspor-baik dengan pihak luar negeri maupun dalam negeri</p>	<p>- R/INN 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) - R/RY 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA KJ/SNPD, RRPD/AFBD 2015, 2016</p>	<p>Capaian target: - Terpapanya target kerjasama pengembangan ekspor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (jika ada) - Teregapnya target fasilitas perdagangan luar negeri daerah (jika ada) Kondisi/Permasalahan: - Tidak/belum optimalnya upaya peningkatan kerjasama perdagangan bilateral maupun multilateral - Tidak/belum optimalnya peran pemertintah daerah dalam fasilitas pengembangan ekspor nasional, khususnya bagi pelaku UKM/IKM di daerah</p>	<p>> Untuk memastikan tercapainya target kerjasama pengembangan ekspor-baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan target fasilitas perdagangan luar negeri daerah > Untuk mengetahui kondisi perkembangan kegiatan kerjasama pengembangan ekspor (termasuk kerjasama perdagangan bilateral/multilateral, dan kegiatan peran pemerintah dalam fasilitas pengembangan ekspor khususnya bagi pelaku UKM/IKM)</p>	<p>1) Depdikn dakumasi/dase: - R/UMN 2015-2019, dan RFP tahun 2015, 2016 - RKA KJ/SNPD, RRPD/AFBD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait kerjasama pengembangan ekspor (termasuk kerjasama perdagangan bilateral/multilateral, dan kegiatan fasilitasi pengembangan ekspor 2) Depkumasi/dase terkait pameran dagang dan promosi untuk mengidentifikasi tercapainya target kerjasama pengembangan ekspor 3) Uraian kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan 4) Lakukan evaluasi kondisi keterbatasan/permasalahan terkait: - perkembangan kerjasama pengembangan ekspor oleh pemerintah, dan apakah terdapat target terkait kerjasama/ - upaya/peran pemerintah dalam fasilitasi pengembangan ekspor, khususnya bagi pelaku UKM/IKM 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi perkembangan kerjasama maupun fasilitas pengembangan ekspor oleh pemerintah, beserta permasalahannya Buat simpulan dan saran</p>
<p>TEO# 18b - Kurangnya upaya peningkatan kerjasama perdagangan di Forum ASEAN, APEC dan Organisasi Internasional Lainnya</p>	<p>- R/INN 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) - R/RY 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA KJ/SNPD, RRPD/AFBD 2015, 2016</p>	<p>Capaian target: - Teregapnya target citra produk ekspor (jika ada) Kondisi/Permasalahan: - Tidak/belum optimalnya kegiatan pemertintahan produk ekspor, khususnya bagi UKM/IKM - Keterbatasan produk ekspor UKM/IKM telah/belum terdapat/pelebaran apresiasi/penghargaan terhadap inovasi produk industri dalam negeri</p>	<p>> Untuk memastikan tercapainya target kegiatan pemertintahan produk ekspor (jika ada) > Untuk mengetahui kondisi perkembangan citra produk pasar (jantan internasional, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) > Untuk mengetahui kondisi perkembangan citra produk pasar (jantan internasional, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) > Untuk mengetahui kondisi perkembangan citra produk ekspor (jika ada) dan apakah terdapat apresiasi/penghargaan terhadap inovasi produk industri dalam negeri</p>	<p>1) Depdikn dakumasi/dase: - R/UMN 2015-2019 dan RFP tahun 2015, 2016 - RKA KJ/SNPD, RRPD/AFBD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait capaian pemertintahan produk ekspor (jantan internasional, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) 2) Depkumasi/dase terkait pameran dagang dan promosi untuk mengidentifikasi tercapainya target pemertintahan produk ekspor/endorsement 3) Uraian kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan 4) Lakukan evaluasi atas kondisi citra produk ekspor, persisapan busana produk ekspor, maupun target apresiasi terhadap inovasi produk ekspor non migas > Bagaimana peran pemerintah dalam upaya mendorong tercapainya citra produk ekspor non migas > ... di ... 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi produk ekspor non migas dimaksud, beserta Buiat simpulan dan saran</p>
<p>TEO# 19a - Kurangnya/belum optimalnya kegiatan pemertintahan produk ekspor. Kemampuan produk UKM/IKM sehingga citra produk ekspor (nasion branding) masih relatif rendah</p>	<p>- R/INN 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) - R/RY 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA KJ/SNPD, RRPD/AFBD 2015, 2016</p>	<p>Capaian target: - Teregapnya target citra produk ekspor (jika ada) Kondisi/Permasalahan: - Tidak/belum optimalnya kegiatan pemertintahan produk ekspor, khususnya bagi UKM/IKM - Keterbatasan produk ekspor UKM/IKM telah/belum terdapat/pelebaran apresiasi/penghargaan terhadap inovasi produk industri dalam negeri</p>	<p>> Untuk memastikan tercapainya target kegiatan pemertintahan produk ekspor (nasion branding, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) > Untuk mengetahui kondisi perkembangan citra produk ekspor (nasion branding, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) > Untuk mengetahui kondisi perkembangan citra produk ekspor (nasion branding, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) > Untuk mengetahui kondisi perkembangan citra produk ekspor (nasion branding, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016)</p>	<p>1) Depdikn dakumasi/dase: - R/UMN 2015-2019 dan RFP tahun 2015, 2016 - RKA KJ/SNPD, RRPD/AFBD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait capaian pemertintahan produk ekspor (nasion branding, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) 2) Depkumasi/dase terkait pameran dagang dan promosi untuk mengidentifikasi tercapainya target pemertintahan produk ekspor/endorsement 3) Uraian kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan 4) Lakukan evaluasi atas kondisi citra produk ekspor, persisapan busana produk ekspor, maupun target apresiasi terhadap inovasi produk ekspor non migas > Bagaimana peran pemerintah dalam upaya mendorong tercapainya citra produk ekspor non migas > ... di ... 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi produk ekspor non migas dimaksud, beserta Buiat simpulan dan saran</p>
<p>TEO# 19b - Keberadaan produk ekspor UKM/IKM kurang/tidak kompetitif (jumlah produk ekspor berkualitas terbatas, harga tidak murah dan/atau tidak sebanding kualitas produk)</p>	<p>- R/INN 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) - R/RY 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA KJ/SNPD, RRPD/AFBD 2015, 2016</p>	<p>Capaian target: - Teregapnya target citra produk ekspor (jika ada) Kondisi/Permasalahan: - Tidak/belum optimalnya kegiatan pemertintahan produk ekspor, khususnya bagi UKM/IKM - Keterbatasan produk ekspor UKM/IKM telah/belum terdapat/pelebaran apresiasi/penghargaan terhadap inovasi produk industri dalam negeri</p>	<p>> Untuk memastikan tercapainya target kegiatan pemertintahan produk ekspor (nasion branding, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) > Untuk mengetahui kondisi perkembangan citra produk ekspor (nasion branding, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) > Untuk mengetahui kondisi perkembangan citra produk ekspor (nasion branding, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) > Untuk mengetahui kondisi perkembangan citra produk ekspor (nasion branding, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016)</p>	<p>1) Depdikn dakumasi/dase: - R/UMN 2015-2019 dan RFP tahun 2015, 2016 - RKA KJ/SNPD, RRPD/AFBD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait capaian pemertintahan produk ekspor (nasion branding, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) 2) Depkumasi/dase terkait pameran dagang dan promosi untuk mengidentifikasi tercapainya target pemertintahan produk ekspor/endorsement 3) Uraian kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan 4) Lakukan evaluasi atas kondisi citra produk ekspor, persisapan busana produk ekspor, maupun target apresiasi terhadap inovasi produk ekspor non migas > Bagaimana peran pemerintah dalam upaya mendorong tercapainya citra produk ekspor non migas > ... di ... 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi produk ekspor non migas dimaksud, beserta Buiat simpulan dan saran</p>
<p>TEO# 19c - Kurangnya tingkat apresiasi maupun penghargaan terhadap inovasi produk industri dalam negeri yang berkontribusi ekspor</p>	<p>- R/INN 2015-2019 (program/kegiatan dan targetnya) - R/RY 2015, 2016 (program/kegiatan dan targetnya) - RKA KJ/SNPD, RRPD/AFBD 2015, 2016</p>	<p>Capaian target: - Teregapnya target citra produk ekspor (jika ada) Kondisi/Permasalahan: - Tidak/belum optimalnya kegiatan pemertintahan produk ekspor, khususnya bagi UKM/IKM - Keterbatasan produk ekspor UKM/IKM telah/belum terdapat/pelebaran apresiasi/penghargaan terhadap inovasi produk industri dalam negeri</p>	<p>> Untuk memastikan tercapainya target kegiatan pemertintahan produk ekspor (nasion branding, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) > Untuk mengetahui kondisi perkembangan citra produk ekspor (nasion branding, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) > Untuk mengetahui kondisi perkembangan citra produk ekspor (nasion branding, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) > Untuk mengetahui kondisi perkembangan citra produk ekspor (nasion branding, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016)</p>	<p>1) Depdikn dakumasi/dase: - R/UMN 2015-2019 dan RFP tahun 2015, 2016 - RKA KJ/SNPD, RRPD/AFBD tahun 2015, 2016 - Laporan kegiatan/kinerja terkait capaian pemertintahan produk ekspor (nasion branding, sesuai target yang telah ditetapkan (Ref: Tagri RI/UMN/RFP, RKA KJ/SNPD 2015, 2016) 2) Depkumasi/dase terkait pameran dagang dan promosi untuk mengidentifikasi tercapainya target pemertintahan produk ekspor/endorsement 3) Uraian kegiatan dimaksud tidak ada target/perencanaannya maupun tidak tercapai targetnya, maka identifikasi sebagai permasalahan 4) Lakukan evaluasi atas kondisi citra produk ekspor, persisapan busana produk ekspor, maupun target apresiasi terhadap inovasi produk ekspor non migas > Bagaimana peran pemerintah dalam upaya mendorong tercapainya citra produk ekspor non migas > ... di ... 4) Lakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pejabat terkait mengenai kondisi produk ekspor non migas dimaksud, beserta Buiat simpulan dan saran</p>

Lampiran Pedoman Nomor 2

TENTATIVE EVALUATION OBJECTIVE (TEO)	KRITERIA TERKAIT TEO	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TUJUAN EVALUASI	LANGKAH KERJA
<p>TEO# 23 - Kementerian teknis maupun Pemda belum memiliki/menyelenggarakan sistem informasi (database) terkait informasi ekspor (produk ekspor, pelaku ekspor, pasar ekspor) secara akurat dan update</p>		<p>Kondisi/terpenuhi: - Kementerian teknis maupun Pemda telah/belum memiliki/menyelenggarakan sistem informasi (database) yang akurat/valid terkait ekspor dan telah dilakukan update nya secara berkala</p>	<p>> Untuk menambahi/menyediakan bahwa Kementerian teknis maupun Pemda telah memiliki/menyelenggarakan sistem informasi (database) yang akurat/valid terkait ekspor dan telah dilakukan update nya secara berkala</p>	<p>1) Bandingkan dokumen dan/atau aplikasi terkait database ekspor, baik di tingkat Kementerian teknis maupun pemerintah daerah 2) Telah dokumen/aplikasi database dimaksud untuk mengetahui akurat data-data terkait pengembangan ekspor (produk ekspor, pelaku ekspor, pasar ekspor) 3) Lakukan verifikasi/konfirmasi kepada pejabat terkait mengenai keakuratan database ekspor dan mekanisme update yang dilakukan 4) Buat simpulan dan saran</p>
<p>5 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN</p> <p>TEO# 24 - Kementerian teknis maupun Pemda belum melaksanakan monitoring atau evaluasi terhadap kegiatan pembangunan hasil (output/outcome) program/kegiatan pengembangan ekspor secara memadai tidak ada laporan kegiatan monitoring dan tindak lanjutnya</p>		<p>Kondisi/terpenuhi: - Kementerian teknis maupun Pemda telah/ belum memonitor/mengawasi/capaian output/outcome program/kegiatan pengembangan ekspor nasional (baik secara parsial di masing-masing subder maupun secara keseluruhan program/kegiatan lintas sektoral)</p>	<p>> Untuk menambahi/menyediakan bahwa Kementerian teknis maupun Pemda telah melaksanakan monitoring/evaluasi terhadap kegiatan pembangunan ekspor nasional (baik secara parsial di masing-masing subder maupun secara keseluruhan program/kegiatan lintas sektoral)</p>	<p>1) Bandingkan hasil terdapat input, laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan ekspor, beserta proses tindak lanjutnya terhadap capaian output/outcome program/kegiatan pengembangan ekspor 2) Telah dokumen-dokumen dimaksud, untuk mengetahui hasil monitoring/evaluasi dan seputarnya respon/tindak lanjut yang telah dilaksanakan 3) Lakukan verifikasi/konfirmasi kepada pejabat terkait mengenai keakuratan laporan monitoring/evaluasi dan respon untuk laporan yang telah dihasilkan 4) Buat simpulan dan saran</p>
<p>TEO# 25 - Inspektorat Kementerian teknis maupun Pemda (ATP) belum melaksanakan evaluasi terhadap secara memadai atas program/kegiatan pengembangan ekspor nasional (baik secara parsial di masing-masing subder maupun secara keseluruhan program/kegiatan lintas sektoral)</p>		<p>Kondisi/terpenuhi: - Inspektorat Kementerian teknis maupun Pemda (ATP) telah/ belum melaksanakan pengawasan atas program/kegiatan pengembangan ekspor nasional (baik secara parsial di masing-masing subder maupun secara keseluruhan program/kegiatan lintas sektoral)</p>	<p>> Untuk menambahi/menyediakan bahwa Inspektorat Kementerian teknis maupun Pemda (ATP) telah melaksanakan pengawasan atas program/kegiatan pengembangan ekspor nasional (baik secara parsial di masing-masing subder maupun secara keseluruhan program/kegiatan lintas sektoral)</p>	<p>1) Bandingkan laporan hasil pengawasan oleh ATP atas program/kegiatan pengembangan ekspor, beserta proses tindak lanjutnya 2) Telah dokumen-dokumen dimaksud, untuk mengetahui hasil pengawasan dan seputarnya tindak lanjut yang telah dilaksanakan 3) Lakukan verifikasi/konfirmasi kepada pejabat terkait mengenai proses dan hasil kegiatan pengawasan beserta tindak lanjutnya 4) Buat simpulan dan saran</p>

PEMERINTAH PROVINSI
MATRIKS HASIL EVALUASI ATAS PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
 TAHUN 2016

Aspek Evaluasi	No	Tentative Evaluation Objectives (TEO)	Hasil Evaluasi		Judul	Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Saran
			Terbukti	Tidak Terbukti						
1a Kebijakan Pengembangan Produk Ekspor	1	TEO#1a, Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang menetapkan jenis-jenis produk unggulan daerah (a.l. Klastering produk pertanian, ketahanan, industri, pertambangan, dll), sesuai karakteristik potensi daerah, sebagai dasar/acuan pengembangan produk ekspor (termasuk diversifikasi produk ekspor)		1)						
	2	TEO#1b, Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai insentif permodalan produksi dan/atau bantuan teknis proses produksi, khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan produk ekspor non migas		2)						
	3	TEO#1c, Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai standarisasi kualitas produk ekspor (termasuk desain branding/ packing dan Pengurusan HKJ), khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan produk ekspor non migas		...]						
	4	TEO#2, Adanya ketidaksihronan (disharmonisasi tumpang tindih) atas kebijakan/regulasi terkait pengembangan produk ekspor								
1b Kebijakan Pengembangan Pasar Ekspor	5	TEO#3a, Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai kemudahan investasi/berusaha dan perijinan ekspor, khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan produk ekspor non migas								
	6	TEO#3b, Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai mekanisme/tatacara pembinaan dan pemberdayaan UKM/IKM yang berorientasi ekspor untuk pengembangan ekspor nasional/daerah								
	7	TEO#3c, Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai proses/mekanisme kegiatan diseminasi dan pemanfaatan informasi pasar ekspor (market intelligence/ market brief), khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan pasar ekspor								

Aspek Evaluasi	No	Tentative Evaluation Objectives (TEO)	Hasil Evaluasi		Uraian Hasil Evaluasi										
			Terbukti	Tidak Terbukti	Judul	Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Saran					
	8	TEO#3d, Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai proses/mekanisme kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan pasar ekspor													
	9	TEO#3e, Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai proses/mekanisme kegiatan fasilitasi kerjasama UKM/IKM yang berorientasi ekspor dengan usaha besar, Kadin, lembaga pendidikan/penelitian, dan asosiasi industri/profesi													
	10	TEO#4, Adanya ketidakjelasan/ketidaksihronoran (disharmonisasi tumpang tindih) atas kebijakan/regulasi terkait pengembangan pasar ekspor													
2 Efektivitas Kembangaan Ekspor	11	TEO#5a, Belum adanya penetapan kelembangaan ekspor secara jelas yang bertanggung jawab dalam sinkronisasi dan efektivitas koordinasi program/kegiatan pengembangan ekspor nasional secara terintegrasi, baik di tingkat pemerintah pusat/daerah													
	12	TEO#5b, Kelembagaan dan pengelolaan program/kegiatan terkait pengembangan ekspor nasional masih bersifat sektoral/ parsial di masing-masing entitas (satker/unit satker), sehingga berisiko terhadap efektivitas tujuan program/kegiatan secara optimal													
	13	TEO#6a, Kementerian teknis terkait perdagangan, perindustrian, UMKM, dll) belum melaksanakan program/kegiatan terkait pengembangan ekspor nasional secara optimal sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya													
	14	TEO#6b, Tim Teknis Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Pusat/Daerah ~ PEPI/PEPIDA) yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan peningkatan ekspor dan investasi belum dibentuk/ditetapkan, atau Tim PEPI/PEPIDA telah dibentuk namun belum berperan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terkait pengembangan ekspor nasional													

Lampiran Pedoman Nomor 3

Aspek Evaluasi	No	Tentative Evaluation Objectives (TEO)	Hasil Evaluasi		Uraian Hasil Evaluasi								
			Terbukti	Tidak Terbukti	Judul	Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Saran			
	15	TEO#7, Pemerintah daerah (provinsi, kab/kota) tidak menetapkan program/kegiatan pengembangan ekspor sesuai karakteristik/ potensi daerahnya (sebagai urusan pilihan daerah) dalam rangka mendukung program pengembangan ekspor nasional (prioritas nasional)											
3 Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan	16	TEO#8, Belum ditetapkan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional/Daerah (RIPIN/D) maupun Kebijakan Industri Nasional (KIN) sebagai perencanaan strategis pemerintah dalam pengembangan industri											
	17	TEO#9a, Program/kegiatan terkait pengembangan ekspor (yang tertuang dalam RKA KL/SKPD, RKPD/APBD) belum sepenuhnya sinkron dan selaras dengan program/kegiatan prioritas nasional (RJMN/RKP), baik secara nomentklatur maupun substansi target output/outcome, atau Kementerian teknis maupun pemda tidak mengakomodasi sebagian besar program/kegiatan prioritas dalam RJMN/RKP (- misal, hanya fokus dg kegiatan promosi/pameran dg anggaran yang terbatas)											
	18	TEO#9b, Penetapan target/sasaran output/outcome program/kegiatan pengembangan ekspor (yang tertuang dalam RKA KL/SKPD, RKPD/APBD) belum sepenuhnya didukung sumber data yang jelas/akurat											
	19	TEO#10, Belum adanya/belum memadainya sistem informasi (database) yang akurat/jelas dan terintegrasi terkait data/informasi pengembangan ekspor nasional, baik di tingkat pusat/d daerah											
4a Pelaksanaan Program/Kegiatan - Pengembangan Produk Ekspor	20	TEO#11, Capaian pertumbuhan barang ekspor non migas (berupa a.l. pertanian, kehutanan, industri, dll), khususnya produk ekspor dari UMKM belum optimal sesuai target yang ditetapkan, baik secara nasional/d daerah											
	21	TEO#12a, Belum adanya/belum optimalnya upaya standarisasi kualitas produk ekspor non migas guna mendorong peningkatan daya saing produk ekspor UMKM di pasar ekspor											

Lampiran Pedoman Nomor 3

Lampiran Pedoman Nomor 3

Aspek Evaluasi	No	Tentative Evaluation Objectives (TEO)	Hasil Evaluasi		Judul	Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Saran
			Terbukti	Tidak Terbukti						
	22	TEO#12b, Pengelolaan produk ekspor non migas, berupa produk pertanian, kehutanan, dan industri belum optimal (belum adanya standarisasi produk)								
	23	TEO#13, Kurangnya/belum optimalnya insentif permodalan/ pembiayaan produksi maupun bantuan teknis produksi bagi UKM/IKM, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Lembaga Pembiayaan/Dunia Usaha								
	24	TEO#14a, Kurangnya/belum optimalnya diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas dalam rangka meningkatkan daya saing (pertumbuhan) ekspor non migas (baik di Pasar Utama maupun Pasar Prospektif)								
	25	TEO#14b, Belum optimalnya upaya revitalisasi dan pengembangan pengolahan industri berbasis agro (produk hasil hutan, perkebunan, perikanan, dll) dalam rangka diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas								
	26	TEO#15a, Jumlah dan kualitas pelatihan ekspor dalam rangka mendorong pelaku usaha UKM/IKM untuk ekspor maupun mencetak para eksportir baru kurang memadai (materi pelatihan belum berorientasi ekspor)								
	27	TEO#15b, Banyak pelaku usaha UKM/IKM yang masih belum berorientasi ekspor (jumlah eksportir UMKM di daerah masih terbatas), atau Belum memadainya kemampuan dan keterampilan eksportir daerah dalam bidang ekspor dan promosi								
	28	TEO#15c, Masih belum memadainya keberadaan infrastruktur dan peran/kemampuan balai penelitian dalam upaya meningkatkan daya saing industri, khususnya bagi pelaku UKM/IKM								
	29	TEO#16a, Belum adanya/memadainya pengembangan fasilitas pengolahan industri di daerah (kawasan industri maupun sentra industri), sehingga bersiko rendahnya kualitas produk ekspor daerah								
	30	TEO#16b, Belum optimalnya upaya fasilitasi pengembangan produk-produk UKM/IKM yang berorientasi ekspor								
4b Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengembangan Pasar Ekspor	31	TEO#17, Kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya untuk produk UKM/IKM masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi, sehingga belum optimal dalam mendukung kegiatan promosi ekspor nasional								

Lampiran Pedoman Nomor 3

Aspek Evaluasi	No	Tentative Evaluation Objectives (TEO)	Uraian Hasil Evaluasi								
			Hasil Evaluasi	Judul	Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Saran		
			Terbukti	Tidak Terbukti							
	32	TEO# 32a. Ketersediaan/bedung pengolahan gasa penerapannya dalam meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan ekspor, baik dengan pihak luar negeri maupun dalam negeri									
	33	TEO# 33b. Ketersediaan sarana perdagangan kerjasama perdagangan bilateral maupun multilateral melalui proses sertifikasi									
	34	TEO# 34c. Ketersediaan upaya peningkatan kerjasama perdagangan di Forum ASFAK, APPE, dan Organisme Internasional lainnya									
	35	TEO# 35d. Adanya keterdewasaan program teknik yang baru maupun yang ada sejak dari awal hasil kerjasama perdagangan internasional									
	36	TEO# 36c. Adanya opsi/alternatif sarana perantara dalam sarana sarana perdagangan ekspor nasional									
	37	TEO# 37a. Ketersediaan/bedung opsi/alternatif kegiatan pemasaran produk ekspor khususnya produk CMA/INA melalui cara ekspor (aspek teknis) perdagangan hasil pertanian									
	38	TEO# 38b. Ketersediaan produk ekspor UAS/INA kerajinan/hasil komoditas ekspor (aspek teknis) berdasarkan kualitas, harga, daya saing dan/atau tidak bergantung kualitas produk									
	39	TEO# 39c. Ketersediaan tingkat apresiasi masyarakat terhadap berbagai alternatif promosi produk industri lainnya yang ada di pasar internasional ekspor									
	40	TEO# 40a. Kualitas dan kuantitas program informasi ekspor kerjasama dengan lembaga usaha ekspor (aspek teknis) dan/atau lembaga lainnya									
	41	TEO# 41b. Keterampilan intelektual di bidang ekspor melalui bidang pemasaran, strategi pemasaran, relasi/budaya sopan dan/atau sikap ekspor									
	42	TEO# 42c. Keterampilan upaya pemasaran dan perdagangan dengan badan ke-satuan ekspor kerjasama UAS/INA									
	43	TEO# 43d. Adanya adanya ke-luasan perdagangan di bidang sektor perdagangan dari pemerintah kabupaten/kota/korporasi, ASN, lembaga penelitian, lembaga penelitian ekspor									
	44	TEO# 44. Ketersediaan/bedung opsi/alternatif kegiatan perdagangan melalui promosi dari perdagangan ekspor dalam rangka perdagangan sertifikasi (aspek teknis) migas									

Lampiran Pedoman Nomor 3

Aspek Evaluasi	No	Tentative Evaluation Objectives (TEO)	Hasil Evaluasi		Judul	Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Saran
			Terbukti	Tidak Terbukti						
5 Penatausahaan dan Pelaporan Program/ Kegiatan	45	TEO#22a, Kementerian teknis maupun Pemda belum menatausahakan/mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan terkait pengembangan ekspor secara tertib dan memadai								
	46	TEO#22b, Pengelolaan alokasi/anggaran program/kegiatan terkait pengembangan ekspor di daerah yang bersumber dana APBN (Dana Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan) belum dikoordinasikan/dilaporkan kepada pemerintah daerah secara memadai (kurang transparan)								
	47	TEO#23, Kementerian teknis maupun Pemda belum memiliki/ menyelenggarakan sistem informasi (database) terkait informasi ekspor (produksi ekspor, pelaku ekspor, pasar ekspor) secara akurat dan update								
6 Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan	48	TEO#24, Kementerian teknis maupun Pemda belum melaksanakan monitoring atas rencana, realisasi dan capaian hasil (output/ outcome) program/kegiatan pengembangan ekspor secara memadai (tidak ada laporan kegiatan monitoring dan tindak lanjutnya)								
	49	TEO#25, Inspektorat Kementerian teknis maupun Pemda (APIP) belum melaksanakan evaluasi terpisah secara memadai atas program/kegiatan pengembangan ekspor nasional, baik secara parsial di masing-masing Satker maupun secara keseluruhan program/kegiatan lintas sektoral								

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN IDENTIFIKASI PERMASALAHANNYA
PROGRAM LINTAS SEKTORAL - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
(Berdasarkan RPJMN 2015 - 2019)

Lampiran Pedoman Nomor 4

<p>4. Kebijakan Program pengembangan ekspor nasional dalam periode 2015 – 2019, yaitu:</p> <p>- Meningkatkan daya saing ekspor produk non migas nilai jasa bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.*</p> <p>- Strategi Program pengembangan ekspor nasional, yaitu:</p> <p>> Mengingat dan meningkatkan pangsa pasar produk Indonesia di pasar ekspor utama;</p> <p>> Mengidentifikasi peluang pasar ekspor di pasar prospektif;</p> <p>> Mengidentifikasi peluang pasar ekspor dari jasa potensial;</p> <p>> Meningkatkan nilai tambah ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk nasional</p>							
Sasaran Program		Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Keterangan	Pemmasalahan dan Risiko (TRC)	Ref.
<p>A. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL (per Kementerian Perdagangan s.d. Ditjen P2H)</p>							
>	Meningkatnya pertumbuhan barang ekspor non migas yang bernilai tambah dan jasa	Pertumbuhan ekspor non migas (%)	1. Pengembangan produk ekspor	Meningkatnya kualitas dan diversifikasi dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor di Pasar Utama maupun Pasar Prospektif	Produk ekspor	> Capaian pertumbuhan barang ekspor non migas (terutama a.l pertanian, kehutanan, industri, dll), khususnya produk ekspor dari UMKM belum optimal sesuai target yang ditetapkan baik secara nasional/ daerah	TEO#11
>						> Belum adanya/ belum optimalnya upaya standarisasi kualitas produk ekspor non migas guna mendorong peningkatan daya saing produk ekspor di pasar ekspor	TEO#12a
>						> Kurangnya/ belum optimalnya hasil pemaksimalan/ peningkatan produksi manapun bantuan teknis produksi bagi UMK/IKM, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun lembaga pembiayaan/Donasi Usaha	TEO#13
>						> Kurangnya/ belum optimalnya diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas dalam rangka meningkatkan daya saing (pertumbuhan) ekspor non migas (baik di Pasar Utama maupun Pasar Prospektif)	TEO#14a
>							
>							
>	Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor	Pertumbuhan ekspor non migas ke Pasar 2 Utama (%)	2. Pengembangan promosi dan citra	Meningkatnya hubungan dan nilai transaksi dengan	Pasar ekspor	> Kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya untuk produk UMK/IKM masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi, sehingga belum optimal dalam mendukung kegiatan promosi ekspor nasional	TEO#17
>						> Kurangnya/ belum optimalnya upaya pemertintah dalam meningkatkan kerjasama di bidang pengembangan ekspor, baik dengan pihak luar negeri maupun dalam negeri	TEO#18a
>						> Kurangnya/ belum optimalnya kegiatan pameran produk ekspor, khususnya produk UMK/IKM sehingga ekspor pameran bertarif masih relatif rendah	TEO#19a
>						> Keberadaan produk ekspor UMK/IKM kurang/ tidak komprehensif jumlah produk ekspor berkualitas terbatas, harga tidak murah dan/ atau tidak sebanding kualitas produk)	TEO#19b
>							
>							
>	Meningkatnya promosi citra produk ekspor (Nation Branding)	Pertumbuhan ekspor non migas produk Utama (%)	4. Pengembangan pasar dan informasi ekspor	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan informasi ekspor	Pasar ekspor	> Kualitas dan kuantitas pelayanan informasi ekspor, khususnya kepada pelaku usaha ekspor UMK/IKM belum memadai	TEO#20a
>							
>	Optimalnya Kelayakan Ekspor	Prospektivitas (%)	5. Peningkatan kualitas promosi dan kelayakan ekspor	Meningkatnya peran dunia usaha dan lembaga ekspor/jasa kecerdasan intelektual dan market brief/ ahli dunia usaha (pelaku usaha)	Pasar ekspor	> Kurang/ belum optimalnya capaian peningkatan kualitas promosi dan kelayakan ekspor dalam rangka mendorong peningkatan ekspor non migas	TEO#21

Lampiran Pedoman Nomor 4

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Keterangan	Pernyataan dan Risiko (TEC)	Risiko
		1. Pengembangan Kerja Sama Perdagangan Terapan dan Eksternal ASEAN	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun dan mengembangkan ASEAN Pasar Bebas dan Perindustrian Regional dan Perindustrian Perdagangan Internasional hasil-hasil perdagangan Indonesia di ASEAN dan dengan Negara mitra ASEAN - Meningkatkan kerjasama perdagangan Indonesia di zona ASEAN dan zona ASEAN regional melalui - Seminar dan Kampanye Indonesia di Bidang Perdagangan antara lain zona ASEAN ASEAN dan ASEAN + Mitra dalam, luar dan di seluruh regional 			
		2. Pergerakan Kerja Sama Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Membina kerja sama pasar di negara anggota APEC dan Organisasi Internasional Lainnya - Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan yang kondusif bagi Internal Indonesia dan lain-lain - Meningkatkan hasil-hasil perdagangan Indonesia di APEC dan Organisasi Internasional lainnya - Implementasi hasil-hasil perdagangan Indonesia di zona APEC dan Organisasi Internasional lainnya 			
		3. Pergerakan Kerja Sama Perdagangan di Forum ASEAN	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan dan meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia di ASEAN - Meningkatkan dan meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia di ASEAN - Meningkatkan dan meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia di ASEAN - Meningkatkan dan meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia di ASEAN 			
	<p>> Peningkatan realisasi dan Pemantauan hasil Kerja Sama Perdagangan Internasional</p> <p>2. Peningkatan atau Ekspor yang meningkatnya SDA, 70 persen, %</p>	<p>1. Pengembangan asosiasi industri</p> <p>2. Pengembangan asosiasi industri</p> <p>3. Pengembangan asosiasi industri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan 7 kawasan industri (KI) dan 11 rencana industri baru (RNI) di kawasan industri dan Kawasan - Meningkatkan 2 kawasan industri (KI) dan 15 rencana industri kecil (RNIC) di kawasan industri - Meningkatkan 7 kawasan industri (KI) dan 11 rencana industri kecil (RNIC) di kawasan industri - Meningkatkan 7 kawasan industri (KI) dan 11 rencana industri kecil (RNIC) di kawasan industri 	<p>2. Peningkatan atau Ekspor yang meningkatnya SDA, 70 persen, %</p>	<p>> Peningkatan atau Ekspor yang meningkatnya SDA, 70 persen, %</p>	<p>TEO-16a</p>
<p>B4. PROGRAM PENYUMBUTAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO (by Kementerian Perindustrian)</p>		<p>1. Kerja sama dan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan</p> <p>2. Inovasi dan pengembangan industri Minuman dan Tembakak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kerja sama dengan mitra industri 		<p>> Peningkatan atau Ekspor yang meningkatnya SDA, 70 persen, %</p>	<p>TEO-14b</p>

**INDIKATOR DAN TARGET/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM LINTAS SEKTORAL - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
(Berdasarkan RPJMN 2015 - 2019)**

Lampiran Pedoman Nomor 5

4. Indikator Program pengembangan ekspor nasional dalam periode 2015 - 2019, yaitu:
 - Mengembangkan daya saing ekspor produk non migas dan jasa bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
 - Meningkatkan jumlah ekspor nasional, yaitu:
 - o Meningkatkan nilai ekspor produk unggulan di pasar ekspor utama;
 - o Meningkatkan jumlah ekspor non migas produk unggulan di pasar ekspor utama;
 - o Meningkatkan jumlah ekspor produk unggulan di pasar ekspor utama;
 - o Meningkatkan jumlah ekspor produk unggulan di pasar ekspor utama;

Sasaran Program	Indikator Program	Target RPJMN/RKP			Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator (Referensi Target RPJMN/RKP Tahun 2015, 2019)
		Baseline Tn. 2015	Tn. 2016	Tn. 2019			
A. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL (by Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen PEN)							
1. Meningkatkan pertumbuhan ekspor non migas yang bernilai tambah dan jasa	1) Partisipasi ekspor non migas 5% 2) Partisipasi ekspor jasa 5% 3) Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor	8%	9,9%	14,3%	1	1. Meningkatkan kualitas dan daya saing ekspor melalui peningkatan daya saing produk ekspor di pasar ekspor utama melalui peningkatan daya saing produk ekspor di pasar ekspor utama	Jumlah referensi produk ekspor, kegiatan pengembangan produk ekspor, produk yang mendapat kualitas HNL, kegiatan pengembangan produk kreatif dan desain
		13-14% 44	13-15% 47	16-19% 52%	2	2. Meningkatkan nilai ekspor dan kontribusi ekspor	Jumlah promosi dagang luar negeri, partisipasi pameran dagang di dalam negeri, fasilitasi pengembangan pemasaran ekspor
2. Meningkatkan diversifikasi pasar dan produk ekspor	1) Partisipasi ekspor non migas ke pasar utama 5% 2) Partisipasi ekspor non migas di pasar potensial 5% 3) Partisipasi ekspor non migas produk unggulan 5%	3,7%	11,9%	18%	1	1. Meningkatkan nilai ekspor ekspor	Jumlah kegiatan pameran, jumlah nasib keberhasilan kegiatan pengembangan ekspor di luar negeri dan dalam negeri, akurasi/diagnosis hasil kerjasama pengembangan ekspor dalam negeri dan luar negeri, monitoring
		42-46	46-47	49-50	2	2. Meningkatkan jumlah dan kualitas ekspor dalam pengembangan ekspor non migas	Jumlah kegiatan informasi ekspor bagi pelaku usaha, informasi pasar ekspor, peningkatan layanan pelaku usaha
3. Meningkatkan promosi oleh produk ekspor (Nasional dan Internasional)	1) Partisipasi ekspor non migas produk unggulan 5% 2) Partisipasi ekspor non migas produk unggulan 5% 3) Partisipasi ekspor non migas produk unggulan 5%	3,9%	8%	13,9%	1	1. Meningkatkan kualitas dan kontribusi ekspor internasional	Jumlah kegiatan informasi ekspor, promosi ekspor
		42-46	46-47	49-50	2	2. Meningkatkan jumlah dan kualitas ekspor dalam pengembangan ekspor non migas	Jumlah pelatihan yang berorientasi ekspor, pengembangan kurikulum dan metode di luar negeri, kegiatan EBEPFI, kerjasama di luar negeri, kegiatan pembinaan alumni di luar negeri
4. Optimalisasi Keterampilan Ekspor	1) Meningkatkan keterampilan ekspor pasar pasar potensial dan pasar ekspor unggulan 2) Meningkatkan keterampilan ekspor pasar pasar potensial dan pasar ekspor unggulan 3) Meningkatkan keterampilan ekspor pasar pasar potensial dan pasar ekspor unggulan	300	630	1.100	1	1. Meningkatkan keterampilan ekspor pasar pasar potensial dan pasar ekspor unggulan	Jumlah jumlah kegiatan ekspor produk pertanian dan kehutanan
		2	2	1	2	2. Meningkatkan keterampilan ekspor pasar pasar potensial dan pasar ekspor unggulan	Jumlah jumlah kegiatan ekspor produk industri dan kehutanan
B. PROGRAM LINTAS SEKTOR TERKAIT PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL							
BI. PROGRAM PENINGKATAN PERSAINGAN LINTAS SEKTORAL (by Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen ...)							
1. Meningkatkan pertumbuhan ekspor dan jasa	1) Meningkatkan pertumbuhan ekspor produk unggulan dan jasa 2) Meningkatkan pertumbuhan ekspor produk unggulan dan jasa 3) Meningkatkan pertumbuhan ekspor produk unggulan dan jasa	3,7%	6%	7,5%	1	1. Meningkatkan pertumbuhan ekspor produk unggulan dan jasa	Jumlah referensi produk ekspor, kegiatan pengembangan produk ekspor, produk yang mendapat kualitas HNL, kegiatan pengembangan produk kreatif dan desain
		9%	9,3%	8%	2	2. Meningkatkan pertumbuhan ekspor produk unggulan dan jasa	Jumlah referensi produk ekspor, kegiatan pengembangan produk ekspor, produk yang mendapat kualitas HNL, kegiatan pengembangan produk kreatif dan desain

Lampiran Pedoman Nomor 5

Sasaran Program	Indikator Program	Target RPJMN/RKP			Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator (Referensi Target RPJMN/RKP Tahun 2015-2019)
		Th. 2015	Th. 2016	Th. 2019			
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan (dan) meningkatkan kepuasan	1) Persentase penyelesaian keluhan konsumen 2) Persentase keluhan konsumen yang ditangani secara efektif 3) Persentase keluhan konsumen yang ditangani secara efisien	70%	80%	90%	1) Meningkatkan efisiensi ekspor 2) Meningkatkan kualitas ekspor	1) Meningkatkan efisiensi ekspor 2) Meningkatkan kualitas ekspor	Jumlah peningkatan keluhan fasilitas ekspor dan impor; Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitas perdagangan luar negeri. Persentase layanan pelanggan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online. Jumlah pemilik Hak Akses INATRADE. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdagangan. Jumlah koordinasi terkait skema pembiayaan ekspor. Harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnya. Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan INATRADE. SKA Online, dan fasilitasi perdagangan lainnya. Penungkapan rasio nilai ekspor yang menggunakan SKA. Preferensi dan Non Preferensi terhadap total ekspor (%)
3. Peningkatan pelayanan tarif dan non-tarif	1) Persentase penyelesaian keluhan konsumen 2) Persentase keluhan konsumen yang ditangani secara efektif 3) Persentase keluhan konsumen yang ditangani secara efisien	70%	80%	90%	1) Meningkatkan efisiensi ekspor 2) Meningkatkan kualitas ekspor	1) Meningkatkan efisiensi ekspor 2) Meningkatkan kualitas ekspor	Jumlah peningkatan keluhan fasilitas ekspor dan impor; Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitas perdagangan luar negeri. Persentase layanan pelanggan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online. Jumlah pemilik Hak Akses INATRADE. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdagangan. Jumlah koordinasi terkait skema pembiayaan ekspor. Harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnya. Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan INATRADE. SKA Online, dan fasilitasi perdagangan lainnya. Penungkapan rasio nilai ekspor yang menggunakan SKA. Preferensi dan Non Preferensi terhadap total ekspor (%)
4. Peningkatan akses pasar dan perdagangan internasional	1) Persentase penyelesaian keluhan konsumen 2) Persentase keluhan konsumen yang ditangani secara efektif 3) Persentase keluhan konsumen yang ditangani secara efisien	70%	80%	90%	1) Meningkatkan efisiensi ekspor 2) Meningkatkan kualitas ekspor	1) Meningkatkan efisiensi ekspor 2) Meningkatkan kualitas ekspor	Jumlah peningkatan keluhan fasilitas ekspor dan impor; Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitas perdagangan luar negeri. Persentase layanan pelanggan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online. Jumlah pemilik Hak Akses INATRADE. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdagangan. Jumlah koordinasi terkait skema pembiayaan ekspor. Harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnya. Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan INATRADE. SKA Online, dan fasilitasi perdagangan lainnya. Penungkapan rasio nilai ekspor yang menggunakan SKA. Preferensi dan Non Preferensi terhadap total ekspor (%)
5. Peningkatan akses pasar dan perdagangan internasional	1) Persentase penyelesaian keluhan konsumen 2) Persentase keluhan konsumen yang ditangani secara efektif 3) Persentase keluhan konsumen yang ditangani secara efisien	70%	80%	90%	1) Meningkatkan efisiensi ekspor 2) Meningkatkan kualitas ekspor	1) Meningkatkan efisiensi ekspor 2) Meningkatkan kualitas ekspor	Jumlah peningkatan keluhan fasilitas ekspor dan impor; Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitas perdagangan luar negeri. Persentase layanan pelanggan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online. Jumlah pemilik Hak Akses INATRADE. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdagangan. Jumlah koordinasi terkait skema pembiayaan ekspor. Harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnya. Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan INATRADE. SKA Online, dan fasilitasi perdagangan lainnya. Penungkapan rasio nilai ekspor yang menggunakan SKA. Preferensi dan Non Preferensi terhadap total ekspor (%)

Lampiran Pedoman Nomor 5

Sasaran Program	Indikator Program	Target RPJMN/RKP			Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator (Referensi Target RPJMN/RKP Tahun 2015, 2016)
		Th. 2015	Th. 2016	Th. 2019			
B3 PROGRAM PENUBUHAN DAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PERSEBARAN INDUSTRI (by: Kementerian Perindustrian)							
					<p>1. Pengembangan fasilitas industri WF 1</p> <p>2. Pengembangan fasilitas industri WF 1</p> <p>3. Pengembangan fasilitas industri WF 1</p>	<p>1. Terpenuhinya komitmen, tidak hanya dan sekedar, akan kerja sama pengembangan industri.</p> <p>2. Terpenuhinya komitmen, tidak hanya dan sekedar, akan kerja sama pengembangan industri.</p>	<p>Jumlah (Referensi Target RPJMN/RKP Tahun 2015, 2016)</p> <p>Penyusunan Perdagangan Internasional, Dokumen Keperluan trade lanjut dan peta kerja sama perdagangan internasional</p>
B4 PROGRAM PENUBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO (by: Kementerian Perindustrian)							
					<p>1. Revitalisasi dan pertumbuhan industri Hasil Laut dan perikanan</p> <p>2. Revitalisasi dan pertumbuhan Industri Makanan dan Perikanan</p> <p>3. Revitalisasi dan pertumbuhan Industri Yakanera, Hasil Laut dan Perikanan</p> <p>4. Revitalisasi dan pertumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan</p>	<p>1. Mengembangkan Pemasaran Industri Kecil dan Menengah</p> <p>2. Mengembangkan Pemasaran Industri Kecil dan Menengah</p> <p>3. Mengembangkan Pemasaran Industri Kecil dan Menengah</p> <p>4. Mengembangkan Pemasaran Industri Kecil dan Menengah</p>	<p>Pengembangan industri Hasil Hutan dan Perikanan Lainnya (komoditas, Penumbuhan dan Pengembangan Industri okelima dan kemudi (komoditas), Terwujudnya Standar Nasional Indonesia (SNI/SNI wajib), Partisipasi dalam standar dalam pameran di Dalam dan Luar Negeri</p> <p>Pengembangan Industri Pangan (komoditi), Pengembangan Industri Bahan Penyegar (komoditi), Pengembangan Industri Minuman Lainnya (komoditi)</p> <p>Terwujudnya Standard Pada Industri Minuman dan Tembakau (SNI/SNI Wajib), Partisipasi dalam standar dalam pameran di Dalam dan Luar Negeri (standar/pameran)</p> <p>Pengembangan Industri Pangan (komoditi), Pengembangan Industri Bahan Penyegar (komoditi), Pengembangan Industri Minuman Lainnya (komoditi)</p> <p>Standarisasi pada industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (SNI/SNI wajib), Promosi dan kerjasama pada industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (pameran/standar)</p>
B5 PROGRAM PENUBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (by: Kementerian Perindustrian)							
					<p>1. Kewajiban dan pemenuhan industri kecil dan menengah</p>	<p>1. Kewajiban, analisis pengembangan produk IKM</p> <p>2. Kewajiban, analisis pengembangan produk IKM</p>	<p>Jumlah Produk yang dikembangkan (produk)</p> <p>Jumlah Sektor yang dikembangkan (sektor)</p> <p>Jumlah IKM yang mengkonstruksi mesin pertanian (IKM)</p> <p>Jumlah UPT yang disubsidi (UPT)</p> <p>Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas Informasi Pasar, Promosi dan Pameran (IKM)</p>
B6 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (by: Kementerian Perindustrian)							
					<p>1. Pengembangan Kualitas Manajemen dan Keahlian</p> <p>2. Peningkatan kolaborasi sinergisalisasi industri</p>	<p>1. Terpenuhinya Kualitas Manajemen dan Keahlian Manajerial</p> <p>2. Terpenuhinya kolaborasi sinergisalisasi industri</p>	<p>Ditertapkannya RPP, RPPN, menjadi PP dan Ditertapkannya Pempes tenaga KIM yang sesuai dengan Visi-Misi Presiden</p> <p>Memanglatnya RSN (RSN), Terwujudnya regulasi teknis terkait dengan SNI (regulasi), Terwujudnya skema sertifikasi mutu produk (sema), Terwujudnya pengawasan SNI (laporan)</p>

Lampiran Pedoman Nomor 6

Nama Objek Evaluasi	:	KKE No	:	KKE-
Periode Evaluasi	:	Ref Program evaluasi	:	
		Nomor		
Sasaran Evaluasi	:	Dibuat oleh	:	
		(Nama/Paraf)		
		Direviu oleh	:	
		(Nama/Paraf)		

**KERTAS KERJA EVALUASI
ATAS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKSPOR**

A. Tujuan Evaluasi:

1. Mengidentifikasi keberadaan kebijakan/prosedur formal yang bersifat (lebih) operasional untuk mendorong pengembangan ekspor non migas yang bernilai tambah, khususnya bagi pelaku ekspor UKM/IKM dalam rangka mendukung upaya pengembangan ekspor nasional.
2. Menganalisis adanya ketidakjelasan/ketidaksinkronan (disharmonisasi) dan tumpang tindih antar kebijakan/regulasi yang mengatur mengenai pengembangan ekspor, baik pengembangan produk ekspor maupun pasar ekspor.

B. Hasil Evaluasi:

1. **TEO#1a:** Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang menetapkan jenis-jenis produk unggulan daerah (a.l. klastering produk pertanian, kehutanan, industri, pertambangan, dll), sesuai karakteristik potensi daerah, sebagai dasar/acuan pengembangan produk ekspor (termasuk diversifikasi produk ekspor)

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Telah/Belum ... terdapat Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ttg klastering produk-produk unggulan daerah, khususnya produk non migas yang berorientasi ekspor

Saran :

Lampiran Pedoman Nomor 6

2. **TEO#1b:** Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai insentif permodalan produksi dan/atau bantuan teknis proses produksi, khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan produk ekspor non migas

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Telah/Belum ... terdapat kebijakan/regulasi (yang bersifat lebih operasional ~ juklak/juknis/prosedur) ttg insentif permodalan dan/atau bantuan teknis proses produksi bagi UKM/ IKM dalam upaya mendorong pengembangan produk-produk non migas yang berorientasi ekspor

Saran :

3. **TEO#1c:** Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai standardisasi kualitas produk ekspor (termasuk desain branding/ packaging dan pengurusan HKI), khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan produk ekspor non migas

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Telah/Belum ... terdapat kebijakan/regulasi (yang bersifat lebih operasional ~ juklak/juknis/prosedur) ttg penetapan standardisasi kualitas produk-produk yang berorientasi ekspor

Saran :

4. **TEO#2:** Adanya ketidakjelasan/ketidaksinkronan (disharmonisasi tumpang tindih) atas kebijakan/regulasi terkait pengembangan produk ekspor

Lampiran Pedoman Nomor 6

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Kebijakan/regulasi terkait pengembangan produk ekspor ... telah/belum jelas/sinkron/harmonis.
<u>Saran :</u>

5. **TEO#3a:** Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai kemudahan investasi/berusaha dan perijinan ekspor, khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan produk ekspor non migas

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Telah/Belum ... terdapat kebijakan/regulasi (yang bersifat lebih operasional ~ juklak/juknis/prosedur) ttg kemudahan berusaha dan perijinan ekspor, khususnya bagi pelaku UKM/IKM
<u>Saran :</u>

6. **TEO#3b:** Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai mekanisme/tatacara pembinaan dan pemberdayaan UKM/IKM yang berorientasi ekspor untuk pengembangan ekspor nasional/daerah

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

Lampiran Pedoman Nomor 6

b. Simpulan

Telah/Belum ... terdapat kebijakan/regulasi (yang bersifat lebih operasional ~ juklak/juknis/prosedur) ttg mekanisme/tatacara pembinaan dan pemberdayaan UKM/IKM yang berorientasi ekspor (termasuk mendorong UKM/IKM menjadi pengusaha ekspor)
<u>Saran</u> :

7. **TEO#3c:** Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai proses/mechanisme kegiatan diseminasi dan pemanfaatan informasi pasar ekspor (*market intelligence/market brief*), khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan pasar ekspor

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Telah/Belum ... terdapat kebijakan/regulasi (yang bersifat lebih operasional ~ juklak/juknis/prosedur) ttg mekanisme/tatacara kegiatan diseminasi dan pemanfaatan informasi pasar ekspor, khususnya bagi pelaku UKM/IKM
<u>Saran</u> :

8. **TEO#3d:** Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai proses/mechanisme kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya bagi UKM/IKM untuk pengembangan pasar ekspor

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Telah/Belum ... terdapat kebijakan/regulasi (yang bersifat lebih operasional ~ juklak/juknis/prosedur) ttg mekanisme/tatacara kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya bagi pelaku UKM/IKM
<u>Saran</u> :

Lampiran Pedoman Nomor 6

9. **TEO#3e:** Belum terdapat kebijakan/regulasi formal yang mengatur mengenai proses/mechanisme kegiatan fasilitasi kerjasama UKM/IKM yang berorientasi ekspor dengan usaha besar, Kadin, lembaga pendidikan/penelitian, dan asosiasi industri/profesi

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Telah/Belum ... terdapat kebijakan/regulasi (yang bersifat lebih operasional ~ juklak/juknis/prosedur) ttg mekanisme/tatacara kegiatan fasilitasi kerjasama ekspor, khususnya bagi pelaku UKM/IKM

Saran :

10. **TEO#4:** Adanya ketidakjelasan/ketidaksinkronan (disharmonisasi tumpang tindih) atas kebijakan/regulasi terkait pengembangan pasar ekspor.

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Kebijakan/regulasi terkait pengembangan pasar ekspor ... **telah/belum** jelas/sinkron/harmonis.

Saran :

Lampiran Pedoman Nomor 6

Nama Objek Evaluasi	:	KKE No	:	KKE-
Periode Evaluasi	:	Ref Program evaluasi	:	
		Nomor		
Sasaran Evaluasi	:	Dibuat oleh	:	
		(Nama/Paraf)		
		Direviu oleh	:	
		(Nama/Paraf)		

**KERTAS KERJA EVALUASI
 ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKSPOR**

A. Tujuan Evaluasi:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberadaan dan peran kelembagaan ekspor dalam upaya optimalisasi pengembangan ekspor nasional.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis sejauhmana penetapan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekspor sebagai salah satu indikator kinerja masing-masing satuan kerja kementerian teknis maupun pemerintah daerah.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi dan permasalahan atas pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi atas program/kegiatan pengembangan ekspor nasional/daerah.

B. Hasil Evaluasi:

1. **TEO#5a:** Belum adanya penetapan kelembagaan ekspor secara jelas yang bertanggung jawab dalam sinkronisasi dan efektivitas koordinasi program/kegiatan pengembangan ekspor nasional secara terintegrasi, baik di tingkat pemerintah pusat/daerah

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

1) Telah/Belum ... terdapat kebijakan/regulasi ttg penetapan kelembagaan ekspor sebagai koordinator program/kegiatan pengembangan ekspor nasional (yang bersifat lintas sektoral) secara terintegrasi
2) Telah/Belum ... terdapat kejelasan pola hubungan dan tata kelola program/kegiatan pengembangan ekspor nasional, baik di tingkat pusat/daerah
<u>Saran</u> :

Lampiran Pedoman Nomor 6

2. **TEO#5b:** Kelembagaan dan pengelolaan program/kegiatan terkait pengembangan ekspor nasional masih bersifat sektoral/ parsial di masing-masing entitas (satker/unit satker), sehingga berisiko terhadap efektivitas tujuan program/kegiatan secara optimal

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

- 1) **Telah/Belum** ... terdapat koordinasi dan sinergi atas implementasi (kelembagaan dan pengelolaan) program/kegiatan terkait pengembangan ekspor di masing-masing entitas terkait (perdagangan, perindustrian, UMKM, dll)
- 2) **Ada/Tidak** ... terdapat tumpang tindih program/kegiatan pengembangan ekspor di masing-masing entitas terkait

Saran :

3. **TEO#6a:** Kementerian teknis terkait (perdagangan, perindustrian, UMKM, dll.) belum melaksanakan program/kegiatan terkait pengembangan ekspor nasional secara optimal sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Kementerian teknis terkait ... **Telah/Belum** ... melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terkait program/kegiatan pengembangan ekspor secara optimal

Saran :

4. **TEO#6b:** Tim Teknis Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Pusat/Daerah ~ PEPI/PEPIDA) yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan peningkatan ekspor dan investasi belum dibentuk/ditetapkan, **atau** Tim PEPI/PEPIDA telah dibentuk namun belum berperan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terkait pengembangan ekspor nasional

Lampiran Pedoman Nomor 6

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Tim Teknis Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI/DA) yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan peningkatan ekspor dan investasi ... Telah/Belum ... dibentuk/ditetapkan, atau Tim PEPI/DA ... Telah/Belum ... berperan optimal dalam upaya sinkronisasi dan efektivitas koordinasi peningkatan ekspor dan investasi
<u>Saran :</u>

5. **TEO#7:** Pemerintah daerah (provinsi, kab/kota) tidak menetapkan program/kegiatan pengembangan ekspor sesuai karakteristik/ potensi daerahnya (sebagai urusan pilihan daerah) dalam rangka mendukung program pengembangan ekspor nasional (prioritas nasional)

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Pemerintah daerah ... Telah/Belum ... enetapkan program/kegiatan pengembangan ekspor sesuai karakteristik/ potensi daerahnya (urusan pilihan daerah), sebagai salah satu indikator kinerja pemerintah
<u>Saran :</u>

6. **TEO#8:** Belum ditetapkannya Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional/Daerah (RIPIN/D) maupun Kebijakan Industri Nasional (KIN) sebagai perencanaan strategis pemerintah dalam pengembangan industri.

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Telah/Belum ... terdapat Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional/Daerah (RIPIN/D) maupun Kebijakan Industri Nasional (KIN) sebagai perencanaan strategis pemerintah dalam pengembangan industri

Saran :

7. **TEO#9a:** Program/kegiatan terkait pengembangan ekspor (yang tertuang dalam RKA KL/SKPD, RKPD/APBD) belum sepenuhnya sinkron dan selaras dengan program/kegiatan prioritas nasional (RPJMN/RKP), baik secara nomenklatur maupun substansi target output/outcome, **atau** Kementerian teknis maupun pemda tidak mengakomodasi sebagian besar program/kegiatan prioritas pengembangan ekspor nasional yang tertuang dalam RPJMN/RKP (~ misal, hanya fokus dg kegiatan promosi/pameran dg anggaran yang terbatas)

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Kementerian teknis maupun Pemda ... **Telah/Belum** ... mengakomodasi program/kegiatan prioritas pengembangan ekspor nasional (yang tertuang dalam RPJMN/RKP), **atau**

Program/kegiatan terkait pengembangan ekspor Kementerian teknis maupun Pemda ... **Telah/Belum** ... sepenuhnya sinkron dan selaras dengan program/kegiatan prioritas nasional (RPJMN/RKP), baik secara nomenklatur maupun substansi target output/outcome

Saran :

8. **TEO#9b:** Penetapan target/sasaran output/outcome program/kegiatan pengembangan ekspor (yang tertuang dalam RKA KL/SKPD, RKPD/APBD) belum sepenuhnya didukung sumber data yang jelas/akurat.

Lampiran Pedoman Nomor 6

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

1) Penetapan target/sasaran output/outcome program/kegiatan pengembangan ekspor pada Kementerian teknis maupun Pemda ... Telah/Belum ... didukung sumber data yang jelas/akurat
2) Ada/Tidak ada ... rincian (<i>breakdown</i>) atas target/sasaran output/outcome dalam RPJMN/RKP
<u>Saran :</u>

9. **TEO#10:** Belum adanya/belum memadainya sistem informasi (database) yang akurat/jelas dan terintegrasi terkait data/informasi pengembangan ekspor nasional, baik di tingkat pusat/daerah

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Ada/Tidak ada ... terdapat sistem informasi (database) yang update terkait data/informasi pengembangan ekspor nasional, a.l. berupa; produk ekspor, pelaku ekspor (UKM/Non UKM), pasar ekspor, baik di tingkat pusat/daerah, atau Sistem informasi (database) terkait pengembangan ekspor nasional ... Telah/Belum ... memadai
<u>Saran :</u>

10. **TEO#11:** Capaian pertumbuhan barang ekspor non migas (berupa a.l. pertanian, kehutanan, industri, dll), khususnya produk ekspor dari UMKM belum optimal sesuai target yang ditetapkan, baik secara nasional/daerah.

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Capaian pertumbuhan barang ekspor non migas (a.l. berupa: pertanian, kehutanan, industri, dll) ... Telah/Belum ... sesuai target yang ditetapkan (baik target nasional/daerah)

<u>Saran :</u>

11. **TEO#12a:** Belum adanya/belum optimalnya upaya standardisasi kualitas produk ekspor non migas guna mendorong peningkatan daya saing produk ekspor UKM/IKM di pasar ekspor
12. **TEO#12b:** Pengelolaan produk ekspor non migas, berupa produk pertanian, kehutanan, dan industri belum optimal (belum adanya standardisasi produk)

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

- | |
|--|
| 1) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target standardisasi produk ekspor non migas, termasuk produk pertanian, kehutanan, industri (<i>jika ada</i>) |
| 2) Telah/belum ... adanya/optimalnya upaya standardisasi produk ekspor non migas (termasuk produk pertanian, kehutanan, industri, dll.) |

<u>Saran :</u>

13. **TEO#13:** Kurangnya/belum optimalnya insentif permodalan/ pembiayaan produksi maupun bantuan teknis produksi bagi UKM/IKM, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Lembaga Pembiayaan/Dunia Usaha

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

- | |
|---|
| 1) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target kegiatan insentif maupun bantuan teknis produksi (<i>jika ada</i>) |
| 2) Telah/belum ... optimalnya insentif maupun bantuan teknis produksi bagi UKM/IKM |

Lampiran Pedoman Nomor 6

Saran :

- 14. **TEO#14a:** Kurangnya/belum optimalnya diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas dalam rangka meningkatkan daya saing (pertumbuhan) ekspor non migas (baik di Pasar Utama maupun Pasar Prospektif)
- 15. **TEO#14b:** Belum optimalnya upaya revitalisasi dan pengembangan pengolahan industri berbasis agro (produk hasil hutan, perkebunan, perikanan, dll) dalam rangka diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

1) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target pertumbuhan ekspor non migas produk utama dan prospektif (<i>jika ada</i>)
2) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target pertumbuhan ekspor non migas pasar utama dan prospektif (<i>jika ada</i>)
3) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target revitalisasi dan penumbuhan produk ekspor agroindustri (<i>jika ada</i>)
4) Telah/belum ... optimalnya kegiatan diversifikasi pengembangan produk ekspor non migas (termasuk produk ekspor agro industri)

Saran :

- 16. **TEO#15a:** Jumlah dan kualitas pelatihan ekspor dalam rangka mendorong pelaku usaha UKM/IKM untuk ekspor maupun mencetak para eksportir baru kurang memadai (materi pelatihan belum berorientasi ekspor)
- 17. **TEO#15b:** Banyak pelaku usaha UKM/IKM yang masih belum berorientasi ekspor (jumlah eksportir UMKM di daerah masih terbatas), **atau** Belum memadainya kemampuan dan keterampilan eksportir daerah dalam bidang ekspor dan promosi
- 18. **TEO#15c:** Masih belum memadainya keberadaan infrastruktur dan peran/kemampuan balai penelitian dalam upaya meningkatkan daya saing industri, khususnya bagi pelaku UKM/IKM

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

1) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target pelatihan eksportir dan calon eksportir (<i>jika ada</i>)
2) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target penelitian/pengembangan teknologi industri (<i>jika ada</i>)
3) Jumlah/kualitas pelatihan ekspor ... Telah/Belum ... memadai
4) Banyak pelaku usaha UKM/IKM ... Telah/Belum ... berorientasi ekspor, atau Telah/Belum ... memadainya kemampuan dan ketrampilan eksportir daerah
5) Telah/Belum ... memadainya infrastruktur dan peran/ kemampuan Balai Penelitian/Pengembangan Industri
<u>Saran :</u>

19. **TEO#16a:** Belum adanya/memadainya pengembangan fasilitasi pengolahan industri di daerah (kawasan industri maupun sentra industri), sehingga berisiko rendahnya kualitas produk ekspor daerah
20. **TEO#16b:** Belum optimalnya upaya fasilitasi pengembangan produk-produk UKM/IKM yang berorientasi ekspor

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

1) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target pembangunan dan fasilitasi kawasan industri dan sentra industri kecil menengah di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua (<i>jika ada</i>)
2) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target pengembangan fasilitas industri kecil dan menengah (<i>jika ada</i>)
3) Telah/Belum ... memadainya pengembangan fasilitasi pengolahan industri di daerah
4) Telah/Belum ... optimalnya upaya fasilitasi pengembangan produk-produk UKM/IKM
<u>Saran :</u>

21. **TEO#17:** Kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya untuk produk UKM/IKM masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi, sehingga belum optimal dalam mendukung kegiatan promosi ekspor nasional

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

Lampiran Pedoman Nomor 6

b. Simpulan

1) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target pameran dagang dan promosi ekspor, baik di dalam negeri maupun luar negeri (<i>jika ada</i>) 2) Telah/Belum ... optimalnya kegiatan pameran dagang dan promosi ekspor, khususnya untuk produk UKM/IKM
<u>Saran :</u>

- 22. **TEO#18a:** Kurangnya/belum optimalnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kerjasama di bidang pengembangan ekspor, baik dengan pihak luar negeri maupun dalam negeri
- 23. **TEO#18b:** Kurangnya upaya peningkatan kerjasama perdagangan bilateral maupun multilateral melalui proses ratifikasi
- 24. **TEO#18c:** Kurangnya upaya peningkatan kerjasama perdagangan di Forum ASEAN, APEC dan Organisasi Internasional lainnya
- 25. **TEO#18d:** Adanya ketidakjelasan capaian tindak lanjut dan manfaat yang diperoleh dari hasil-hasil kerjasama perdagangan internasional
- 26. **TEO#18e:** Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam fasilitasi pengembangan ekspor nasional

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

1) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target kerjasama pengembangan ekspor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (<i>jika ada</i>) 2) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target fasilitasi perdagangan luar negeri daerah (<i>jika ada</i>) 3) Telah/Belum ... optimalnya kegiatan kerjasama pengembangan ekspor 4) Telah/Belum ... optimalnya upaya peningkatan kerjasama perdagangan bilateral maupun multilateral 5) Telah/Belum ... optimalnya peran pemerintah daerah dalam fasilitas pengembangan ekspor nasional, khususnya bagi pelaku UKM/IKM di daerah
<u>Saran :</u>

- 27. **TEO#19a:** Kurangnya/belum optimalnya kegiatan pencitraan produk ekspor, khususnya produk UKM/IKM sehingga citra produk ekspor (nation branding) masih relatif rendah
- 28. **TEO#19b:** Keberadaan produk ekspor UKM/IKM kurang/tidak kompetitif (jumlah produk ekspor berkualitas terbatas, harga tidak murah dan/atau tidak sebanding kualitas produk)
- 29. **TEO#19c:** Kurangnya tingkat apresiasi maupun penghargaan terhadap inovasi produk industri dalam negeri yang berorientasi ekspor

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

1) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target citra produk ekspor (<i>jika ada</i>)
2) Telah/Belum ... optimalnya kegiatan pencitraan produk ekspor, khususnya bagi UKM/IKM
3) Keberadaan produk ekspor UKM/IKM ... Telah/Belum ... kompetitif
4) Telah/Belum ... memadainya apresiasi/penghargaan terhadap inovasi produk industri dalam negeri
<u>Saran :</u>

30. **TEO#20a:** Kualitas dan kuantitas pelayanan informasi ekspor, khususnya kepada pelaku usaha ekspor UKM/IKM belum memadai
31. **TEO#20b:** Ketersediaan infrastruktur perijinan ekspor masih belum memadai, sehingga berisiko terhambatnya proses penyelesaian perijinan ekspor
32. **TEO#20c:** Belum optimalnya upaya pengamanan dan perlindungan akses pasar kepada para pelaku ekspor, khususnya UKM/IKM
33. **TEO#20d:** Belum adanya kejelasan pendelegasian perijinan sektor perdagangan dari pemerintah kepada Administratur KEK untuk mendukung peranan KEK terkait pengembangan ekspor

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

1) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target pengelolaan/pelayanan informasi ekspor (<i>jika ada</i>)
2) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target ketersediaan infrastruktur perijinan, dan pengamanan akses pasar (<i>jika ada</i>)
3) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target pendelegasian wewenang perijinan kepada Administratur KEK (<i>jika ada</i>)
4) Telah/Belum ... memadainya kegiatan pengelolaan/ pelayanan informasi ekspor, khususnya bagi UKM/IKM
5) Telah/Belum ... memadainya infrastruktur perijinan ekspor dan pengamanan akses pasar
6) Telah/Belum ... jelasnya pendelegasian wewenang perijinan kepada Administratur KEK
<u>Saran :</u>

Lampiran Pedoman Nomor 6

34. **TEO#21:** Kurang/belum optimalnya capaian peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor dalam rangka mendorong peningkatan ekspor non migas

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

1) Tercapainya/Tidak tercapainya ... target peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor (<i>jika ada</i>)
2) Telah/Belum ... optimalnya peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor
<u>Saran :</u>

35. **TEO#22a:** Kementerian teknis maupun Pemda belum menatausahakan/mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan terkait pengembangan ekspor secara tertib dan memadai

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Mekanisme penatausahaan dan pelaporan program/kegiatan oleh pihak-pihak terkait, baik Kementerian teknis maupun pemda ... Telah/Belum ... dilaksanakan secara tertib (tepat waktu, tepat substansi dan sesuai ketentuan)
<u>Saran :</u>

36. **TEO#22b:** Pengelolaan alokasi/anggaran program/kegiatan terkait pengembangan ekspor di daerah yang bersumber dana APBN (Dana Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan) belum dikordinasikan/dilaporkan kepada pemerintah daerah secara memadai (kurang transparan)

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Pengelolaan alokasi/ anggaran program/kegiatan yang bersumber dana APBN (Dana Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan) terkait pengembangan ekspor ... **Telah/Belum** ... dikoordinasikan kepada pemerintah daerah secara memadai

Saran :

37. **TEO#23:** Kementerian teknis maupun Pemda belum memiliki/ menyelenggarakan sistem informasi (database) terkait informasi ekspor (produk ekspor, pelaku ekspor, pasar ekspor) secara akurat dan *update*

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Kementerian teknis maupun Pemda ... **Telah/Belum** ... memiliki/ menyelenggarakan sistem informasi (database) yang akurat/valid terkait ekspor dan telah dilakukan update nya secara berkala

Saran :

38. **TEO#24:** Kementerian teknis maupun Pemda belum melaksanakan monitoring atas rencana, realisasi dan capaian hasil (output/outcome) program/kegiatan pengembangan ekspor secara memadai (tidak ada laporan kegiatan monitoring dan tindak lanjutnya)

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Kementerian teknis maupun Pemda ... **Telah/Belum** ... memonitor/mengevaluasi capaian output/outcome program/kegiatan pengembangan ekspor nasional (baik secara parsial di masing-masing satker maupun secara keseluruhan program/kegiatan lintas sektoral)

Saran :

Lampiran Pedoman Nomor 6

39. **TEO#25:** Inspektorat Kementerian teknis maupun Pemda (APIP) belum melaksanakan evaluasi terpisah secara memadai atas program/kegiatan pengembangan ekspor nasional, baik secara parsial di masing-masing Satker maupun secara keseluruhan program/kegiatan lintas sektoral

a. Kondisi dan Permasalahan

Uraian (kondisi, sebab, akibat dan tanggapan)	Keterangan
1) Kondisi :	
2) Sebab :	
3) Akibat :	
4) Tanggapan:	

b. Simpulan

Inspektorat Kementerian teknis dan/atau Pemda (APIP) ... Telah/Belum ... Inspektorat Kementerian teknis maupun Pemda (APIP) telah/belum melaksanakan pengawasan atas program/kegiatan pengembangan ekspor nasional (baik secara parsial di masing-masing satker maupun secara keseluruhan program/kegiatan lintas sektoral)
<u>Saran :</u>

Lampiran Pedoman Nomor 7

DAFTAR DATA/DOKUMEN
EVALUASI ATAS PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
TAHUN 2015

Daftar dokumen pada tabel di bawah ini adalah dokumen terkait dengan implementasi Program Pengembangan Ekspor Nasional di daerah. Dokumen yang tercantum dalam tabel di bawah ini merupakan dokumen minimal yang perlu didapatkan dalam rangka proses evaluasi sebagai dukungan dalam pelaksanaan langkah kerja yang tertuang dalam pedoman evaluasi.

No.	Aspek Evaluasi	Jenis Dokumen	Ada	Tidak	Referensi
1.	Survei Pendahuluan	1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)			Analisis apakah dalam dokumen RPJMD terdapat program/kegiatan yang mendukung Pengembangan Ekspor/Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan UKM dalam rangka ekspor.
		2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015 dan 2016			Analisis apakah program/kegiatan yang mendukung Pengembangan Ekspor/Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan UKM dalam rangka ekspor dalam dokumen RPJMD sudah selaras dan relevan dengan target RPJMN. Analisis dokumen RKPD apakah terdapat program/kegiatan yang mendukung Pengembangan Ekspor/Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan UKM dalam rangka ekspor. Analisis apakah program/kegiatan yang mendukung Pengembangan Ekspor/Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan UKM dalam rangka ekspor. dalam dokumen RKPD sudah selaras dan relevan dengan target RPJMD dan RKP.
		3. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Analisis apakah program/kegiatan yang mendukung Pengembangan Ekspor/Perdagangan Luar Negeri. dalam dokumen Renstra SKPD sudah selaras dan relevan dengan target RPJMD. Tuangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi.

Lampiran Pedoman Nomor 6

No.	Aspek Evaluasi	Jenis Dokumen	Ada	Tidak	Referensi
		4. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM			Analisis apakah program/kegiatan yang mendukung Pengembangan UKM dalam rangka Ekspor dalam dokumen Renstra SKPD sudah selaras dan relevan dengan target RPJMD. Tuangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
		5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2015 dan 2016			Analisis apakah program/kegiatan yang mendukung Pengembangan Ekspor/Perdagangan Luar Negeri. dalam dokumen RKA SKPD sudah selaras dan relevan dengan target Renstra SKPD. Tuangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
		6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan UKM 2015 dan 2016			Analisis apakah program/kegiatan yang mendukung Pengembangan UKM dalam rangka ekspor. dalam dokumen RKA SKPD sudah selaras dan relevan dengan target Renstra SKPD. Tuangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
		7. Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2015 dan 2016			Lakukan analisis terhadap capaian kinerja SKPD terkait dengan Program Pengembangan Ekspor. Tuangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
2.	Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Barang Non-migas Bernilai Tambah Kemudahan Perizinan Kegiatan Industri dan Usaha Kecil Menengah	8. Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM 2015 dan 2016. 1. Peraturan Daerah tentang Perizinan Kegiatan Industri dan Usaha UKM			Lakukan analisis terhadap capaian kinerja SKPD terkait dengan Pengembangan UKM dalam rangka ekspor. Tuangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi. Lakukan analisis apakah peraturan daerah telah selaras dan relevan dengan Peraturan Presiden No.98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Perindustrian No.41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.

Lampiran Pedoman Nomor 6

No.	Aspek Evaluasi	Jenis Dokumen	Ada	Tidak	Referensi
		2. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) tentang Perizinan Kegiatan Industri dan Usaha UKM			Lakukan analisis apakah SOP telah selaras dan relevan dengan Peraturan Daerah tentang Perizinan Kegiatan Industri dan Usaha UKM, Peraturan Presiden No.98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Perindustrian No.41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.
	Insentif Pendanaan, Permodalan, Pembiayaan, dan Bantuan Teknis Produksi	1. Kebijakan/Peraturan Daerah/SOP tentang Insentif Pendanaan, Permodalan, Pembiayaan, dan Bantuan Teknis Produksi			Lakukan analisis apakah kebijakan dan SOP Insentif Pendanaan, Permodalan, Pembiayaan, dan Bantuan Teknis Produksi telah selaras dan relevan dengan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.
	Fasilitasi kebijakan <i>branding</i> dan <i>packaging</i> , sertifikasi kualitas produk ekspor, dan pengurusan HKI.	1. Kebijakan/Peraturan Daerah/SOP tentang Fasilitasi kebijakan <i>branding</i> dan <i>packaging</i> , sertifikasi kualitas produk ekspor, dan pengurusan HKI.			Lakukan analisis apakah Fasilitasi kebijakan <i>branding</i> dan <i>packaging</i> , sertifikasi kualitas produk ekspor, dan pengurusan HKI. telah selaras dan relevan dengan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.
2.	Diversifikasi Produk Ekspor				
	Pengembangan Industri Daerah	1. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah			Lakukan analisis terhadap Rencana Pembangunan Industri Daerah apakah selaras dan relevan dengan kriteria yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota.
		2. Peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi.			Lakukan analisis terhadap peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi apakah selaras dan relevan dengan kriteria dalam Peraturan Presiden No.28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

Lampiran Pedoman Nomor 6

No.	Aspek Evaluasi	Jenis Dokumen	Ada	Tidak	Referensi
	Pengembangan Produk Unggulan Daerah	1. Keputusan Kepala Daerah dan SOP tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah			Lakukan analisis apakah pengembangan Produk Unggulan Daerah telah disusun sesuai dengan model dan kriteria dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
3.	Diversifikasi Pasar Ekspor				
	Diseminasi Informasi Pasar (<i>market intelligence</i> dan <i>market brief</i>)	1. Kebijakan dan SOP serta struktur kelembagaan tentang Diseminasi Informasi Pasar (<i>market intelligence</i> dan <i>market brief</i>)			Lakukan analisis bagaimana mekanisme kegiatan diseminasi dilakukan dan apakah kegiatan diseminasi dan pemanfaatan informasi pasar ekspor (<i>market intelligence</i> dan <i>market brief</i>) dari kementerian teknis berkontribusi pada peningkatan pengetahuan para pelaku usaha/pelaku ekspor dalam memahami peluang pasar dan peluang ekspor.
4.	Promosi Citra Produk Indonesia				
	Strategi Penyelenggaraan Pameran Dagang dan Promosi Ekspor	1. Kebijakan dan SOP tentang Penyelenggaraan Pameran Dagang dan Promosi Ekspor Daerah			Lakukan analisis apakah penyelenggaraan pameran dagang dan promosi ekspor daerah masih bersifat sektoral dan tersebar baik secara kegiatan maupun anggaran pada beberapa SKPD.
5.	Efektivitas Kelembagaan Ekspor				
	Penetapan Target Kinerja Ekspor Daerah	1. Laporan koordinasi dan hasil kajian dalam rangka penetapan target kinerja ekspor daerah			Lakukan analisis apakah penetapan target kinerja ekspor daerah dalam dokumen perencanaan daerah telah diformulasikan sesuai dengan kondisi dan potensi yang mendukung pencapaian target kinerja ekspor nasional. Dukungan formulasi target kinerja ekspor daerah bisa berupa hasil kajian dari instansi daerah dan/atau turunan kebijakan dari pemerintah pusat.

Lampiran Pedoman Nomor 6

No.	Aspek Evaluasi	Jenis Dokumen	Ada	Tidak	Referensi
	Penetapan Teknis Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA)	1. Surat Keputusan Teknis Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA)			Lakukan analisis apakah kegiatan Tim Teknis Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA) telah mencakup aktivitas seperti perumusan kebijakan umum peningkatan ekspor dan peningkatan investasi, penetapan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan ekspor dan peningkatan investasi, pengkajian langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam proses peningkatan ekspor dan peningkatan investasi, deregulasi dan debirokratisasi ekonomi, keterpaduan promosi, pariwisata, perdagangan dan investasi, serta peningkatan penerimaan produksi dalam negeri.
	Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis (UPT) IKM	1. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan Struktur Kelembagaan UPT IKM			Lakukan analisis apakah SOP dan struktur kelembagaan UPT IKM telah sesuai dengan program Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan UKM telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.142/M-IND/PER/10/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis Industri Kecil dan Menengah.
	Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan UKM	1. Peraturan Daerah dan SOP tentang Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan UKM			Lakukan analisis apakah program Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan UKM telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, secara normatif program Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan UKM juga harus difokuskan pada aspek penyediaan layanan informasi pasar, layanan promosi produk, layanan jaringan pemasaran/distribusi, serta layanan konsultasi keterampilan manajemen dan teknik pemasaran.

Lampiran Pedoman Nomor 6

No.	Aspek Evaluasi	Jenis Dokumen	Ada	Tidak	Referensi
	Fasilitasi Kerjasama IKM/UKM dengan Usaha Besar, Lembaga Pendidikan/ Penelitian, Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Industri dan Profesi	1. Kebijakan, <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan Struktur Kelembagaan Fasilitasi Kerjasama IKM/UKM dengan Usaha Besar, Lembaga Pendidikan/ Penelitian, Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Industri dan Profesi			Lakukan analisis apakah kegiatan fasilitasi kerjasama IKM/UKM dengan Usaha besar, Lembaga Pendidikan/ Penelitian, Kamar Dagang dan Industri, atau Asosiasi Industri dan Profesi telah sesuai dengan ketentuan dan kriteria

Lampiran Pedoman Nomor 8

DAFTAR PANDUAN WAWANCARA
EVALUASI ATAS PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
TAHUN 2016

Daftar pertanyaan pada tabel di bawah ini merupakan panduan minimal yang digunakan pada saat wawancara survei pendahuluan dan pada saat evaluasi aspek/fokus Program Pengembangan Ekspor Nasional. Tim Evaluasi di lapangan dapat mengembangkan/menambah daftar pertanyaan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan atau langkah kerja terkait dengan wawancara.

No.	Objek Wawancara	Pertanyaan
1.	Sekretaris Daerah/ Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Pemerintah Daerah mengetahui dan memahami Program Pengembangan Ekspor Nasional? 2. Apakah Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) telah menetapkan target ekspor provinsi sebagai indikator kinerja Gubernur? 3. Apakah Pemerintah Daerah telah berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait dengan Program Pengembangan Ekspor Nasional dan penetapan target kinerja ekspor daerah? 3. Apakah Pemerintah Daerah telah mengakomodasi Program Pengembangan Ekspor Nasional ke dalam RPJMD dan RKPDP? 4. Apakah Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA)? 5. Apakah Pemerintah Daerah memiliki Pusat Promosi Regional? 6. Apakah Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah?
2.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Pemerintah Daerah sering melakukan koordinasi mengenai strategi pengembangan ekspor dengan Kementerian Perdagangan? 2. Apakah Pemerintah Daerah memiliki Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi dan Rencana Pengembangan Industri Daerah? 3. Apakah Pemerintah Daerah sudah melaksanakan Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah? 4. Apakah Pemerintah Daerah mendapatkan Alokasi DAK sektor Perdagangan dan Perindustrian dari Kementerian Teknis?

Lampiran Pedoman Nomor 8

No.	Objek Wawancara	Pertanyaan
		<p>5. Apakah Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi desain <i>branding</i> dan <i>packaging</i>, pengurusan sertifikasi produk, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada pelaku IKM/UKM baik yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah?</p> <p>6. Apakah Pemerintah Daerah pernah melakukan pameran produk, promosi, dan misi dagang ke luar negeri?</p> <p>7. Apakah Pemerintah Daerah pernah melakukan kegiatan diseminasi informasi pasar (<i>market intelligence</i> dan <i>market brief</i>) kepada para pelaku usaha/pelaku ekspor atau memfasilitasi kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian teknis terkait dengan diseminasi informasi pasar (<i>market intelligence</i> dan <i>market brief</i>)?</p> <p>8. Apakah pemerintah daerah memiliki program/kebijakan fasilitasi kerjasama IKM/UKM dengan usaha besar, lembaga pendidikan/penelitian, kantor dagang dan industri, asosiasi pengusaha/industri?</p> <p>9. Apakah terdapat Peraturan Daerah dan SOP mengenai Perizinan Kegiatan IKM/UKM?</p> <p>10. Apakah Pemerintah Daerah pernah melakukan pameran produk, promosi, dan misi dagang ke luar negeri?</p> <p>11. Apakah telah pernah dilakukan pengawasan dalam bentuk evaluasi/audit/monitoring dalam rangka program pengembangan ekspor?</p> <p>12. Apa saja permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pengembangan ekspor dan industrialisasi?</p> <p>13. Apakah Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki Database Pelaku Usaha Berorientasi Ekspor/Eksportir?</p> <p>14. Apakah pemerintah daerah telah memiliki UPT IKM dan melakukan pengelolaan UPT IKM sesuai dengan kriteria kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.142/M-IND/PER/10/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis Industri Kecil dan Menengah?</p>
3.	Dinas Koperasi dan UKM	<p>1. Apakah Pemerintah Daerah memiliki strategi pembinaan dan pemberdayaan sektor UKM?</p> <p>2. Apakah Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi UKM terkait dengan pengembangan Industri UKM?</p> <p>3. Apakah Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi Alokasi DAK sektor Pembinaan dan Pemberdayaan UKM dari Kementerian Teknis?</p> <p>4. Apakah Pemerintah Daerah memiliki regulasi daerah dan petuniuk teknis dalam rangka program pengembangan ekspor, perizinan dan industri UKM, dan pembinaan serta pemberdayaan UKM?</p>

Lampiran Pedoman Nomor 8

No.	Objek Wawancara	Pertanyaan
		<p>5. Insentif apa saja yang diberikan kepada pelaku industri ukm berorientasi ekspor dalam rangka pengembangan ekspor, pembiayaan, industrialisasi, pembinaan dan pemberdayaan UKM?</p> <p>6. Bagaimana bentuk dan mekanisme insentif pendanaan/pembiayaan/permodalan/bantuan teknis produksi yang diberikan kepada pelaku IKM/UKM di daerah?</p> <p>7. Apakah pemerintah daerah memiliki program/kebijakan fasilitasi kerjasama IKM/UKM dengan usaha besar, lembaga pendidikan/penelitian, kantor dagang dan industri, asosiasi pengusaha/industri?</p> <p>8. Apakah terdapat Peraturan Daerah dan SOP mengenai Perizinan Kegiatan IKM/UKM?</p> <p>8. Apakah Pemerintah Daerah pernah melakukan pameran produk, promosi, dan misi dagang ke luar negeri?</p> <p>9. Apakah telah pernah dilakukan pengawasan dalam bentuk evaluasi/audit/monitoring dalam rangka program pembinaan serta pemberdayaan UKM?</p> <p>10. Apa saja permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pembinaan serta pemberdayaan UKM?</p> <p>11. Apakah Dinas Koperasi dan UKM memiliki Database Pelaku Usaha UKM Berorientasi Ekspor/Eksportir?</p>
4.	Asosiasi Pengusaha	<p>1. Apakah Asosiasi Pengusaha mendapatkan informasi terkait dengan strategi pengembangan ekspor termasuk mendapatkan akses informasi pasar, peluang usaha/ekspor, dan kegiatan promosi/pameran dagang dari pemerintah dan pemerintah daerah?</p> <p>2. Apakah Asosiasi Pengusaha melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, dan Kementerian Teknis melalui dinas terkait di daerah?</p> <p>3. Apakah Asosiasi Pengusaha dilibatkan pemerintah daerah dalam hal perumusan kebijakan yang terkait dengan produksi/industri, ekspor, dan pemberdayaan pelaku usaha/pelaku ekspor?</p> <p>4. Apakah Asosiasi Pengusaha melakukan koordinasi/forum dengan para pelaku usaha/pelaku ekspor di daerah terkait kegiatan industri/produksi/fasilitasi ekspor?</p> <p>5. Apakah Asosiasi Pengusaha menyelenggarakan fasilitasi pelatihan dan atau insentif lainnya kepada para pelaku usaha/pelaku ekspor di daerah terkait kegiatan industri/produksi/fasilitasi ekspor?</p> <p>6. Apa saja kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Asosiasi Pengusaha/Industri UKM/Pelaku Usaha/Eksportir dalam rangka pengembangan produk dan pemasaran produk berorientasi ekspor?</p>

Lampiran Pedoman Nomor 8

No.	Objek Wawancara	Pertanyaan
		7. Apakah asosiasi pengusaha mengetahui tentang program/kebijakan fasilitasi kerjasama IKM/UKM dengan usaha besar, lembaga pendidikan/penelitian, kantor dagang dan industri, asosiasi pengusaha/industri yang dikoordinasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah?
5.	Pelaku Usaha/ Pelaku Ekspor UKM	<p>1. Apakah Industri UKM/Pelaku Usaha/Ekspertir mendapatkan informasi terkait dengan strategi pengembangan ekspor termasuk mendapatkan akses informasi pasar, peluang usaha/ekspor dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah?</p> <p>2. Apakah Industri UKM/Pelaku Usaha/Ekspertir melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, dan Kementerian Teknis melalui dinas terkait di daerah?</p>
		<p>3. Apakah Industri UKM/Pelaku Usaha/Ekspertir mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat terkait dengan proses perizinan dan legalitas usaha, pembiayaan dan bantuan permodalan, sertifikasi dan kualifikasi produk, pelatihan industri (ekspor)/<i>coaching programme</i>, dan/atau insentif lainnya?</p> <p>4. Apakah Industri UKM/Pelaku Usaha/Ekspertir mendapatkan fasilitas untuk bekerjasama dengan perusahaan/industri besar/BUMN/D dalam rangka pengembangan produk dan pemasaran produk?</p> <p>5. Apakah pelaku IKM/UKM mengetahui tentang program/kebijakan fasilitasi kerjasama IKM/UKM dengan usaha besar, lembaga pendidikan/penelitian, kantor dagang dan industri, asosiasi pengusaha/industri yang dikoordinasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah?</p>
		6. Apakah Industri UKM/Pelaku Usaha/Ekspertir pernah mengikuti kegiatan promosi dagang, pameran, dan/atau <i>trade mission</i> lainnya yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian Teknis?
		7. Bagaimana kelancaran dan ketersediaan bahan baku untuk mendukung proses produksi?
		8. Apa saja kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Industri UKM/Pelaku Usaha/Ekspertir dalam rangka pengembangan produk dan pemasaran produk berorientasi ekspor?

Lampiran Pedoman Nomor 9

KUESIONER PELAKU IKM/UKM BERORIENTASI EKSPOR

Nama Perusahaan/Pelaku :
IKM/UKM

Bidang Usaha :

Kategori Usaha :
(Kecil/Menengah)

Alamat :

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah Pelaku IKM/UKM memiliki kelengkapan izin usaha?		
	- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
	- Akta/Sertifikat Pendirian Perusahaan		
	- Tanda Daftar Industri (TDI)		
	- Izin Usaha Industri (IUI)		
	- Surat Izin Usaha (SIU)/Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)		
	- Tanda Bukti Pendaftaran/Tanda Bukti Pendataan		
2.	Apakah Pelaku IKM/UKM pernah melakukan koordinasi dan/atau konsultasi terkait dengan kegiatan produksi/industri, perdagangan, dan ekspor kepada kementerian teknis/dinas di daerah?		
3.	Apakah Pelaku IKM/UKM pernah mendapatkan bantuan pembiayaan/permodalan dari pemerintah pusat/pemerintah daerah?		
4.	Apakah Pelaku IKM/UKM pernah mendapatkan bantuan teknis peralatan/mesin dari pemerintah pusat/pemerintah daerah?		
5.	Apakah Pelaku IKM/UKM pernah mendapatkan bantuan fasilitasi desain kemasan (<i>branding dan packaging</i>), pengurusan standarisasi kualitas produk, dan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari pemerintah pusat/pemerintah daerah?		
6.	Apakah Pelaku IKM/UKM pernah mengikuti kegiatan pelatihan wirausaha/pelatihan ekspor, dan atau kegiatan <i>coaching programme</i> yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah?		
7.	Apakah Pelaku IKM/UKM pernah mengikuti kegiatan sosialisasi atau forum terkait dengan kegiatan produksi/industri, perdagangan, dan ekspor yang diselenggarakan pemerintah pusat/pemerintah daerah?		
8.	Apakah Pelaku IKM/UKM pernah mendapatkan/memanfaatkan serta mengikuti sosialisasi informasi pasar dan peluang pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah		

Lampiran Pedoman Nomor 9

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
9.	pusat/pemerintah daerah? Apakah Pelaku IKM/UKM pernah mengikuti pameran dagang dan/atau promosi ekspor baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dibiayai dan difasilitasi oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah?		
10.	Apakah Pelaku IKM/UKM pernah mengikuti pameran dagang dan/atau promosi ekspor baik di dalam negeri maupun luar negeri atas inisiatif sendiri tanpa fasilitas dari pemerintah pusat/pemerintah daerah?		
11.	Apakah Pelaku IKM/UKM pernah melakukan kerjasama dengan usaha besar, BUMN/D terkait dengan kegiatan produksi/industri, perdagangan, dan ekspor?		
12.	Apakah Pelaku IKM/UKM tergabung dan berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha di daerah?		

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ARDAN ADIPERDANA

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang *Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang *Perindustrian*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang *Perdagangan*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintah anDaerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang *Pelaksanaan Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang *Kebijakan Industri Nasional*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang *Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*.
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 *tentang Kementerian Perdagangan*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019*.
- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Presiden 28 Tahun 2010 *tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi*.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 *tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif*.

-----Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang *Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan*.

-----Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang *Ketentuan Umum di Bidang Ekspor*.

-----Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang *Barang Dilarang Ekspor*.

-----Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 tentang *Jenis Perijinan Eskpor dan Impor, Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure), dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window*.

-----Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah*.

-----Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil*.

-----Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang *Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019*.

-----Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri*.

-----Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 142/M-IND/PER/10/2009 tentang *Pedoman Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis Industri Kecil dan Menengah*.

-----Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang *Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019*.

-----Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*.

-----Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang *Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019*.

-----Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.152 Tahun 2015 tentang *Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi*.

-----Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang *Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor*.

-----Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor P-06/PER/Dep.4/I/2014 tentang *Petunjuk Teknis Fasilitasi Promosi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*.

Alamsy, E. Ichsan. 2011. *Enam Kendala Dera Ekspor Indonesia*. Republika, 27 September 2011. [Online] Available at <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/11/09/27/ls5ui2-enam-kendala-dera-ekspor-indonesia>

Anholt-GfK Nations Brand Index. 2015. [Online] Available at <http://www.simonanholt.com/Research/research-the-anholt-gfk-roper-nation-brands-index-sm.aspx>

Armenia, Resty. 2016. *Pemerintah akan bentuk Badan Gabungan Promosi Ekspor Nasional*. CNN Indonesia, 4 Januari 2016. [Online] Available at <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160104233100-26-102148/pemerintah-akan-bentuk-badan-gabungan-promosi-ekspor-nasional/>

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. 2013. *Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)*.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. 2015. *Laporan Kinerja*.

Febrianto, Vicky. 2015. *Kemendag-APINDO Petakan Kendala Ekspor*. AntaraNews, 13 April 2015. [Online] Available at <http://www.antaranews.com/berita/490521/kemendag-apindo-petakan-kendala-ekspor>

Ginting, Ginta. 2014. *Proposed Conceptual Model Internationalisation of Small Medium Industries (SMIs) in Indonesia: The Relationship between Entrepreneurial Orientation, Network Capital, Degree of Internationalisation and Business Performance*. Asian Social Science, 10 (19), pp.220-229.

Kementerian Dalam Negeri. 2016. *Program Pengembangan Ekspor Nasional. Focused Group Discussion (FGD) Pengawasan Intern Lintas Sektor atas Program Pengembangan Ekspor Nasional*.

Kementerian Perdagangan. 2016. *Profil Ekspor-Impor Indonesia*. [Online] Available at <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2013. *Kebijakan Inland FTA dalam rangka Penguatan Industri Domestik dan Peningkatan Ekspor menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015*.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2015. *Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional: Perkuat Sinergi Pengembangan Ekspor*. Forum Koordinasi Teknis Program Pengembangan Ekspor antara Pusat dan Daerah.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2016. *Arah Kebijakan Perdagangan Dalam RPJMN 2015-2019. Focused Group Discussion (FGD) Pengawasan Intern Lintas Sektor atas Program Pengembangan Ekspor Nasional*.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2015. *Paket Kebijakan Ekonomi I*.

Kementerian Perindustrian. 2016. *Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk IKM di Pasar Internasional. Focused Group Discussion (FGD) Pengawasan Intern Lintas Sektor atas Program Pengembangan Ekspor Nasional*.

Sidabutar, Victor. 2014. *Peluang dan Permasalahan yang Dihadapi UMKM Berorientasi Ekspor*. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia.

-----, 2015. Produk Unggulan jadi Tulang Punggung IKM Indonesia Timur. Neraca, 21 Oktober 2015. [Online] Available at <http://www.neraca.co.id/article/60397/produk-unggulan-jadi-tulang-punggung-ikm-indonesia-timur>

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ARDAN ADIPERDANA